

| JADWAL | | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham | : 26 Juni 2018 | Tanggal Pencatatan HEMTD dan tanggal Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | : 14 September 2018 |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif | : 30 Agustus 2018 | Periode Perdagangan HMETD | : 14 s/d 20 September 2018 |
| Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD | : 12 September 2018 | Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD | : 14 s/d 20 September 2018 |
| Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) | | Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | : 18 s/d 24 September 2018 |
| Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 6 September 2018 | Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | : 24 September 2018 |
| Pasar Tunai | : 12 September 2018 | Tanggal Penjatahan | : 25 September 2018 |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>) | | Periode Peyerahan Saham Hasil Penjatahan | : 26 September 2018 |
| Pasar Reguler dan Negosiasi | : 7 September 2018 | Pemesanan Saham Tambahan | : 26 September 2018 |
| Pasar Tunai | : 13 September 2018 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : 26 September 2018 |
| Tanggal Distribusi HMETD | : 13 September 2018 | | |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan umum di bidang perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung BRI Agro JL Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Telp. (021) 79199980 – 80667600 Fax. (021) 79199950
Website www.briagro.co.id Email: corpsec@briagro.co.id

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 17 Kantor Cabang, 20 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas di kota-kota di Indonesia

**PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII TAHUN 2018**

Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 27,10% (dua puluh tujuh koma sepuluh persen) dari jumlah saham Ditempatkan dan Disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD VIII. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas VIII Tahun 2018 (PMHMETD VIII). HMETD akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 September 2018 dimana setiap pemilik 1.000 (seribu) saham Perseroan akan memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp2.000.435.841.620 (dua triliun empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh Rupiah).

Sesuai dengan pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga Rp.400,- (empat ratus Rupiah) per saham, dengan demikian telah mengalokasikan dana kas sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jika Saham dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 14 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 20 SEPTEMBER 2018 PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018 SETELAH TANGGAL TERSEBUT, MAKA HMETD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN ATAU GUGUR DEMI HUKUM.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA MAKSIMUM SEBESAR 21,32 % (DUA PULUH SATU KOMA TIGA PULUH DUA PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.
YAITU KERUGIAN YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU PUN COUNTER-PARTY UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PERSEROAN PADA SAAT JATUH TEMPO.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2018

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No.B.27/Dir.01/SKP/VII/2018 pada tanggal 16 Juli 2018 dan surat no B. 36 /Dir.05/SKP/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**POJK No. 32/2015**).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga Rp.400,- (empat ratus Rupiah) per saham, dengan demikian telah mengalokasikan dana kas sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jika Saham dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**SBHMETD**) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999, Perseroan hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari jumlah modal disetor Perseroan yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek, saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 177.969.780 (Seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun Perkebunan. Setelah PMHMETD jumlah saham yang diterbitkan dalam Peseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya 23.455.294.785 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham maka tambahan jumlah saham yang tidak akan dicatatkan adalah sebesar 56.583.200 (lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus) saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan demikian total jumlah saham yang tidak dicatatkan adalah sejumlah 234.552.980 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh) saham.

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| DAFTAR ISI | | ii |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | | iii |
| RINGKASAN PROSPEKTUS | | viii |
| I | PENAWARAN UMUM | 1 |
| II | PENGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU | 8 |
| III | PERNYATAAN UTANG | 9 |
| IV | IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 14 |
| V | ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 19 |
| | 1 UMUM | 19 |
| | 2 KINERJA KEUANGAN | 24 |
| | 2.1. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI | 24 |
| | 2.2. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN | 27 |
| | 2.3. LIKUIDITAS | 31 |
| | 2.4. ANALISIS ARUS KAS | 32 |
| | 2.5. OPERASI PER SEGMENT | 33 |
| | 2.6. MANAJEMEN RISIKO | 34 |
| | 2.7. BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE) | 37 |
| | 2.8. PINJAMAN TERUTANG | 39 |
| VI | FAKTOR RISIKO | 40 |
| VII | KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN | 46 |
| VIII | KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 47 |
| | 1 KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA | 47 |
| | A. RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN | 47 |
| | B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 47 |
| | C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN | 49 |
| | D. SUMBER DAYA MANUSIA | 61 |
| | E. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN PENYERTAAN | 66 |
| | F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI | 66 |
| | G. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA | 67 |
| | H. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN | 68 |
| | I. ASURANSI | 70 |
| | J. ASET TETAP PERSEROAN | 71 |
| | K. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN | 72 |
| | L. DIAGRAM PENGAWASAN PERSEROAN | 72 |
| | 2 KEGIATAN USAHA | 73 |
| | A. STRATEGI PERSEROAN | 73 |
| | B. UNIT BISNIS UTAMA | 74 |
| | C. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI) | 75 |
| | D. KOMUNIKASI PEMASARAN | 75 |
| | E. JARINGAN DAN LAYANAN | 77 |
| | F. PENGELOLAAN RISIKO DAN KEPATUHAN | 82 |
| | G. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) | 83 |
| | H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL | 84 |
| | I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) | 85 |
| | 3 KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA | 86 |
| | A. PROSPEK USAHA | 86 |
| | B. TINGKAT KESEHATAN BANK | 93 |
| | C. PERSAINGAN USAHA | 95 |
| IX | EKUITAS | 97 |
| X | KEBIJAKAN DIVIDEN | 99 |
| XI | PERPAJAKAN | 100 |
| XII | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 104 |
| XIII | TATACARA PEMESANAN SAHAM | 107 |
| XIV | PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM | 113 |

DEFINISI DAN SINGKATAN

| | | |
|---|---|---|
| Afiliasi | : | Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| Aset Produktif | : | Berarti terdiri dari Penempatan Pada Bank Lain, Wesel dan tagihan lainnya, Surat berharga, Kredit Yang Diberikan, Tagihan Akseptasi dan Penyertaan Saham. |
| ALCO | : | Berarti singkatan dari <i>Assets and Liabilities Committee</i> , yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, yang diketuai oleh Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas. |
| API | | Berarti singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia. |
| ATM | : | Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan. |
| ATMR | : | Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>). |
| Anggota Bursa | : | Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI. |
| BAE | : | Berarti Biro Administrasi Efek. |
| Bank Kustodian | : | Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian. |
| Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK) | : | Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. |
| BEI atau Bursa Efek Indonesia | : | Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. |
| BI | : | Berarti singkatan dari Bank Indonesia. |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| BLBI | : | Berarti singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. |
| BMPK | : | Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grup sesuai dengan ketentuan BI. |
| BPPN | : | Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. |
| BRI | : | Berarti singkatan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| BUMN | : | Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. |
| BUMD | : | Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. |
| CAR | : | Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR. |
| <i>Coverage Ratio</i> | : | Berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. |
| DPK | : | Berarti singkatan dari Dana Pihak Ketiga. |
| DPS | : | Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk warkat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. |
| Entitas Anak | : | Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia. |
| <i>Fee Based Income</i> | : | Berarti terdiri dari provisi dan komisi selain dari provisi dan komisi atas kredit yang diberikan, laba selisih kurs – bersih, dan pendapatan operasional lainnya – lain-lain. |
| GCG | : | Berarti singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> . |
| GWM | : | Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan. |
| Harga Pelaksanaan | : | Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, sebesar Rp.400- (empat ratus Rupiah) per saham. Harga mana akan disesuaikan dan diumumkan pada prospektus final dengan memperhatikan penawaran terbaik dalam penawaran terbatas atas sisa HMETD yang tidak diambil bagian oleh BRI. |
| Hari Bursa | : | Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut. |
| Hari Kerja | : | Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihindari oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. |
| HMETD | : | Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru Perseroan dalam rangka PMHMETD VIII |
| IAPI | : | Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia. |
| Kredit Yang Diberikan | : | Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain. |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| KSEI | : | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| Kustodian | : | Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. |
| LDR | : | Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). |
| Masyarakat | : | Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri. |
| Menkumham RI | : | Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| Modal Inti (Tier 1) | : | Berarti modal bank yang terdiri dari modal inti utama (Common Equity Tier 1) yang mencakup modal disetor, cadangan tambahan modal (disclosed reserve) dan modal inti tambahan (Additional Tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. |
| Modal Pelengkap (Tier 2) | : | Berarti modal pelengkap bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. |
| NIM | : | Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu margin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif. |
| NPL | : | Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> , yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI. |
| Obligasi Pemerintah | : | Berarti obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
| <i>Payment Point</i> | : | Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan. |
| PDN | : | Berarti singkatan dari Posisi Devisa Netto, yaitu angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. |
| Pemegang Saham Utama | : | Berarti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. |
| Peraturan KSEI | : | Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari. |
| Periode Perdagangan | : | Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya. |
| Pernyataan Efektif | : | Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi |

tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Pernyataan Pendaftaran | : | Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. |
| Perseroan | : | Berarti PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRI Agro) suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan melakukan PMHMETD. |
| Perusahaan Efek | : | Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| PPA | : | Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet), sesuai ketentuan BI. |
| Prospektus | : | Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM. |
| POJK No. 32/2014 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka |
| POJK No. 30/2015 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| POJK No. 32/2015 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| POJK No. 33/2015 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| PSAK | : | Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. |
| Rasio NPL | : | Berarti kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). |
| Rekening Efek | : | Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. |
| RUPS | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| Saham HMETD | : | Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD yaitu sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham |
| Saham Lama | : | Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. |
| SBHMETD | : | Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang |

saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

- SBI : Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
- TERP : Berarti *Theoretical Ex-Right Price* atau Harga Pasar Teoritis.
- Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD : Berarti tanggal 20 September 2018
- USD : Berarti Dolar Amerika Serikat.
- Undang-Undang Perbankan : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
- Usaha Kecil : Berarti usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("**Perseroan**") didirikan tahun 1989 dengan nama PT Bank Agroniaga berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 27 September 1989, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 23 Oktober 1989, keduanya dibuat di hadapan Raden Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-10019.HT.01.01-TH.89, tertanggal 28 Oktober 1989, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 2484/1989 dan Nomor 2485/1989 tanggal 3 November 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, tanggal 1 Desember 1989, Tambahan Berita Negara Nomor 3303. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 tanggal 11 Desember 1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/Upps/ PSbD tanggal 26 Desember 1989. Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 2002 di hadapan Notaris Siti Rayhana, S.H., pengganti dari B.RAY. Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24 Desember 2002, dengan Surat Keputusan No. C-24779.HT.01.04.TH.2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 881 tanggal 31 Januari 2003. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-46794.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan No. 15961 tanggal 26 Agustus 2008.

Setelah perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya terkait dengan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-30947.AH.01.02 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 7 Juni 2012. Sehubungan dengan perubahan nama ini, maka izin usaha Perseroan telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perubahan izin usaha atas nama PT Bank Agroniaga Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Selanjutnya guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana terurai di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 23 April 2015, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0927643, tanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan Daftar Perseroan No. AHU-3497870.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 27 April 2015.

Perubahan modal dasar Perseroan yang terakhir dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 12 April 2017, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0008630.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048613.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017.

Sedangkan perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0220946 tanggal 11 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089316.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta No. 07, Tanggal 11 Juli 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn,

Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - |

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

| | |
|-------------------------|---|
| Jenis Penawaran | : HMETD |
| Jumlah Saham PMHMETD | : 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat). |
| Nilai Nominal | : Rp100,- (seratus Rupiah). |
| Harga Pelaksanaan HMETD | : Rp 400,- (empat ratus Rupiah). |
| Rasio PMHMETD | : 1000 (seribu) saham lama akan memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) HMETD. |
| Dilusi Kepemilikan | : 21,32% (dua puluh satu koma tiga puluh dua persen) |
| Pencatatan | : BEI |

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan jmenambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham) saham dengan harga Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) per saham, dengan demikian telah mengalokasikan dana kas Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sesuai pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VIII dengan asumsi BRI hanya mengambil sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga sebesar Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) persaham, dan sisanya diambil bagian oleh pemegang HMETD lainnya melalui pemesanan saham tambahan dengan demikian asumsi seluruh HMETD dilaksanakan, dengan maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

| | Setelah Pelaksanaan Waran Seri II pada tanggal 12 September 2018 (Recording Date PMHMETD VIII) | | | Setelah Pelaksanaan PMHMETD VIII | | |
|---|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 79,25 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 | 1.478.864.330 | 147.886.433.000 | 6,30 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 | 3.387.045.763 | 338.704.576.300 | 14,45 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 | 23.455.294.785 | 2.345.529.478.500 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - | 36.544.705.215 | 3.654.470.521.500 | - |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VIII dengan asumsi hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melaksanakan HMETD sesuai pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 akan melaksanakan sebagian dari HMETD yang menjadi hak BRI dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga pelaksanaan Rp.400,- (empat ratus rupiah) persaham dengan demikian telah mengaklokasikan dana kas senilai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

| | Sebelum Pelaksanaan PMHMETD | | | Setelah Pelaksanaan PMHMETD | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 88,71 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 | 1.163.643.926 | 116.354.392.600 | 5,55 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 5,74 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 | 20.954.205.181 | 2.095.420.518.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - | 39.045.794.819 | 3.904.579.481.900 | - |

Keterangan selengkapnya mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD VIII ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD VIII dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

B. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi Risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO UTAMA PERSEROAN

- Risiko Kredit

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN

- Risiko Pasar mencakup Risiko Tingkat Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL

- Risiko Operasional yang mencakup Risiko proses internal, Risiko manusia, Risiko sistem.
- Risiko eksternal
- Risiko Strategik
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Reputasi

RISIKO UMUM

- Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
- Ketentuan Negara Lain atau Peraturan International

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

RISIKO TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM

Disamping Risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid
2. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko terkait kepemilikan saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

C. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata dan perkara pidana yang diuraikan pada Bab VIII. 1.H pada halaman 60.

D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008, dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain.

(dalam ribuan Rupiah kecuali ROA, ROE, LDR, NPL dan CAR dalam persentase)

| Keterangan | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--------------------|----------------|------------------|
| Jumlah Aset | 17.787.020.566 | 16.325.247.007 |
| Jumlah Liabilitas | 14.622.732.626 | 13.213.962.130 |
| Jumlah Ekuitas | 3.164.287.940 | 3.111.284.877 |
| ROA (%) | 2,13% | 1,45% |
| ROE (%) | 8,71% | 5,64% |
| LDR (%) | 90,17% | 88,33% |
| Rasio CAR (Tier 1) | 24,83% | 28,61% |
| Rasio CAR (Tier 2) | 0,70% | 0,97% |
| Rasio CAR (Total) | 25,53% | 29,58% |
| NPL – (Neto) | 1,31% | 1,31% |
| NPL – (Bruto) | 2,24% | 2,59% |

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret | | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 |
|--------------------------------|--|----------------------|---|
| | 2018 | 2017 (tidak diaudit) | |
| Pendapatan Bunga | 378.169.798 | 279.092.507 | 1.252.069.204 |
| Beban Bunga | (225.153.597) | (171.054.933) | (748.946.627) |
| Pendapatan Bunga – Neto | 153.016.201 | 108.037.574 | 503.122.577 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 6.320.312 | 11.856.545 | 55.105.854 |
| Beban Operasional Lainnya | (73.875.018) | (54.578.690) | (240.385.053) |
| Laba Operasional | 91.513.953 | 44.181.476 | 176.705.343 |
| Laba Periode/Tahun Berjalan | 67.691.577 | 36.251.286 | 140.495.535 |

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan Keuangan Perseroan yang untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia

C. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPU dan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih per tahun dimulai tahun buku 2018, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

D. TATACARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Akta 02 tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VIII PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 September 2018 dimana setiap pemilik 1.000 (seribu) saham Perseroan akan memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham melalui pelaksanaan HMETD baik untuk saham yang dititipkan dalam penitipan kolektif KSEI maupun pemegang saham warkat..

Keterangan selengkapnya mengenai tatacara pemesanan pembelian saham dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini

E. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Akta No. 51 tanggal 26 Juni 2018 dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan PMHMETD VIII dengan jumlah 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat)) HMETD yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 September 2018 dimana setiap pemilik 1.000 (seribu) saham Perseroan akan memperoleh 271 (duaratus tujuh puluh satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VIII ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan dijual oleh Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. 32/2015 selama 5 (Lima) Hari Bursa mulai tanggal 14 September 2018 sampai dengan 20 September 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 14 September 2018, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 September 2018, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Ketentuan yang harus diperhatikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) untuk sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 27,10% (dua puluh tujuh koma sepuluh persen) dari jumlah saham Ditempatkan dan Disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas VIII Tahun 2018 (PMHMETD VIII). HMETD akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 September 2018 dimana setiap pemilik 1.000 (seribu) saham Perseroan akan memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp2.000.435.841.620 (dua triliun empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh Rupiah).

Sesuai dengan pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga Rp.400,- (empat ratus Rupiah) per saham, dengan demikian telah mengalokasikan dana kas sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jika Saham dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down).



PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

Kegiatan Usaha:

Kegiatan umum di bidang perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Operasi :

Gedung BRI Agro
JL. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Telp. (021) 79199980 – 80667600 Fax. (021) 79199950
Website : www.briagro.co.id
Email: corpsec@briagro.co.id

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 17 Kantor Cabang, 20 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas di kota-kota di Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PUT VIII, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PROSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014 pada tanggal 26 Juni 2018 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Risalah Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, No. 51 tanggal 26 Juni 2018 dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily tanggal 28 Juni 2018, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.briagro.co.id seluruhnya pada tanggal 28 Juni 2018, sebagai berikut :

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, No. 51 tanggal 26 Juni 2018 dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan demikian mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham.
2. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas :
 - a) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dengan ketentuan jumlah saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII tidak melebihi 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru.
 - b) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - c) Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VIII dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.
3.
 - a) Selanjutnya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD, karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - b) Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dan mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar termasuk untuk menyusun kembali Pasal 4 anggaran dasar dengan akta-akta tersendiri dihadapan Notaris, selanjutnya mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

| | | |
|--------------------|---|--|
| Jenis Penawaran | : | HMETD |
| Jumlah Saham | : | 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat) saham baru. |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah). |
| Harga Pelaksanaan | : | Rp400,- (empat ratus Rupiah) |
| HMETD | | |
| Rasio PMHMETD | : | 1.000 (seribu) saham Perseroan akan memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) HMETD |
| Dilusi Kepemilikan | : | 21,32 % (dua puluh satu koma tiga puluh dua persen) |
| Pencatatan | : | BEI |

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Sesuai dengan Pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham) saham dengan harga Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) per saham, dengan demikian telah mengalokasikan dana kas Perseroan senilai Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jika Saham dalam PMHMETD VIII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 September 2018 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 27,10% (dua puluh tujuh koma sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD VIII.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta No. 33, Tanggal 12 April 2017 juncto Akta No. 07, Tanggal 11 Juli 2018, keduanya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - |

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VIII dengan asumsi BRI akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dengan mengambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga Rp.400,- (empat ratus Rupiah) per saham, dengan demikian telah mengalokasikan dana kas sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dan sisanya diambil bagian oleh pemegang HMETD melalui pemesanan saham tambahan dengan demikian asumsi seluruh HMETD dilaksanakan, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

| | Setelah Pelaksanaan Waran Seri II pada tanggal 12 September 2018 (Recording Date PMHMETD VIII) | | | Setelah Pelaksanaan PMHMETD VIII | | |
|---|--|--------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 79,25 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 | 1.478.864.330 | 147.886.433.000 | 6,30 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 | 3.387.045.763 | 338.704.576.300 | 14,45 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 | 23.455.294.785 | 2.345.529.478.500 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - | 36.544.705.215 | 3.654.470.521.500 | - |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VIII dengan asumsi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melaksanakan HMETD sesuai pernyataan No.B.1234-DIR/SBM/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 akan melaksanakan sebagian dari HMETD yang menjadi hak BRI dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, dengan mengambil bagian sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) per saham dan telah mengalokasikan dana kas senilai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

| | Sebelum PMHMETD | | | Setelah Pelaksanaan PMHMETD | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 | 18.589.384.692 | 1.858.938.469.200 | 88,71 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 | 1.163.643.926 | 116.354.392.600 | 5,55 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 5,74 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 | 20.954.205.181 | 2.095.420.518.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - | 39.045.794.819 | 3.904.579.481.900 | - |

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 September 2018 pukul 16.15 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 September 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus

dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan HMETD = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD = B
 - Harga teoritis Saham setelah PMHMETD = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- = Rp c
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah = Rp a - Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD telah disetujui oleh RUPS Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999, Perseroan hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari jumlah modal disetor Perseroan yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek, saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 177.969.780 (Seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun Perkebunan. Setelah PMHMETD jumlah saham yang diterbitkan dalam Perseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya 23.455.294.785 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham maka tambahan jumlah saham yang tidak akan dicatatkan adalah sebesar 56.583.200 (lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus) saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan demikian total jumlah saham yang tidak dicatatkan adalah sejumlah 234.552.980 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh) saham.

HISTORIS HARGA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK :

| Bulan | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Total Volume Perdagangan |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Juni 2018 | 322 | 310 | 2.087.600 |
| Mei 2018 | 388 | 376 | 2.863.000 |
| April 2018 | 390 | 360 | 10.352.500 |
| Maret 2018 | 436 | 412 | 3,119,000 |
| Februari 2018 | 555 | 565 | 7,147,700 |
| Januari 2018 | 635 | 550 | 179,608,200 |
| Desember 2017 | 535 | 520 | 3,601,900 |
| Nopember 2017 | 540 | 530 | 4,821,600 |
| Oktober 2017 | 545 | 530 | 10,129,400 |
| September 2017 | 645 | 595 | 81,383,900 |
| Agustuss 2017 | 530 | 510 | 16,834,400 |
| Juli 2017 | 615 | 590 | 14,667,600 |
| Juni 2017 | 730 | 730 | 3,763,500 |

*) sumber data situs website Bursa Efek Indonesia

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan pernah 3 (tiga) kali mengalami penghentian perdagangan saham.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD VIII INI, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MESOP YANG TELAH DISETUJUI DALAM RUPS TANGGAL 26 JUNI 2018 DENGAN JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA 350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA) SAHAM

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Sesuai dengan Peraturan No. 30/POJK.04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD diperkirakan berjumlah sekitar 0,131% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa akuntan publik sekitar 0,06%;
- Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,005%;
- Biaya notaris sekitar 0,009%;
- Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,015%;
- Biaya jasa akuntan publik penjatahan saham sekitar 0,003%; dan
- Biaya percetakan dan biaya lain-lain sebesar 0,039%.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Transaksi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD bukanlah merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak afiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-614/BI/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan IX.E.2**") serta Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BI/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan IX.E.1**").

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak afiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E. dan Peraturan No. IX.E.1.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas VII pada tahun 2017 yakni penawaran sejumlah 2.515.555.707 (dua miliar lima ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh) saham dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham. Selanjutnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII tersebut telah digunakan sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

- Melalui surat No.B.45/Dir.05/SKP/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan uraian sebagai berikut:

(Jutaan Rupiah)

| Jenis Penawaran Umum | Tanggal Efektif | Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp) | | | Realisasi Penggunaan Dana | | Sisa Dana Hasil Penawaran Umum |
|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|--------------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| | | Jumlah Hasil Penawaran | Biaya Penawaran Umum | Hasil Bersih | Kredit | Total | |
| Penawaran Umum Terbatas VII | 12 Juni 2017 | 1.006.222 | 1.729 | 1.004.493 | 218.406 | 218.406 | 786.087 |

- Melalui surat No.B.20/Dir.05/SKP/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan uraian sebagai berikut:

(Jutaan Rupiah)

| Jenis Penawaran Umum | Tanggal Efektif | Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp) | | | Realisasi Penggunaan Dana | | Sisa Dana Hasil Penawaran Umum |
|-----------------------------|-----------------|---|----------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | Jumlah Hasil Penawaran | Biaya Penawaran Umum | Hasil Bersih | Kredit | Total | |
| Penawaran Umum Terbatas VII | 12 Juni 2017 | 1.006.222 | 1.729 | 1.004.493 | 1.004.493 | 1.004.493 | 0 / nihil |

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008 dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain.

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp16.157.730 juta yang terdiri dari (A) Liabilitas seperti tertera dalam laporan posisi keuangan Perseroan sebesar Rp14.622.732 juta dan (B) Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp1.534.998 Juta, dengan perincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|--|-----------------------|
| Liabilitas segera | 19.047.599 |
| Simpanan nasabah | |
| - Giro | 1.077.212.912 |
| - Tabungan | - |
| - Deposito berjangka | 11.894.305.168 |
| Simpanan dari bank lain | 1.886.142 |
| Liabilitas akseptasi | 14.415.862 |
| Utang pajak | 65.477.369 |
| Surat Berharga yang Diterbitkan | 498.103.174 |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja | 44.044.619 |
| Liabilitas lain-lain | 116.343.018 |
| Jumlah Liabilitas | 14.622.732.626 |

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

B. LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|--|-----------------------|
| Liabilitas komitmen | 1.527.415.020 |
| Liabilitas kontinjensi | 7.582.743 |
| Jumlah Liabilitas Komitmen Kontinjensi | 1.534.997.763 |
| Jumlah Liabilitas dan Liabilitas Komitmen Kontinjensi | 16.157.730.389 |

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah yaitu dalam bentuk deposito berjangka sebesar 81,34% (Delapan puluh satu koma tiga puluh empat persen) tabungan sebesar 6,10% (enam koma sepuluh persen), giro sebesar 7,37% (Tujuh koma tiga puluh tujuh persen), simpanan dari bank lain sebesar 0,01% (Nol koma nol satu persen), liabilitas akseptasi sebesar 0,10 % (Nol koma sepuluh persen), Surat berharga yang diterbitkan sebesar 3,41% (tiga koma empat puluh satu persen), liabilitas segera sebesar 0,13% (Nol koma tiga belas persen) dan liabilitas Lain-lain sebesar 0,80% (Nol koma delapan puluh persen) dari jumlah liabilitas.

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp19.048 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|-----------------------|-----------|
| Umum dan administrasi | 8.133.347 |
| Personalialia | 7.255.674 |

| Keterangan | Jumlah |
|---------------------------------|-------------------|
| Titipan transfer dan ATM | 2.609.908 |
| Titipan dana pihak ketiga | 4.699 |
| Titipan lain-lain | 1.043.971 |
| Jumlah Liabilitas Segera | 19.047.599 |

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan Nasabah Perseroan tanggal 31 Maret 2018 yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp13.863.415 juta yang terdiri dari simpanan dalam mata uang Rupiah sebesar Rp13.678.091 juta dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp185.324 juta, serta simpanan pihak ketiga dan pihak berelasi sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Jenis Simpanan dan Mata Uang Simpanan

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------------|-----------------------|
| Rupiah | |
| Giro | 1.041.334.564 |
| Tabungan | 891.896.763 |
| Deposito Berjangka | 11.744.859.798 |
| Sub Jumlah | 13.678.091.125 |
| Dolar Amerika Serikat | |
| Giro | 35.878.348 |
| Deposito berjangka | 149.445.370 |
| Sub Jumlah | 185.323.718 |
| Jumlah | 13.863.414.843 |

Giro

Saldo giro pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp1.077.213 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo giro Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp1.041.335 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 1,28% dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp35.878 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 0,19%.

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp891.897 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar 4,45%.

Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp11.894.305 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo deposito berjangka Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp11.744.860 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 7,17% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp149.445 juta dan suku bunga rata-rata Dolar Amerika Serikat per tahun 1,69% dengan rincian sebagai berikut:

Deposito Berjangka berdasarkan Jangka Waktu

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|-------------------------|---------------|
| Rupiah | |
| <i>Deposits on Call</i> | 2.799.446 |
| Deposito : | |
| 1 bulan | 6.325.856.567 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 3 bulan | 3.228.887.328 |
| 6 bulan | 2.107.675.106 |
| 12 bulan | 79.641.351 |
| Sub Jumlah | 11.744.859.798 |
| Dolar Amerika Serikat | |
| Deposito | |
| 1 bulan | 147.404.103 |
| 3 bulan | 2.041.267 |
| Sub Jumlah | 149.445.370 |
| Jumlah | 11.894.305.168 |

Jumlah deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp210.487 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Jumlah saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp1.886 juta. Giro dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 3,46%, deposito berjangka dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 4,83%, *call money* dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 4,28% dan suku bunga rata-rata Dolar Amerika Serikat per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar 1,57% dengan rincian sebagai berikut ini:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------------|------------------|
| Rupiah | |
| Deposito Berjangka | - |
| Giro | 1.886.142 |
| Dolar Amerika Serikat | |
| <i>Call Money</i> | - |
| Jumlah | 1.886.142 |

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp44.045 juta. Rincian dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|---------------------------------------|-------------------|
| Program pemutusan hubungan kerja | 40.750.167 |
| Cadangan cuti besar | 2.947.338 |
| Penghargaan Masa Kerja | 347.144 |
| TOTAL LIABILITAS IMBALAN KERJA | 44.044.619 |

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja program pemutusan hubungan kerja (PHK) Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

| | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tingkat diskonto tahunan | 7,60% | 7,50% |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 7,10% | 7,00% |
| Tingkat kematian | TMI 2011 | TMI 2011 |
| Tingkat cacat jasmaniah | 10,0% of TMI 2011 | 10,0% of TMI 2011 |
| Usia pensiun normal | 56 tahun | 56 tahun |

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja program cuti besar Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

| | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tingkat diskonto tahunan | 5,80% | 6,00% |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 6,30% | 6,50% |
| Tingkat kematian | TMI 2011 | TMI 2011 |
| Tingkat cacat jasmaniah | 10,0% of TMI 2011 | 10,0% of TMI 2011 |

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja program penghargaan masa kerja Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

| | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tingkat diskonto tahunan | 7,00% | 7,00% |
| Tingkat kenaikan gaji di masa depan | 7,50% | 7,50% |
| Tingkat kematian | TMI 2011 | TMI 2011 |
| Tingkat cacat jasmaniah | 10,0% of TMI 2011 | 10,0% of TMI 2011 |

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp116.343 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|--|--------------------|
| Bunga yang masih harus dibayar | 60.679.865 |
| Cadangan liabilitas litigasi dan hasil pemeriksaan pajak | 2.142.727 |
| Bonus dan insentif | 44.654.434 |
| Pendapatan diterima dimuka | 576.150 |
| Setoran jaminan | 52.250 |
| Lain-lain | 8.237.592 |
| Jumlah | 116.343.018 |

LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan memiliki liabilitas komitmen sebesar Rp1.527.415 juta dan liabilitas kontinjensi sebesar Rp7.583 juta. Liabilitas komitmen merupakan fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan dan *letter of credits* yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, sedangkan liabilitas kontinjensi merupakan garansi yang diterbitkan.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang.

IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Ikhtisar Data Keuangan Penting diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008, dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aset | | |
| Kas | 14.237.764 | 12.105.697 |
| Giro pada Bank Indonesia | 936.326.950 | 759.829.715 |
| Giro pada Bank lain | 86.701.100 | 54.842.059 |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | 839.955.295 | 1.439.860.041 |
| Efek-efek | 1.383.822.991 | 1.534.289.169 |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 2.001.513.639 | 1.514.733.748 |
| Kredit – neto | 12.151.392.029 | 10.620.505.121 |
| Tagihan akseptasi | 14.415.862 | 55.591.193 |
| Penyertaan saham | 297.658 | 297.658 |
| Aset tetap – neto | 264.133.909 | 264.127.377 |
| Aset pajak tangguhan | 29.969.034 | 34.099.887 |
| Agunan yang diambil alih – neto | 4.153.012 | 4.155.887 |
| Biaya dibayar dimuka dan aset lain-lain | 60.101.323 | 30.809.455 |
| Jumlah Aset | 17.787.020.566 | 16.325.247.007 |
| | | |
| Liabilitas | | |
| Liabilitas segera | 19.047.599 | 12.165.613 |
| Simpanan nasabah | 13.863.414.843 | 12.421.932.502 |
| Simpanan dari bank lain | 1.886.142 | 31.045.711 |
| Liabilitas akseptasi | 14.415.862 | 55.591.193 |
| Utang pajak | 65.477.369 | 58.583.362 |
| Surat berharga yang diterbitkan | 498.103.174 | 497.964.691 |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja | 44.044.619 | 42.379.911 |
| Liabilitas lain-lain | 116.343.018 | 94.299.147 |
| Jumlah Liabilitas | 14.622.732.626 | 13.213.962.130 |
| | | |
| Ekuitas | | |
| Modal saham ditempatkan dan disetor penuh | 1.791.293.698 | 1.791.253.796 |
| Tambahan modal disetor | 945.215.409 | 945.203.438 |
| (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan | (1.458.021) | 13.106.428 |
| Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja – setelah pajak tangguhan | 1.194.377 | 1.370.315 |
| | | |

| Keterangan | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 11.019.363 | 11.019.363 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 417.023.114 | 349.331.537 |
| Jumlah Ekuitas | 3.164.287.940 | 3.111.284.877 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 17.787.020.566 | 16.325.247.007 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret | | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember |
|--|---|-------------------------|--|
| | 2018 | 2017 (tidak diaudit) | 2017 |
| Pendapatan bunga | 378.169.798 | 279.092.507 | 1.252.069.204 |
| Beban bunga | (225.153.597) | (171.054.933) | (748.946.627) |
| Pendapatan bunga – neto | 153.016.201 | 108.037.574 | 503.122.577 |
| Pendapatan operasional lainnya | 6.320.312 | 11.856.545 | 55.105.854 |
| Pembalikan (penyisihan) kerugian penurunan nilai | 6.052.458 | (21.133.953) | (141.138.035) |
| Beban operasional lainnya | (73.875.018) | (54.578.690) | (240.385.053) |
| Laba operasional | 91.513.953 | 44.181.476 | 176.705.343 |
| (Beban) pendapatan non operasional – neto | (430.083) | 3.091.850 | 16.927.453 |
| Laba sebelum pajak | 91.083.870 | 47.273.326 | 193.632.796 |
| Beban pajak | (23.392.293) | (11.022.040) | (53.137.261) |
| | | | |
| Laba Periode/Tahun Berjalan | 67.691.577 | 36.251.286 | 140.495.535 |
| Pendapatan Komprehensif Lainnya | | | |
| Akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja | (234.584) | (769.024) | 2.269.302 |
| Pajak penghasilan terkait akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 58.646 | (22.456) | (567.326) |
| Akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi | | | |
| (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual | (19.419.265) | 31.641.541 | 51.531.204 |
| Pajak penghasilan terkait akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 4.854.816 | (7.910.385) | (12.882.801) |
| (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan Setelah Pajak | (14.740.387) | 22.939.676 | 40.350.379 |
| Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | 52.951.190 | 59.190.962 | 180.845.914 |
| Laba Periode/Tahun Berjalan per Saham | | | |
| Dasar (dalam Rupiah penuh) | 3,78 | 2,37 | 8,49 |
| Dilusian (dalam Rupiah penuh) | 3,70 | 2,29 | 8,28 |

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |
|---|---|-------------------------|--|
| | 2018 | 2017 (tidak diaudit) | 2017 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan bunga, provisi dan komisi | 370.329.029 | 266.819.089 | 1.260.121.075 |
| Pembayaran bunga, provisi dan komisi | (214.432.347) | (169.730.620) | (731.405.203) |
| Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan | 334.801 | 374.000 | 7.672.262 |
| Pendapatan operasional lainnya | 1.375.422 | 690.506 | 24.054.792 |
| Pembayaran pajak penghasilan badan | (13.373.602) | (5.879.878) | (33.347.104) |
| Beban operasional lainnya | (54.174.144) | (35.707.739) | (211.583.447) |
| (Beban) Pendapatan non operasional – neto | (842.889) | (1.231) | 24.680.769 |
| Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi | 89.216.270 | 56.564.127 | 340.193.144 |
| Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: | | | |
| (Kenaikan) penurunan dalam aset operasi: | | | |
| Kredit yang diberikan | (1.524.825.095) | (412.634.585) | (2.822.905.659) |
| Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | (42.240.000) | (550.781.189) | (11.835.490) |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | (488.410.990) | - | (1.509.819.000) |
| Aset lain-lain | (6.585.417) | (3.373.415) | (2.421.659) |
| Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi: | | | |
| Liabilitas segera | 6.881.986 | 4.386.649 | 1.341.961 |
| Giro | (91.152.340) | 136.888.035 | 488.518.555 |
| Tabungan | 230.350.505 | 4.047.046 | 200.422.968 |
| Deposito Berjangka | 1.302.284.176 | 584.659.930 | 2.509.212.476 |
| Simpanan dari bank lain | (29.159.569) | (437.518) | 27.331.509 |
| Liabilitas lain-lain | 69.555 | 1.520.506) | (2.693.925) |
| Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi | (553.570.919) | (179.160.414) | (782.655.120) |
| | | | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Penurunan (kenaikan) efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo | 167.576.164 | (8.489.196) | (692.694.653) |
| Perolehan aset tetap | (3.473.521) | (1.168.851) | (34.889.153) |
| Perolehan agunan yang diambil alih | - | - | (3.973.512) |
| Penerimaan dividen | - | 21.439 | 40.187 |
| Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | 164.102.643 | (9.636.608) | (731.517.131) |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Penerimaan dari penerbitan saham | 51.873 | - | 1.015.487.439 |
| Biaya emisi saham | - | - | (1.729.419) |
| Pembagian laba untuk dividen | - | - | (19.570.597) |
| Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan | - | - | 497.706.605 |
| Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | 51.873 | - | 1.491.894.028 |
| PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS | (389.416.403) | (188.797.022) | (22.278.223) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN | 2.266.637.512 | 2.288.915.735 | 2.288.915.735 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN | 1.877.221.109 | 2.100.118.713 | 2.266.637.512 |
| Kas dan Setara Kas akhir periode/tahun terdiri dari: | | | |
| Kas | 14.237.764 | 20.178.225 | 12.105.697 |
| Giro pada Bank Indonesia | 936.326.950 | 661.656.929 | 759.829.715 |
| Giro pada bank lain | 86.701.100 | 104.838.231 | 54.842.059 |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan | 839.955.295 | 1.313.445.328 | 1.439.860.041 |
| Total Kas dan Setara Kas | 1.877.221.109 | 2.100.118.713 | 2.266.637.512 |

Rasio-rasio Keuangan

| Keterangan | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Permodalan | | |
| Rasio CAR (Tier 1) | 24,83% | 28,61% |
| Rasio CAR (Tier 2) | 0,70% | 0,97% |
| Rasio CAR (Total) | 25,53% | 29,58% |
| Kualitas aset | | |
| Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif | 1,56% | 2,01% |
| <i>Non Performing Loan</i> – bruto | 2,24% | 2,59% |
| <i>Non Performing Loan</i> – neto | 1,31% | 1,31% |
| CKPN terhadap aset produktif | 2,17% | 2,55% |
| Rentabilitas | | |
| <i>Return on Asset</i> (ROA) | 2,13% | 1,45% |
| <i>Return on Equity</i> (ROE) | 8,71% | 5,64% |
| <i>Net Interest Margin</i> (NIM) | 3,47% | 3,76% |
| Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 76,57% | 86,48% |
| Pendapatan Bunga Neto terhadap Pendapatan Bunga | 40,46% | 40,18% |

| Keterangan | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| Likuiditas | | |
| <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) | 90,17% | 88,33% |
| Kepatuhan | | |
| a. Persentase Pelanggaran BMPK | | |
| 1) Pihak Berelasi | 0,00% | 0,00% |
| 2) Pihak Ketiga | 0,00% | 0,00% |
| b. Persentase Pelampauan BMPK | | |
| 1) Pihak Berelasi | 0,00% | 0,00% |
| 2) Pihak Ketiga | 0,00% | 0,00% |
| Giro Wajib Minimum | | |
| a. GWM Utama Rupiah | 6,64% | 6,72% |
| b. GWM Sekunder Rupiah | 7,76% | 12,01% |
| c. GWM Valuta Asing | 8,14% | 13,64% |
| Posisi Devisa Neto (PDN) | 0,68% | 1,08% |
| Liabilitas terhadap total aset | 82,21% | 80,94% |
| Liabilitas terhadap ekuitas | 462,18% | 424,71% |

V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 1 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

Didirikan oleh Haji Oto Adiwinata dan Soedjai Kartasasmita pada tanggal 27 September 1989 dengan nama PT. Bank Agroniaga, Perseroan mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis Indonesia. Sebagai Bank yang berfokus pada pembiayaan agrobisnis, sejak berdiri hingga saat ini, portofolio kredit Perseroan sebagian besar (antara 50% - 60%) disalurkan di sektor agribisnis, baik *on farm* maupun *off farm*.

Perseroan yang didirikan dengan Akta Notaris Rd. Soekarsono, S.H., di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989 memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan pada tanggal 11 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990.

Pada tahun 2003, Perseroan menjadi perusahaan publik berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tertanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya berubah menjadi PT Bank Agroniaga, Tbk dan pada tahun yang sama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya, sedangkan pada tahun 2007, saham Perseroan dengan kode AGRO sudah mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2006, Perseroan meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tertanggal 8 Mei 2006.

Pada tanggal 3 Maret 2011, dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga, Tbk antara Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") dengan Dana Pensiun Perkebunan ("Dapenbun") di Jakarta, Bank BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT. Bank Agroniaga, Tbk.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam sinergi bersama Bank BRI, pada tahun 2012 seiring dengan ulang tahun ke-23, Perseroan berganti nama menjadi BRI Agro ("BRI Agro", atau selanjutnya akan disebut sebagai "Perseroan"). Pada usia ke-28 tahun ini, Perseroan semakin mantap melangkah bersama Bank BRI untuk melayani dengan sepenuh hati. Untuk menunjukkan keseriusannya, Perseroan terus melakukan sinergi dengan Bank BRI, tercermin dari seluruh nasabah Perseroan dapat menggunakan kartu ATM Perseroan gratis diseluruh jaringan ATM Bank BRI yang tersebar diseluruh pelosok negeri.

Tanpa melupakan fokus awal Perseroan, sektor agribisnis tetap menjadi pilar utama bisnis Perseroan, tetapi Perseroan juga terus berbenah untuk menyediakan layanan yang lengkap dan prima bagi nasabah. Tabungan Perseroan, Deposito, dan Giro serta program berhadiah hadir

untuk menjawab kebutuhan simpanan dan investasi nasabah, sedangkan fasilitas kredit Perseroan dapat di manfaatkan untuk mengembangkan usaha nasabah.

Untuk mendukung itu semua, Perseroan didukung oleh Jaringan kantor dan layanan yang terus berkembang dan berbenah. Saat ini, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 17 Kantor Cabang, 20 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas di kota-kota di Indonesia.

1.1 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang;
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - a) Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - b) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - d) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - e) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - f) Obligasi;
 - g) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - h) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 5) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 6) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 7) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 8) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - 9) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk Surat Berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - 10) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
 - 12) Melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang;
 - 13) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau Perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, Asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 14) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 15) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan

- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
- 16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 17) Melakukan jasa keuangan *commercial banking* dan *investment banking* lainnya.

1.2 Kondisi Perbankan Indonesia

Sampai dengan bulan Maret 2018, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 8,7% (YoY), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan pada bulan Maret 2017 sebesar 9,2% (YoY). Namun demikian sampai dengan bulan Desember 2017, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,3% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan sepanjang tahun 2016 sebesar 7,8% (YoY). Sedangkan pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan sepanjang tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Pertumbuhan aset bank umum sampai dengan bulan Maret 2018 tercatat sebesar 8,7% (YoY), menurun dibandingkan pertumbuhan aset pada bulan Maret 2017 sebesar 10,7% (YoY). Penurunan aset juga terjadi untuk posisi Desember 2017, dimana perkembangan aset sebesar 9,7% (YoY) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan sepanjang tahun 2016 yang mencapai 10,4% (YoY). Sementara itu, pada periode yang sama, DPK pada bulan Maret 2018 bertumbuh sebesar 7,6% (YoY), menurun dibandingkan pertumbuhan DPK pada bulan Maret 2017 yang hanya sebesar 10% (YoY). Begitupula apabila dibandingkan antara pertumbuhan bulan Desember 2017 dengan Desember 2016, dimana pertumbuhan DPK per Desember 2017 mencapai 9,4% (YoY), melambat dibandingkan pertumbuhan DPK per Desember 2016 sebesar 9,6% (YoY). (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2018).

Meski tumbuh melambat, secara umum stabilitas industri perbankan Indonesia tetap kuat, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Pada bulan Maret 2018, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) masih kuat pada level 23.64%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, meskipun kualitas kredit mengalami penurunan, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) bank umum per Maret 2018 sebesar 2,6%, masih terjaga di bawah level 3,0%. (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2018).

Pada tahun 2018, kualitas aset masih akan menjadi tantangan utama bagi perbankan, khususnya di sektor usaha yang berkaitan dengan komoditas. Menurut data Statistik Perbankan Indonesia (2018), laba bersih bank umum per Desember 2017 bertumbuh cukup tinggi, yakni sebesar 23% (YoY), Hal ini didukung oleh kinerja sektor perbankan nasional yang membaik sejalan dengan penguatan kondisi ekonomi dalam negeri. Perbaikan kinerja perbankan juga didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia, seperti penurunan tingkat giro wajib minimum sehingga mendorong peningkatan likuiditas sistem perbankan. Kebijakan suku bunga *single digit* dari pemerintah juga mendorong peningkatan penyaluran kredit khususnya kepada sektor produktif yang memiliki *multiplier effect* dan membantu menekan risiko kredit bermasalah. Mengutip pernyataan Otoritas Jasa Keuangan, Kredit perbankan pada tahun 2018 diprediksi tumbuh antara 10-12%, demikian pula dengan DPK tumbuh antara 10-12%.

Dukungan Pemerintah di Sektor UMKM

Pemerintah maupun BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya mengantisipasi terjadinya perlambatan Perekonomian di Eropa dan Amerika terhadap perekonomian nasional. Sebagian besar dari kebijakan tersebut ditujukan untuk tetap mendorong laju pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk kelonggaran dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan di sektor tersebut. Perseroan, sesuai dengan latar belakang dan misi yang diembannya dalam pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merespon kebijakan ini secara positif serta terus berupaya mengembangkan pembiayaan pada segmen UKM. Perseroan juga terus mengembangkan

aliansi strategis dengan berbagai institusi Pemerintah maupun BUMN, yang juga memiliki kepedulian terhadap perkembangan UMKM.

Marjin Pendapatan Bunga Bersih

Sebagai bank yang menyediakan jasa keuangan perantara dan jasa keuangan lainnya, hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi marjin pendapatan bunga - bersih, terutama pinjaman dan suku bunga simpanan di Indonesia. Perubahan suku bunga kredit dan simpanan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan karena inti usaha perbankan dari intermediasi keuangan berdasarkan pada pencapaian marjin yang optimal. Perolehan marjin tersebut didapat dari biaya dana jangka pendek dengan *yields* yang dapat dicapai dengan penyaluran kredit jangka panjang, terutama pinjaman dengan tetap dilakukan secara efektif dan dengan pengelolaan risiko yang terukur.

Perubahan Perilaku Konsumen

Perubahan perilaku konsumen akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha perseroan. Hal-hal yang akan berdampak kepada perubahan perilaku konsumen biasanya disebabkan oleh perubahan pada faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan perekonomian dan harga dolar serta faktor teknologi. Sebagai contoh adalah poin-poin berikut:

1. Dengan adanya view kenaikan suku bunga the Fed kedepan, maka masih terdapat ruang kenaikan terhadap suku bunga perbankan.
2. Turunnya harga komoditas dan lemahnya permintaan dari luar negeri menyebabkan penurunan ekspor Indonesia yang ikut mempengaruhi kualitas pinjaman dan daya beli masyarakat.
3. Perkembangan teknologi digital yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen dalam bertransaksi di perbankan.

Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada kompetitor

Perseroan saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam seluruh kegiatan bisnisnya dari bank-bank lokal dan juga dari bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Selain menghadapi persaingan dengan bank-bank lain, Perseroan juga menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna usaha dan anjak piutang, dan perusahaan modal ventura, perusahaan '*Fintech*' serta perusahaan-perusahaan lainnya yang memberikan pendanaan bagi pengembangan industri, ekspor/impor dan jasa.

Pendanaan/Pengelolaan Likuiditas

Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang di review secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun pengaturan oleh Bank Indonesia dan OJK. Penerapan pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada *primary reserve* dan aset likuid dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan hati-hati sejalan dengan kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sehingga kondisi likuiditas Perseroan secara keseluruhan dapat tetap terjaga dan aman.

Pengembangan Produk dan Layanan Perseroan.

Selama tahun 2017 sampai Maret 2018, pengembangan akses layanan baik melalui jaringan konvensional dan jaringan elektronik dilakukan sebagai berikut :

Produk-produk *electronic channel*

- a. Meningkatkan akses layanan *e-channel* bersinergi dengan dengan perusahaan induk dalam pemanfaatan mesin ATM guna memberikan kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah
- b. *Cash Management Sistem (CMS)*
Merupakan layanan perbankan BRI Agro berbasis internet yang dapat diakses dgn menggunakan *browser* dimana Nasabah Perusahaan dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa harus datang ke unit kerja operasional BRI Agro
- c. *Mobile Banking BRI Agro*
Merupakan *electronic channel* BRI Agro berbasis menu bagi nasabah perorangan yang dapat diakses melalui *smartphone* dengan menggunakan *messaging system* atau *short message system (SMS)* sebagai media transaksinya.
- d. Internet Banking
Merupakan salah satu layanan perbankan berbasis internet yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Melalui layanan ini nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja melalui HP dan/atau PC/Laptop.

1.3 Langkah-langkah yang Ditempuh Perseroan dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 berada pada kisaran 5,1-5,5%. Proyeksi ini didukung oleh pola konsumsi domestik dan investasi yang tetap kuat. Selain itu pertumbuhan kelas menengah Indonesia dan peningkatan komposisi penduduk pada usia produktif memberikan optimisme akan arah perkembangan dan prospek bisnis perbankan Nasional. Memperhatikan perkembangan tersebut, Perseroan akan mengupayakan pengelolaan jasa keuangan dengan lebih baik dan kuat terutama dalam permodalan. Selain fokus pada bidang usaha agrobisnis, Perseroan juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dari sisi usaha penghimpunan dana, Perseroan menetapkan arah dengan upaya mengurangi risiko konsentrasi yang saat ini masih tergantung pada beberapa deposit besar dengan cara mengembangkan sumber dana ritel yang antara lain melalui penambahan jaringan kantor pelayanan termasuk jaringan layanan berbasis teknologi (*e-channel*) di sentra-sentra bisnis.

Dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan juga memperhatikan kondisi dan potensi daerah pengembangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
2. Persaingan ketat di sektor perbankan dari sisi *size* (modal dan jaringan) serta *pricing* (produk penghimpunan dana dan penyaluran kredit).
3. Munculnya alternatif investasi maupun pembiayaan yang lebih menarik seperti asuransi *unit linked*, reksadana, ORI dan *Fintech*.
4. Bank-bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya margin dan *opportunity*.

1.4 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dasar penyusunan laporan keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua

Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam ribuan Rupiah.

2. Kinerja Keuangan

2.1 Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Maret 2017, dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

| Uraian | Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 |
|---|--|-------------------------|---|
| | 2018 | 2017 (tidak diaudit) | |
| Pendapatan Bunga | 378.169.798 | 279.092.507 | 1.252.069.204 |
| Beban Bunga | (225.153.597) | (171.054.933) | (748.946.627) |
| Pendapatan Bunga - Neto | 153.016.201 | 108.037.574 | 503.122.577 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 6.320.312 | 11.856.545 | 55.105.854 |
| Pembalikan (Penyisihan) Kerugian Penurunan Nilai | 6.052.458 | (21.133.953) | (141.138.035) |
| Beban Operasional Lainnya (Beban) Pendapatan Non Operasional – Neto | (73.875.018) | (54.578.690) | (240.385.053) |
| Laba Sebelum Pajak | 91.083.870 | 47.273.326 | 193.632.796 |
| Laba Periode/Tahun Berjalan | 67.691.577 | 36.251.286 | 140.495.535 |
| Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan | 52.951.190 | 59.190.962 | 180.845.914 |



2.1.1 Pendapatan Bunga

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan pendapatan bunga sebesar Rp378.170 juta, meningkat sebesar Rp99.077 juta atau 36% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp279.093 juta. Pertumbuhan bunga tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit sebesar Rp72.192 juta atau sebesar 28,97% dibandingkan dengan 31 Maret 2017. Pendapatan lain sebagai pendukung dalam pencapaian pendapatan bunga adalah pendapatan dari penempatan surat berharga tercatat sebesar Rp6.237 juta atau naik 44,25% dibanding 31 Maret 2017 serta penempatan dari efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tercatat sebesar Rp24.498 juta atau naik 100% dibandingkan periode yang sama di tahun 2017.

2.1.2 Beban Bunga

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan beban bunga sebesar Rp225.154 juta, meningkat sebesar Rp54.099 juta atau 32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp171.055 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh ketatnya persaingan dalam industri perbankan dan inflasi yang tinggi mengakibatkan kenaikan dalam beban bunga. Penyebab lainnya yaitu disaat yang sama dana pihak ketiga Perseroan tumbuh dengan baik mencapai 39,34%.

2.1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp6.320 juta, menurun sebesar Rp5.537 juta atau -47% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp11.857 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan yang belum direalisasikan dari perubahan efek-efek – neto turun sebesar 100% menjadi RpNihil. Namun terdapat pertumbuhan pendapatan operasional lainnya seperti provisi dan komisi sebesar 30,69% menjadi Rp4.220 juta.

Komponen penting dalam memperoleh hasil usaha Perseroan berasal dari Pendapatan Bunga Kredit dan Beban Bunga Simpanan. Selain itu Perseroan memperoleh pendapatan dari keuntungan penjualan efek-efek, Penerimaan Kembali Aset Keuangan Yang Telah Dihapus Buku, Pendapatan Jasa Administrasi serta beban berasal dari Beban Gaji dan Tunjangan dan Beban Administrasi dan Umum.

2.1.4 Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan pembalikan (penyisihan) kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.052 juta, menurun sebesar Rp27.186 juta atau -128,64% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar -Rp21.134 juta. Pertumbuhan tersebut seiring dengan ekspansi kredit yang diberikan sebesar 14% (dibandingkan antara 31 Maret 2018 dengan 31 Desember 2017) dan terdapat pembalikan kerugian penurunan nilai perbaikan kualitas dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

2.1.5 Beban Operasional Lainnya

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan beban operasional lainnya sebesar Rp73.875 juta, meningkat sebesar Rp19.296 juta atau 35,36% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp54.579 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada gaji dan tunjangan sebesar 38,78 % menjadi Rp51.670 juta.

2.1.6 Pendapatan Non Operasional

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan pendapatan (beban) non operasional – neto sebesar -Rp430 juta, menurun sebesar -Rp3.522 juta atau -114% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp3.092 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pada periode yang sama di tahun 2017 terdapat pendapatan non operasional lain karena pembalikan atas cadangan perkara.

2.1.7 Laba sebelum beban pajak

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan laba sebelum beban pajak sebesar Rp91.084 juta, meningkat sebesar Rp43.811 juta atau 92,67% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp47.273 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp44.979 juta atau 41,63%.

2.1.8 Beban pajak

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan beban pajak sebesar Rp23.392 juta, meningkat sebesar Rp12.370 juta atau 112% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp11.022 juta. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh seiring kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp43.811 juta atau 92,67%.

2.1.9 Laba Periode Berjalan

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp67.691 juta, meningkat sebesar Rp31.440 juta atau 86,73% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp36.251 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya pendapatan bunga sebesar Rp99.077 juta dari Rp279.093 juta pada posisi Maret 2017 menjadi Rp378.170 juta pada posisi Maret 2018 atau meningkat sebesar 35,50% (yoy). Peningkatan pendapatan bunga secara yoy didukung oleh adanya strategi pengembangan bisnis perseroan pada sektor agribisnis dengan menyalurkan pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada plasma (petani) yang merupakan mitra usaha (trickle down business) dari perusahaan perkebunan yang berperan sebagai perusahaan inti dan avalist yang sebelumnya telah menjadi nasabah BRI Agro. Selain dari pendapatan bunga, Perseroan melakukan efisiensi yang tercermin dari rasio BOPO yang mengalami penurunan dari 84,92% pada periode Maret 2017 menjadi 76,57% pada periode Maret 2018.

2.1.10 Total penghasilan komprehensif periode berjalan

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan membukukan total penghasilan komprehensif periode berjalan sebesar Rp52.951 juta, menurun sebesar -Rp6.240 juta atau -10,54% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp59.191 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan kerugian komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar -Rp37.680 juta atau -164,26%.

2.1.11 Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional pada periode 31 Maret 2018 tercatat sebesar 25,53%. Pada periode 31 Maret 2018, total laba periode berjalan sebesar Rp67.692 juta, meningkat sebesar 86,73% dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp36.251 juta. Peningkatan total laba dimaksud membuat CAR Perseroan terus menguat dari posisi 29,58% pada akhir tahun 2017 menjadi 25,53% di akhir periode 31 Maret 2018.

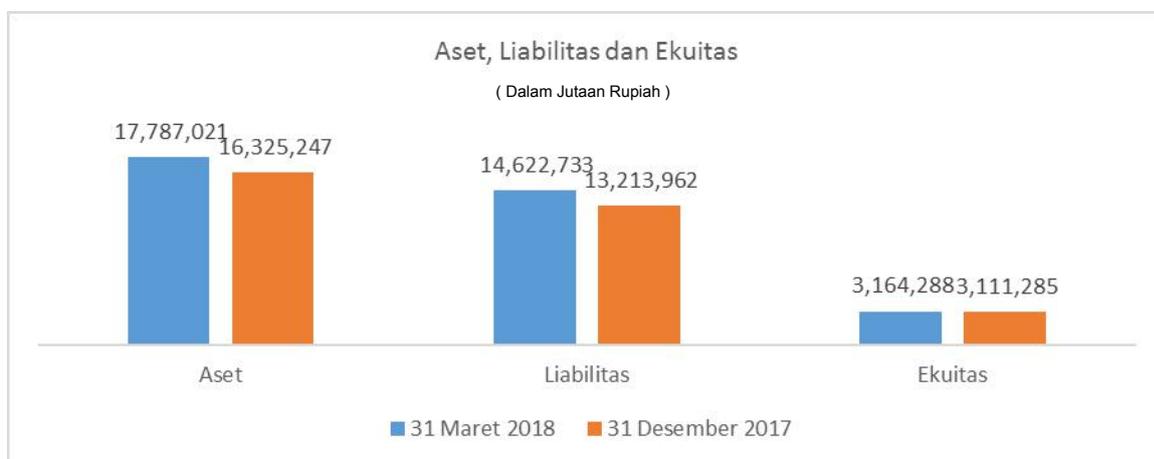
2.1.12 Imbal Hasil

Rasio imbal hasil rata-rata aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 serta rasio imbal hasil atas ekuitas (ROE) yang merupakan cerminan imbal hasil kepada pemegang saham yang masing-masing ROA adalah sebesar 2,13% dan 1,45% dan ROE 8,71%, dan 5,64%.

2.1.13 Belanja Modal

Sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa bangunan, kendaraan, dan perlengkapan kantor dengan jumlah belanja sebesar Rp3.473 juta dan akhir tahun 2017 berupa tanah dan bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp35.308 juta.

2.2 Analisis Laporan Posisi Keuangan



2.2 Aset

Komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

| Uraian | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kas | 14.237.764 | 12.105.697 |
| Giro pada Bank Indonesia | 936.326.950 | 759.829.715 |
| Giro pada bank lain | 86.701.100 | 54.842.059 |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | 839.955.295 | 1.439.860.041 |
| Efek-efek | 1.383.822.991 | 1.534.289.169 |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 2.001.513.639 | 1.514.733.748 |
| Kredit yang diberikan – neto | 12.151.392.029 | 10.620.505.121 |
| Tagihan akseptasi | 14.415.862 | 55.591.193 |
| Penyertaan saham | 297.658 | 297.658 |
| Aset tetap – neto | 264.133.909 | 264.127.377 |
| Aset pajak tangguhan | 29.969.034 | 34.099.887 |
| Agunan yang diambil alih – neto | 4.153.012 | 4.155.887 |
| Biaya dibayar dimuka dan aset lain-lain | 60.101.323 | 30.809.455 |
| Total Aset | 17.787.020.566 | 16.325.247.007 |

2.2.1.1 Total Aset

Per 31 Maret 2018, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.461.774 juta dari Rp16.325.247 juta pada periode Desember 2017 menjadi sebesar Rp17.787.021 juta pada periode Maret 2018 atau meningkat sebesar 8.95% (ytm). Peningkatan aset tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp1.524.825 juta dari Rp 10.981.623 juta pada posisi 31 Desember 2017 menjadi Rp12.506.448 juta pada posisi 31 Maret 2018 atau meningkat sebesar 13.89% (ytm). Peningkatan total kredit perseroan didukung oleh adanya strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis ritel dan korporasi dengan cara mendapatkan *trickle down* dari bisnis menengah untuk mengembangkan bisnis ritel, melakukan pengembangan kredit pada sektor agribisnis dengan cara melakukan pembiayaan kepada komoditi strategis (kelapa sawit, karet,dll), pengembangan kredit sindikasi dengan bank lain dan kerjasama pengembangan bisnis dengan BRI *incorporated* (Grup BRI).

2.2.1.2 Kas

Per 31 Maret 2018, kas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp2.132 juta atau setara dengan 17,61% menjadi sebesar Rp14.238 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.106 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan terdapat *dropping* dana masuk atas nasabah-nasabah besar.

2.2.1.3 Giro pada Bank Indonesia

Per 31 Maret 2018, Giro pada Bank Indonesia Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp176.497 juta atau setara dengan 23,23% menjadi sebesar Rp936.327 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp759.830 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan dana pihak ketiga sehingga Perseroan menyesuaikan Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia.

2.2.1.4 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per 31 Maret 2018, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan mengalami penurunan –Rp599.905 juta atau setara dengan -41,66% menjadi sebesar Rp839.955 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.439.860 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh strategi Perseroan melakukan penempatan kelebihan dana yang masuk dengan penambah portofolio penempatan.

2.2.1.5 Efek-efek

Per 31 Maret 2018, efek-efek Perseroan mengalami penurunan –Rp150.466 juta atau setara dengan -9,81% menjadi sebesar Rp1.383.823 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.534.289 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan *mark to market* instrumen surat berharga.

2.2.1.6 Kredit yang diberikan

Per 31 Maret 2018, kredit yang diberikan Perseroan mengalami peningkatan Rp1.530.887 juta atau setara dengan 14,41% menjadi sebesar Rp12.151.392 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.620.505 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya pencairan kredit yang diberikan.

2.2.1.7 Aset tetap

Per 31 Maret 2018, aset tetap Perseroan mengalami peningkatan Rp7 juta atau setara dengan 0,002% menjadi sebesar Rp264.134 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp264.127 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya pembelian aset di tahun 2018 untuk mendukung kegiatan operasional bank.

2.2.2 Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Uraian | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|----------------|------------------|
| LIABILITAS | | |
| Liabilitas segera | 19.047.599 | 12.165.613 |
| Total Simpanan nasabah | 13.863.414.843 | 12.421.932.502 |
| Simpanan dari bank lain | 1.886.142 | 31.045.711 |
| Liabilitas akseptasi | 14.415.862 | 55.591.193 |
| Utang pajak | 65.477.369 | 58.583.362 |
| Surat berharga yang diterbitkan | 498.103.174 | 497.964.691 |
| Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja | 44.044.619 | 42.379.911 |
| Liabilitas lain-lain | 116.343.018 | 94.299.147 |
| TOTAL LIABILITAS | 14.622.732.626 | 13.213.962.130 |

2.2.2.1 Total liabilitas

Per 31 Maret 2018, total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.408.770 juta dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.213.962 juta menjadi sebesar Rp14.622.732 juta atau setara dengan 10,66% (ytm). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan simpanan nasabah dari produk tabungan sebesar Rp230.351 juta dari Rp661.546 juta pada posisi 31 Desember 2017 menjadi Rp891.897 juta pada posisi 31 Maret 2018 atau meningkat sebesar 34,82% (ytm). Selain produk tabungan, instrumen liabilitas lainnya yang mengalami peningkatan adalah simpanan berjangka nasabah (deposito) yang meningkat sebesar Rp1.302.284 juta dari Rp10.592.021 juta pada posisi Desember 2017 menjadi Rp11.894.305 juta pada posisi Maret 2018 atau meningkat sebesar 12,29%. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi perseroan yaitu memperbaiki dan meningkatkan pendanaan BRI Agro dengan berbasis simpanan ritel (*mass banking*) sebagai *buffer* Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rangka meningkatkan *competitive position* serta *market share* pertumbuhan DPK secara

optimal, peningkatan Dana Pihak Ketiga merupakan hasil dari pengembangan dan strategi bisnis yang dilakukan oleh perseroan dengan cara pengembangan produk simpanan, produk *e-banking* (*mobile banking* dan *internet banking*) dan pemasaran produk yang fokus pada peningkatan dana ritel serta korporasi.

2.2.2.2 Liabilitas segera

Per 31 Maret 2018, liabilitas segera Perseroan mengalami peningkatan Rp6.882 juta atau setara dengan 56,57% menjadi sebesar Rp19.048 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.166 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan pencadangan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018.

2.2.2.3 Simpanan nasabah

Per 31 Maret 2018, simpanan nasabah Perseroan mengalami peningkatan Rp1.441.482 juta atau setara dengan 11,60% menjadi sebesar Rp13.863.415 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.421.932 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan Tabungan sebesar Rp230.350 juta atau 34,82% dan kenaikan Deposito Berjangka sebesar Rp1.302.284 juta atau 12,29%.

2.2.2.4 Liabilitas akseptasi

Per 31 Maret 2018, liabilitas akseptasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp41.175 juta atau setara dengan 74,07% menjadi sebesar Rp14.416 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp55.591 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pemberian jaminan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional (LC) atau dalam negeri (SKBDN) dengan menggunakan sistem pembayaran berjangka menggunakan akseptasi kepada nasabah.

2.2.2.5 Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Per 31 Maret 2018, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perseroan mengalami peningkatan Rp1.665 juta atau setara dengan 3,93% menjadi sebesar Rp44.045 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp42.380 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan jumlah karyawan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2018.

2.2.2.6 Liabilitas lain-lain

Per 31 Maret 2018, liabilitas lain-lain Perseroan mengalami peningkatan Rp22.044 juta atau setara dengan 23,38% menjadi sebesar Rp116.343 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp94.299 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan akrual beban bunga dana simpanan yang dikarenakan adanya kenaikan penempatan *volume* simpanan Deposito dan Tabungan, kenaikan cadangan bonus dan insentif yang dikarenakan penambahan jumlah karyawan dan pertumbuhan laba, dan akrual obligasi yang diterbitkan.

Besaran pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban sebagai berikut:

| | 31 Maret 3018 | 31 Maret 2017 | 31 Desember 2017 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| NIM | 3,47% | 3,63% | 3,76% |
| Giro : | | | |
| Rupiah | 1,28% | 0,63% | 0,90% |
| Dolar AS | 0,19% | 0,24% | 1,30% |
| Deposito : | | | |
| Rupiah | 7,17% | 8,07% | 7,76% |
| Dolar AS | 1,69% | 1,75% | 1,72% |
| Tabungan : | | | |
| Rupiah | 4,45% | 4,89% | 4,46% |

2.2.3 Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Uraian | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| EKUITAS | | |
| Modal saham ditempatkan dan disetor penuh | 1.791.293.698 | 1.791.253.796 |
| Tambahan modal disetor | 945.215.409 | 945.203.438 |
| (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan | (1.458.021) | 13.106.428 |
| Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja – setelah pajak tangguhan | 1.194.377 | 1.370.315 |
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya: | | |
| Cadangan khusus | 116.559 | 116.559 |
| Cadangan umum | 10.902.804 | 10.902.804 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 417.023.114 | 349.331.537 |
| TOTAL EKUITAS | 3.164.287.940 | 3.111.284.877 |

Per 31 Maret 2018, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp3.164.288 juta atau meningkat sebesar Rp53.003 juta atau setara dengan 1,70% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.311.285 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal dari waran dan laba periode berjalan namun terdapat penurunan dari laba (rugi) yang belum direalisasikan atas perubahan nilai wajar surat berharga.

2.3 Likuiditas

Sampai dengan 31 Maret 2018, pemenuhan likuiditas Perseroan dapat berasal dari eksternal maupun internal. Pemenuhan likuiditas dari eksternal dapat berasal dari pendanaan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Interbank Call Money*. Adapun sumber likuiditas dari pihak internal dapat berasal dari modal disetor.

Pendanaan yang telah diperoleh oleh Perseroan seluruhnya telah disalurkan secara optimal guna mengembangkan bisnis Perseroan, baik dalam bentuk kredit maupun investasi jangka pendek lainnya.

Untuk mengelola likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Untuk mengelola likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan. Perseroan berkeyakinan sumber pendanaan yang tersedia, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang telah diantisipasi, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan di masa mendatang.

2.4 Analisis Arus Kas

(dalam ribuan rupiah)

| Uraian | Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 |
|--|--|-------------------------|---|
| | 2018 | 2017 (tidak diaudit) | |
| Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi | (553.570.919) | (179.160.414) | (782.655.120) |
| Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi | 164.102.643 | (9.636.608) | (731.517.131) |
| Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | 51.873 | - | 1.491.894.028 |
| Penurunan neto kas dan setara kas | (389.416.403) | (188.797.022) | (22.278.223) |
| Kas dan setara kas awal periode/tahun | 2.266.637.512 | 2.288.915.735 | 2.288.916.735 |
| Kas dan setara kas akhir periode/tahun | 1.877.221.109 | 2.100.118.713 | 2.266.637.512 |

Arus Kas untuk Aktivitas Operasi

Total arus kas bersih yang digunakan dari kegiatan operasi di periode 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp553.571 juta, kenaikan sebesar 208,98% atau sebesar Rp374.411 juta jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017. Penurunan arus kas neto dari kegiatan operasi di periode 31 Maret 2018 berasal dari Arus kas keluar yang berasal dari kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp488.111 juta, kenaikan kredit yang diberikan sebesar Rp1.112.191 juta, kenaikan pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp44.702 juta, beban operasional lainnya sebesar Rp18.466 juta, pembayaran pajak penghasilan badan dan angsuran pajak sebesar Rp7.494 juta jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017. Arus kas keluar tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp103.508 juta, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp685 juta, liabilitas segera sebesar Rp2.495 juta, simpanan nasabah sebesar Rp715.887 juta jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017.

Perseroan sebagai entitas perbankan menjalankan fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kenaikan paling besar dalam arus kas masuk dari kegiatan operasional berasal dari kenaikan Deposito Berjangka dan kenaikan arus kas keluar paling besar dari penyaluran kredit.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Di periode 31 Maret 2018, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah sebesar Rp164.103 juta, meningkat sebesar Rp173.739 juta atau sebesar 1.803% jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017 sebesar -Rp9.637 juta, peningkatan terutama berasal dari penurunan efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp176.065 juta.

Dalam rangka optimalisasi arus kas yang masuk maka Perseroan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk penempatan di instrumen surat berharga untuk mendapatkan arus kas masuk dalam bentuk penerimaan bunga. Selain itu, Kenaikan arus kas keluar berasal dari pembelian aset tetap untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan di periode 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp51 juta, meningkat sebesar Rp51 juta atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017. Arus kas masuk pada periode 31 Maret 2018 tersebut berasal dari penambahan modal dari waran.

Kenaikan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan penerbitan saham untuk pengembangan kredit Perseroan.

2.5 Operasi per segmen operasi

Segmen operasi Perseroan terdiri dari 4 (empat) segmen yaitu konsumen, ritel, menengah dan segmen lainnya. Berikut adalah informasi kondisi keuangan Perseroan berdasarkan segmen operasi:

(dalam ribuan rupiah)

| Tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Uraian | Konsumer | Ritel | Menengah | Lainnya | Total |
| Pendapatan bunga | 24.242.466 | 99.304.652 | 197.822.910 | 56.799.770 | 378.169.798 |
| Beban bunga | (18.971.133) | (51.343.627) | (101.008.051) | (53.830.786) | (255.153.597) |
| Pendapatan bunga-neto | 5.271.333 | 47.961.025 | 96.814.859 | 2.968.984 | 153.016.201 |
| Pendapatan operasi lainnya | 145.503 | 786.013 | 1.697.498 | 3.691.298 | 6.320.312 |
| Total pendapatan | 5.416.836 | 48.747.038 | 98.512.357 | 6.660.282 | 159.336.513 |
| Total beban | (121.643) | (3.519.461) | (42.112.079) | (22.069.377) | (67.822.560) |
| Pendapatan non-operasional - neto | (10.856.338) | (23.257.436) | (35.658.535) | 69.342.226 | (430.083) |
| Laba sebelum | (5.561.145) | 21.970.141 | 20.741.743 | 53.933.131 | 91.083.870 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| beban pajak penghasilan Beban pajak penghasilan – neto | 1.428.268 | (5.642.585) | (5.326.358) | (13.851.618) | (23.392.293) |
| Laba periode berjalan | (4.132.877) | 16.327.556 | 15.415.385 | 40.081.513 | 67.691.577 |

Segmen menengah memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga Perseroan yaitu sebesar Rp197.823 juta atau setara 52,31% dari total pendapatan bunga Perseroan, sedangkan segmen konsumen, ritel dan lainnya masing-masing memberi kontribusi sebesar 6,41%, 26,26% dan 15,02% dari total pendapatan bunga Perseroan.

2.6 Manajemen Risiko

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan terutama produk dan jasa sehingga meningkatkan profil risiko bank. Pengelolaan risiko menjadi hal sangat penting bagi bank agar dapat melaksanakan bisnis dengan tingkat risiko yang terukur. Meningkatnya kebutuhan pengelolaan bank yang sehat dan terpadu (*good corporate governance*) memerlukan penerapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja dan mampu menjaga kelangsungan usaha. Dengan mengelola risiko, Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan tingkat pengembangan modal (*return on equity/ROE*) untuk selanjutnya dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya, serta meningkatkan bisnis pada tingkat optimal.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko :

Untuk mencapai tujuan di atas dan sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, perlu dibangun kesadaran dan budaya manajemen risiko terpadu (*integrated risk culture*). Fokus penerapan manajemen risiko terutama pada efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko.

Penanganan Kredit Bermasalah :

Untuk meminimalkan kredit bermasalah Perseroan melakukan seleksi konsumen yang dilakukan Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan *pre-screening* nasabah sebelum dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Pre-screening* ini dilakukan melalui :

1. Penetapan Pasar Sasaran (PS) diantaranya adalah seleksi terhadap sektor industri yang dianggap Perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi.
2. Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) diantaranya adalah kriteria-kriteria risiko termasuk kriteria nasabah atau calon nasabah yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis, termasuk didalamnya adalah BI *Checking* dan *negative list* BKPM.
3. Upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang adalah melalui pemisahan pejabat kredit, penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Risk Scoring System*, pemisahan Pengelolaan Kredit Bermasalah (KL, D, dan M), melaksanakan Prosedur Perkreditan yang Sehat.

Selanjutnya bilamana terjadi kredit yang bermasalah maka tindakan Perseroan untuk penyelesaian sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Kredit bermasalah, dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, dan
 - b. Debitur memiliki prospek usaha/kemampuan membayar kembali (*Repayment Capacity*) setelah kredit direstrukturisasi.

2. Penyelesaian Kredit.

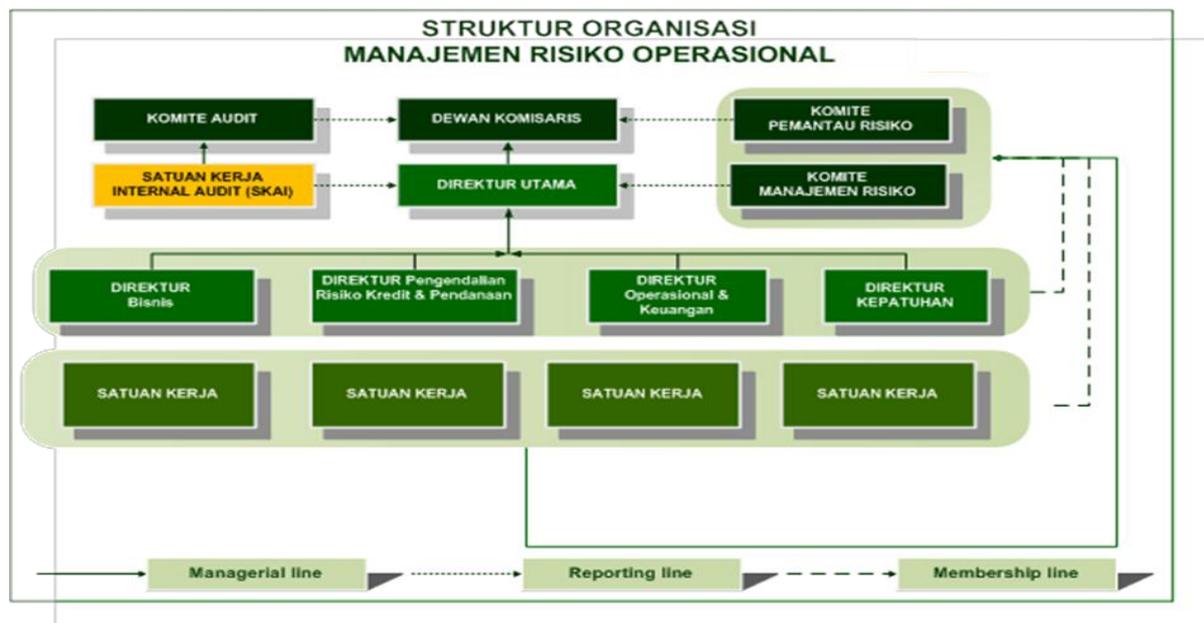
Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan cara yaitu penyelesaian kredit secara damai, melalui penjualan jaminan, melalui saluran atau mekanisme hukum, melalui penjualan jaminan atau pengalihan kredit.

Fluktuasi Kurs Mata uang Asing dan Suku Bunga Acuan

Perseroan tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu yang mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Gambar Struktur Organisasi Manajemen Risiko di Perseroan



Penerapan manajemen risiko melibatkan semua unsur dalam bank, terutama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta organisasi dan fungsi yang secara langsung terkait dengan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif manajemen bank, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank serta integrasinya sistem informasi di bank.

i. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan jajaran Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/RMC*). Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang akan mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

ii. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR berperan sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis

Perseroan, dimulai dari kebijakan, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, pengawasan risiko, pengelolaan produk dan aktivitas baru dan *Business Continuity Plan* (BCP). Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko hukum dan risiko reputasi.

Kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko yang telah dimiliki oleh Perseroan antara lain adalah:

- a. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
- b. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- c. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*
- d. Pedoman Pelaksanaan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA)
- e. Pedoman Pelaksanaan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*)
- f. Pedoman *Credit Risk Rating* Bisnis Ritel
- g. Pedoman Pelaksanaan Sistem Scoring Kredit Karyawan produktif
- h. Penetapan Transaksi Limit Dealer
- i. Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko
- j. Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Produk Dan Atau Aktivitas Baru
- k. Pedoman Pelaksanaan *Stress Test*
- l. *Pedomanan Loss Database Management (LDM)*

Penetapan limit risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan oleh satuan kerja terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

iii. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dalam proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perseroan telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

Proses Manajemen Risiko, terdiri dari:

- a. *Identifikasi*
Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Perseroan yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Identifikasi risiko dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko.
- b. *Pengukuran*
Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur ekspose risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Pengukuran risiko untuk risiko kredit telah menggunakan sistem *scoring* dan *rating*, risiko likuiditas menggunakan metodologi *Liquidity Gap*, risiko pasar (Interest Rate Risk on Banking Book) menggunakan *Repricing Gap* dan risiko operasional menggunakan RCSA.
- c. *Pemantauan*
Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya ekspose risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. *Pengendalian*

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *moderate* dan *high* yang melebihi *limit*, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan agar terukurnya ekspose risiko secara keseluruhan/komposit dan dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain aplikasi Sistem *Scoring*, aplikasi CRR (Credit Risk Rating) Ritel dan Menengah untuk risiko kredit dan RCSA & LDM *Online* untuk risiko operasional.

iv. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang memadai dalam fungsi manajemen risiko diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengendalian intern di bidang manajemen risiko dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja manajemen risiko (risk management unit) dan menerapkan metode pemisahan fungsi (segregation of duties) dengan menggunakan konsep *Maker, Checker, Approval* (MCA) pada seluruh kegiatan operasional.
- b. Satuan kerja manajemen risiko merupakan satuan kerja independen yang membuat kebijakan, prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melaksanakan pengawasan risiko pada setiap proses kegiatan usaha Perseroan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan atau menimbulkan risiko bagi Perseroan. Temuan-temuan audit oleh SKAI diinformasikan secara tertulis kepada unit terkait dan satuan kerja manajemen risiko untuk ditindaklanjuti, guna mendeteksi dan mengantisipasi segala potensial risiko secara dini sehingga kerugian dapat dihindari dan dimitigasi.

2.7 Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa bangunan, kendaraan dan perlengkapan kantor dengan jumlah belanja sebesar Rp3.474 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor dan aset dalam penyelesaian dengan jumlah belanja sebesar Rp35.308 juta. Rincian pengeluaran investasi barang modal untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Tanah dan Bangunan | 1.263.517 | 26.613.244 |
| Kendaraan | 278.650 | 2.083.659 |
| Perlengkapan Kantor | 1.931.354 | 6.245.555 |
| Aset dalam Penyelesaian | - | 365.400 |
| Total | 3.473.521 | 35.307.858 |

Dalam pelaksanaan Perseroan melakukan perjanjian dengan beberapa pihak terkait, antara lain:

| Nama Pihak yang terkait dalam Perjanjian | Nilai keseluruhan (dalam ribuan Rupiah) | Mata Uang | Distribusi investasi secara geografis | | |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| PT. Margonda Raya | Bangunan Renovasi bangunan sewa | 872.575 | Rupiah | Jakarta | |
| PT. Karya Cipta Megah Mandiri | | | | 390.942 | Jakarta |
| CV. Adistha Nugraha | | | | | Jakarta |
| CV. Pandu Putra Sarana | | | | | Jakarta |
| PT. Delta Mas | Mobil Motor | 190.600 88.050 | Rupiah | Lampung | |
| PT. Nasmoco | | | | Solo | |
| PT. Hadji Kalla | | | | Makassar | |
| PT. Hutama Raharja Dellada | Perlengkapan kantor | 1.931.354 | Rupiah | Jakarta | |
| PT. Alpha Cipta Computindo | | | | Jakarta | |
| PT. Mitra Timur Lestari | | | | Jakarta | |
| PT. Agra Jaya | | | | Jakarta | |
| PT. Harya Pilar Utama Sukses | | | | Jakarta | |
| PT. Rajawali Mega Kreasi | | | | Jakarta | |
| PT. Intan Cemerlang Electrindo | | | | Jakarta | |
| PT. Comparex Indonesia | | | | Jakarta | |
| PT. IP Network Solusindo | | | | Jakarta | |
| PT. Telkom Indonesia | | | | Jakarta | |
| PT Vervetama Teknologi | | | | Jakarta | |

Tujuan dari investasi barang modal adalah melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya sewa gedung untuk operasional Perseroan. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari laba yang diperoleh, dan Perseroan tidak memiliki pinjaman untuk belanja modal tersebut. Dalam proses pengadaan barang investasi selalu menggunakan mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak memerlukan tindakan untuk melindungi dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Peningkatan kapasitas produksi atau jasa yang diharapkan dari investasi barang modal adalah peningkatan produktifitas dan kinerja Perseroan dalam rangka peningkatan pertumbuhan kredit yang diberikan pada segmen ritel dan konsumen serta peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga terutama peningkatan CASA, sehingga berdampak pada peningkatan pada laba Perseroan.

Pangsa Pasar

Perseroan telah mencantumkan mengenai posisi pangsa pasar Emiten dalam industrinya sebagaimana diungkapkan pada Bab VIII sub bab 2 B1 Pangsa Pasar Perseroan halaman 78-79 sebagai berikut :

Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU II berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang memposisikan sebagai bank fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis. Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko, Perseroan juga membiayai usaha diluar agribisnis.

Saat ini, pangsa pasar Perseroan dipasar Indonesia masih di bawah 1% baik untuk DPK maupun kredit per 31 Maret 2018. Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan meningkatkan peran jaringan kantor layanan berbasis teknologi (e-channel).

(dalam miliar Rupiah)

| KETERANGAN | PASAR | PERSEROAN | PANGSA PASAR |
|-------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Kredit | 4.788.783 | 12.506 | 0,261% |
| DPK | 5.293.098 | 13.863 | 0,262% |

(Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2018)

2.8 Pinjaman Terutang

Per 31 Maret 2018, Perseroan tidak memiliki pinjaman terutang dengan pihak lain.

VI FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan sebagaimana perbankan secara umum dihadapkan pada risiko yang mempengaruhi hasil usaha maupun kelangsungan usaha apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik. Risiko yang menurut Perseroan mempengaruhi kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Kredit

Risiko kredit secara garis besar adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan debitur ataupun counter-party untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Pada 31 Maret 2018, persentase perbandingan kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan Perseroan sebesar 2,24% (bruto) dan 1,31% (neto). Banyak hal yang mempengaruhi kegagalan pengembalian kredit ini oleh debitur baik dari sisi debitur (insolvency usaha), dari sisi Perseroan (risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu maupun dari sisi eksternal berupa kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga acuan, maupun imbas tidak langsung lainnya risiko makroekonomi (inflasi, nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi (PDB)). Meskipun Perseroan secara aktif terus menerapkan prinsip manajemen risiko dalam mengelola dan memonitor portofolio kredit dan terus menyempurnakan kebijakan-kebijakan dan sistem manajemen risiko kredit.

Pada 31 Maret 2018, Perseroan telah mencadangkan kerugian sebesar 127,03% terhadap seluruh kredit bermasalah. Namun, nilai ini bisa harus terus bertambah seiring dengan kondisi kualitas portofolio kredit Perseroan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan, karena semakin besarnya porsi kredit bermasalah akan menyebabkan peningkatan kebutuhan biaya cadangan kerugian penurunan nilai kredit, yang sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan.

Kebijakan Perseroan dalam penyaluran kredit yaitu menjadi Bank yang fokus dalam pembiayaan di sektor agrobisnis namun tetap melayani aktifitas pembiayaan disektor non-agrobisnis. Pembiayaan terbesar dari sektor agrobisnis yaitu bisnis BUMN yang berbasis usaha agrobisnis, bisnis program (KKPE, KKP-TR dan KPEN-RP) dan bisnis agro swasta. Sedangkan di sektor non-agribisnis Bank bergerak di pembiayaan kredit KPR, kredit karyawan, kredit investasi, dan kredit modal kerja.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN

1. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari pergerakan harga pasar atau posisi yang diambil oleh Perseroan baik pada posisi neraca (on balance sheet) maupun pos-pos komitmen (off balance sheet), antara lain yang bersumber dari fluktuasi tingkat suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign exchange). Sebagian besar komponen aset dan kewajiban dalam neraca adalah komponen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Peningkatan "harga" sumber dana yang lebih cepat daripada peningkatan "harga" penggunaan dana secara sistematis akan menimbulkan margin bunga bersih yang semakin kecil bahkan negatif (negative spread). Penyesuaian terhadap suku bunga kredit mengandung risiko lain, yakni ketidakmampuan debitur untuk melakukan debt servicing secara baik.

Pada akhirnya pergerakan kedua instrumen harga tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik suatu negara secara keseluruhan yang juga tidak terpisahkan dari pengaruh kondisi perekonomian regional maupun global.

Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Risiko ini juga mencakup risiko-risiko, antara lain:

- Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga terkait dengan pergerakan tingkat suku bunga, baik penghimpunan dana maupun pelepasan dana (kredit), yang tidak sejalan dengan posisi repricing gap antara asset dan liability Perseroan. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga selain akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan juga berdampak pada tingkat kesehatan Perseroan.

- Risiko nilai tukar

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, kecurangan hati-hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing berakibat kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (rush) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang tentunya juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya.

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL

1. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem atau karena kejadian-kejadian eksternal. Lemahnya sistem operasional mengakibatkan meningkatnya biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

- Risiko proses internal, terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu bank, bisa karena pengendalian internal yang lemah, kesalahan penjualan/ pemasaran produk, kesalahan transaksi, dokumentasi yang tidak memadai, tidak lengkap atau tidak tepat. Risiko juga terjadi apabila suatu proses terlalu rumit, tidak terstruktur atau tidak dilaksanakan dengan semestinya.
- Risiko manusia, merupakan risiko yang terkait dengan karyawan bank, baik disengaja maupun tidak dan tidak terbatas hanya pada suatu unit organisasi tertentu saja. Area-area yang umumnya terkait dengan risiko manusia adalah isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, fraud internal, sengketa pekerja, praktek manajemen yang buruk, pelatihan karyawan yang tidak memadai dan ketergantungan pada karyawan tertentu saja.
- Risiko sistem, terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Penggunaan teknologi tidak saja sangat mendukung kegiatan operasional bank namun juga menimbulkan risiko bagi bank yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman, kesalahan input data, kecocokan sistem (system suitability), penggunaan teknologi yang belum diuji coba, ketergantungan pada teknologi black box, data yang tidak lengkap dan sebagainya. Secara teoritis, kegagalan secara menyeluruh pada teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya kerugian bank yang bersangkutan.

2. **Risiko eksternal**
terkait dengan kejadian-kejadian yang berada diluar kendali Perseroan secara langsung, misalnya kejadian pada bank lain yang memiliki dampak pada keseluruhan industri perbankan, pencurian dan eksternal fraud, kebakaran, bencana alam, kegagalan perjanjian outsourcing, kerusakan dan unjuk rasa, terorisme dan sebagainya.
3. **Risiko Strategik**
Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko ini selain akan berdampak pada meningkatnya beban operasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat keuntungan dan kinerja Perseroan, juga berdampak negatif pada tingkat kesehatan Perseroan.
4. **Risiko Hukum**
Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan.
5. **Risiko Kepatuhan**
Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) maupun Aset Non Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), dan sebagainya. Risiko ini selain akan berdampak pada pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan Perseroan.

6. Risiko Reputasi
Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

D. RISIKO UMUM

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Perseroan menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha berbasis komoditas tertentu yang cukup terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yaitu kelapa sawit, dan sektor perkebunan lainnya. Fluktuasi harga global mempengaruhi kelancaran usaha nasabah khususnya segmen kelapa sawit, sehingga berdampak terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.

2. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan International

Perseroan selain berhubungan dengan pihak-pihak yang berada di dalam negeri, juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelanggan di luar negeri. Untuk melakukan kegiatan perbankan di negara lain, tentu membutuhkan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

E. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

1. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid
Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan.
2. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi
Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
 - a. Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor,
 - b. Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan,
 - c. Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif,
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi
 - e. Faktor-faktor lainnya.

F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

Kondisi Perekonomian Indonesia

- Produk Domestik Bruto (PDB)

Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan I 2018 tumbuh 5,06 persen lebih tinggi dibanding capaian triwulan I 2017 sebesar 5,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I - 2018 terhadap triwulan sebelumnya turun 1,70 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 21,60 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor neto.

Struktur ekonomi Indonesia secara spesial pada triwulan I 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen. (Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2018).

Mengingat sebaran operasional perbankan dan debitur BRI Agro sebagian besar tersebar di wilayah Jawa dan Sumatra dengan portofolio yang dominan berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sedang mengalami penurunan, maka dikhawatirkan dengan adanya penurunan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur BRI Agro dalam pengembalian kredit.

- Nilai Tukar Mata Uang

Kurs tengah BI pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp13.756 per USD, mengalami depresiasi sebesar 3,26% dibandingkan posisi kurs tengah BI pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp13.321 per USD (Sumber: Bank Indonesia, 2018). Hal ini disebabkan karena adanya sentiment global dimana para pelaku pasar berekspektasi bahwa Bank Sentral AS – *Federal Reserve (The Fed)* akan meningkatkan suku bunga acuan.

- Inflasi

Pada bulan Maret 2018 terjadi inflasi sebesar 3,40 persen (tahun ke tahun) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 132,32. Dari 82 kota IHK, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura 1,05 persen dengan IHK 131,65 dan terendah terjadi di Palangka Raya 0,04 persen dengan IHK 127,64.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan sebesar 0,13 persen, kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,43 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,22 persen; kelompok sandang 0,35 persen; kelompok kesehatan 0,26 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Maret) 2018 sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2018 terhadap Maret 2017) sebesar 3,40 persen.

Komponen inti pada Maret 2018 mengalami inflasi sebesar 0,26 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Maret) 2018 sebesar 0,57 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2018 terhadap Maret 2017) sebesar 2,58 persen. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018).

Terjadinya inflasi terhadap produk konsumsi akan menyebabkan debitur konsumen BRI Agro mengalami peningkatan biaya hidup untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini akan menyebabkan terjadi gangguan pada *cashflow* debitur sehingga akan memungkinkan penurunan kemampuan untuk mengembalikan kredit.

- **Suku Bunga Acuan (*BI 7-Day Repo Rate*)**

Sejak kuartal III 2016 Bank Indonesia telah memperkenalkan suku bunga acuan baru yaitu suku bunga (*reverse*) repo 7-hari (*BI 7-Day Repo Rate*) menggantikan *BI rate* yang selama ini menggunakan suku bunga bertenor 12 bulan. Per posisi tanggal 31 Maret 2018, suku bunga *BI 7-day repo rate* sebesar 4,25%. Diharapkan, dengan penerapan suku bunga tersebut, akan mempercepat penyesuaian perbankan dalam menetapkan suku bunga karena sifatnya yang transaksional atau diperdagangkan di pasar sehingga dapat mendorong pendalaman pasar keuangan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan yaitu 7 Agustus 2018 atas laporan keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain.

VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA

Perubahan anggaran dasar Perseroan sejak Penawaran Umum terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 12 April 2017, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. AHU-0008630.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048613.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 12 September 2017, Tambahan No. 35105;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19, tanggal 21 Juli 2017, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089125.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 31 Oktober 2017, Tambahan No. 2298/L;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30, tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0175081 tanggal 27 September 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120182.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 September 2017;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03, tanggal 6 Desember 2017, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0197681 tanggal 6 Desember 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154529.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23, tanggal 15 Maret 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0112162 tanggal 16 Maret 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037630.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34, tanggal 6 Juni 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0212944 tanggal 6 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078071.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018.
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07, tanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0220946 tanggal 11 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089316.AH01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

A. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

| Jenis Penawaran Umum | Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif | Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan | Tanggal dan tempat Pencatatan Saham |
|-----------------------------|--|---|--|
| Pencatatan Saham Perseroan | Perseroan tidak melakukan penawaran umum perdana saham. Pencatatan dilakukan karena jumlah pemegang saham Perseroan telah melebihi 300 pihak dan telah memperoleh pernyataan efektif sesuai dengan surat Bapepam No. S-1565/PM/2003 tanggal 30 Juni 2003 | 1.529.336.690 saham dengan harga Rp100,- | 8 Agustus 2003 di Bursa Efek Surabaya (BES) |
| Penawaran Terbatas I Umum | 7 November 2003 dengan No : S-2718/PM/2003 | 305.867.338 saham dengan harga Rp100,- | 21 November 2003 di BES |
| Penawaran Terbatas II Umum | 12 April 2005 dengan No : S-757/PM/2005. | 513.857.128 saham dengan harga Rp105,- | 27 April 2005 di BES |
| Penawaran Terbatas III Umum | 9 November 2009 dengan No : S-9827/BL/2009 | 1.005.144.170 saham dengan harga Rp100,- | 23 November 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
| Pelaksanaan Waran Seri I | 9 November 2009 dengan No : S-9827/BL/2009 | 502.572.084 saham dengan harga Rp130,- | 25 Mei 2011 di BEI |
| Penawaran Terbatas IV Umum | 26 Juni 2013 dengan No : S-186/D.04/2013 | 3.832.685.599 saham dengan harga Rp117,- | 10 Juli 2013 di BEI |
| Penawaran Terbatas V Umum | 17 Juni 2015 dengan No : S-259/D.04/2015 | 4.028.934.521 saham dengan harga Rp100,- | 2 Juli 2015 di BEI |
| Penawaran Terbatas VI Umum | 25 November 2016 No : S-695/D.04/2016 | 3.845.996.122 saham dengan harga Rp.130,- | 2 Desember 2016 di BEI |
| Penawaran Terbatas VII Umum | 12 Juni 2017 No : S-293/D.04/2017 | 2.515.555.707 saham dengan harga Rp.400,- | 3 Juli 2017 di BEI |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek. Saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD ini berdasarkan pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 13 Juli 2018.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan permodalan Perseroan dari tanggal pendirian sampai dengan tahun 2016, telah diungkapkan dalam Prospektus tanggal 12 Juli 2017 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VII yang telah dilakukan Perseroan.

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

31 Maret 2017

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2017 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan akta Pernyataan keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Mkn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 25,000,000,000 | 2,500,000,000,000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 13,368,237,838 | 1,336,823,783,800 | 87,23 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1,020,325,518 | 102,032,551,800 | 6,66 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 937,148,464 | 93,714,846,400 | 6,11 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 15,325,711,820 | 1,532,571,182,000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9,674,288,180 | 967,428,818,000 | - |

31 Juli 2017

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan akta Pernyataan keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Mkn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.532.363.049 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat puluh sembilan) saham adalah berasal dari pelaksanaan Waran Seri II, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 15,551,271,075 | 1,555,127,107,500 | 87,083 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1,147,817,282 | 114,781,728,200 | 6,427 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1,158,986,512 | 115,898,651,200 | 6,490 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 17,858,074,869 | 1,785,807,486,900 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 42,141,925,131 | 4,214,192,513,100 | |

31 Desember 2017

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 54.463.089 (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) saham adalah berasal dari pelaksanaan Waran Seri II periode 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 15,551,271,075 | 1,555,127,107,500 | 86,818 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1,071,787,726 | 107,178,772,600 | 5,983 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1,289,479,157 | 128,947,915,700 | 7,199 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 17,912,537,958 | 1,791,253,795,800 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 42,087,462,042 | 4,208,746,204,200 | |

31 Maret 2018

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2018 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 15,551,271,075 | 1,555,127,107,500 | 86,82 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1,145,722,026 | 114,572,202,600 | 6,39 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1,215,943,875 | 121,594,387,500 | 6,79 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 17,912,936,976 | 1,791,293,697,600 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 42,087,063,024 | 4,208,706,302,400 | |

8 Juni 2018

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 8 Juni 2018 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 541.667.223 (Lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga) saham adalah berasal dari pelaksanaan Waran Seri II periode 1 Januari 2018 sampai dengan 8 Juni 2018. Dalam PMHMETD VI yang disertai dengan Waran Seri II tersebut telah diterbitkan

Waran Seri II dengan jumlah 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan yakni tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 sisa waran seri II yang tidak dilaksanakan yakni sebesar 3.970.449 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) Waran Seri II yang telah gugur demi hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk membeli saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Mkn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - |

31 Juli 2018

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2018 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Mkn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 60.000.000.000 | 6.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.089.384.692 | 1.608.938.469.200 | 87,19 |
| 2. Dana Pensiun Perkebunan | 1.163.543.926 | 116.354.392.600 | 6,30 |
| 3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 % | 1.201.276.563 | 120.127.656.300 | 6,51 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.454.205.181 | 1.845.420.518.100 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 41.545.794.819 | 4.154.579.481.900 | - |

C. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 26 Juni 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0216399 tanggal 28 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082955.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 5 April 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0138937 tanggal 9 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049489.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 April 2018, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|------------------------|
| Komisaris Utama | : -- |
| Komisaris Independen | : Heru Sukanto**) |
| Komisaris Independen | : Anna Maria Tjiadarma |
| Komisaris | : Edwind Sinaga*) |

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

***) Berdasarkan rapat Dewan Komisaris tertanggal 4 Juli 2018 sebelum RUPS menetapkan Komisaris Utama maka Dewan Komisaris menetapkan Bapak Heru Sukanto sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan, dan keputusan Rapat Dewan Komisaris menetapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Direksi

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| Direktur Utama | : | Agus Noorsanto |
| Direktur | : | Zainuddin Mappa |
| Direktur | : | Herry Prayudi |
| Direktur | : | Ebeneser Girsang |
| Direktur | : | Bambang Krisminarno *) |

Sampai dengan tanggal RUPS tanggal 26 Juni 2018, Bank BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali belum mengusulkan pengganti Tuan Hexana Tri Sasongko sebagai Komisaris Utama yang telah diangkat sebagai anggota Direksi PT. Asuransi Jiwasraya.

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Fit and Proper Test Dewan Komisaris Perseroan :

- Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-139/PB.12/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Heru Sukanto sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-100/PB.12/2018, tanggal 18 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Anna Maria Tjiadarma sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Sdr. Edwind Sinaga saat ini sedang dalam proses *Fit and Proper Test* di OJK

Fit and Proper Test Direksi Perseroan :

- Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-59/PB.12/2018, tanggal 6 April 2018, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Agus Noorsanto sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-59/PB.12/2018, tanggal 6 April 2018, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Herry Prayudi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan .
- Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-59/PB.12/2018, tanggal 6 April 2018, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Ebeneser Girsang sebagai Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan Perseroan.
- Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-140/D.03/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Zainuddin Mappa sebagai Direktur Operasional dan Keuangan Perseroan.
- Sdr. Bambang Krisminarno saat ini sedang dalam proses *Fit and Proper Test* di OJK.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Heru Sukanto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya pada tanggal 05 September 1957. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, berdasarkan RUPS tanggal 12 April 2017. Menyelesaikan kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jurusan Hukum (1982) dan memperoleh gelar Megister Pemasaran dari STM PPM lulus tahun 2000. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Bank BRI Jakarta Veteran tahun 1998-2001, Wapinwil Ritel Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya tahun 2001-2002, P.J. Kepala Divisi Bisnis Umum Bank BRI tahun 2002-2004, Pemimpin wilayah Bank BRI Makassar tahun 2004-2005, Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank BRI Jakarta tahun 2005-2007, Pemimpin Wilayah Bank BRI Jakarta 2 tahun 2007-2008, Kepala Divisi RPKB Bank BRI tahun 2008-2009, Pemimpin Wilayah Bank BRI Surabaya tahun 2009-2012, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk tahun 2012- April 2016 dan Direktur Bank Banten 2016.



Anna Maria Tjiadarma
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 30 April 1961 diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPSLB tanggal 6 Desember 2017. Menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta Jurusan Hukum Perdata pada tahun 1984, dan memperoleh gelar Magister International Finance dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) pada tahun 2001. Mulai berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 1986, pernah menjabat Kepala Bagian Manajemen Likuiditas Bidang Treasury (2001), Wakil Kepala Divisi Treasury Bidang Keuangan (2008), Kepala Desk Bidang Investment Banking (2009), Kepala Desk Bidang Investasi Jasa Penunjang Pasar Modal (2010), Pejabat Level VP ditugaskan di Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI (2011), Kepala Divisi Investment Service (2014-2017) .



Edwind Sinaga *)
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Juli 1972 diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan RUPSLB tanggal 6 Desember 2017. Menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya di Universitas Indonesia (UI) Jurusan Teknik Sipil pada tahun 1996. Mulai berkarir sebagai Staff Marketing di PT. Dwitra Sentra Artha (1997), Pemimpin Cabang PT. Bomar Securities (2002), Senior Manager PT. KUO Capital Rahardjani (2007), Dewan Pengawas PT. KUO Jateng Sekuritas Cammissioner (2007), Direktur Utama PT. Finan Corpindo Nusa (2012), Associate Director PT. Trust Securities (2014), Associate Director (Head Of Fixed Income Departement) PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2015), PT. Lautandha Securindo (Februari 2015), Konsultan PT. ASABRI (Persero) (2016), Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) (Agustus 2017 - Sekarang) .

**) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK*

Catatan Dewan Komisaris :

Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS-LB tanggal 26 Juni 2018 menyatakan bahwa Sdr. Hexana Tri Sasongko diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Utama dan sebagai penggantinya akan ditentukan dikemudian dalam RUPS mendatang.

DIREKSI



Agus Noorsanto
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia lahir di Pandeglang 03 September 1964. Menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, pada RUPSLB Perseroan pada 6 Desember 2017. Menyelesaikan kesarjanaannya di Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Ekonomi Akuntansi (1988) dan Gelar Magister dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1999) jurusan Agribisnis. Selama berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pernah menjabat Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan (2001), Kepala Bagian Laporan Keuangan Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan (2004), Kepala Bagian ALCO Supporting Group Divisi Treasury (2006), Pemimpin Cabang Ponorogo Kantor Wilayah Surabaya (2009), Wakil Kepala Divisi, Divisi Hubungan Lembaga (2010), Kepala Divisi Hubungan Lembaga 2 (2012), Kepala Divisi Hubungan Lembaga 1 (2015), Pemimpin Wilayah Jakarta 2 (2015), Senior Executive Vice President, Bidang UKM & Konsumer (2016), Senior Executive Vice President, Bidang Jaringan & Layanan (2016) dan Senior Executive Vice President, Bidang Operasional (2017).



Bambang Krisminarno *)

Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tanggal 13 Maret 1967. Menjabat sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2018. Menyelesaikan keserjanaan di Universitas Brawijaya Malang (1990) dalam bidang Hukum Perdata. Selama berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pernah menjabat beberapa jabatan penting antara lain Pemimpin Kantor Cabang BRI Sibolga, Kanwil Medan (2002), Pemimpin Kantor Cabang BRI Dumai, Kanwil Padang (2006), Pemimpin Kantor Cabang BRI Ciputat, Kanwil Jakarta 2 (2007), Pemimpin Kantor Cabang BRI Otista, Kanwil Jakarta 1 (2009), Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kanwil Manado (2012), Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Kanwil Palembang (2013), Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Kanwil Jakarta 1 (2016), Kepala Divisi Bisnis Korporasi 1 Kantor Pusat (2016), Kepala Divisi Bisnis komersil Kantor Pusat (2017)

**) efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK*



Zainuddin Mappa

Direktur Operasional & Keuangan

Warga Negara Indonesia, lahir di Barru, pada tanggal 25 November 1961. Menjabat sebagai Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, pada 20 April 2016. Menyelesaikan pendidikan keserjanaan Universitas Hasanuddin Makassar (1985) Jurusan Akutansi pada tahun (1985) dan S2 Magister Manajemen Bidang Keuangan - Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (2013). Selama berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pernah menjabat beberapa jabatan penting antara lain sebagai Pemimpin Kantor Cabang BRI Selat Panjang (1996), Pemimpin Kantor Cabang BRI Jakarta Segitiga Senen (2000), Pemimpin BRI Kantor Cabang Jakarta Jatinegara (2003), Wakil Pimpinan Wilayah Makassar (2005), Wakil Pimpinan Wilayah Medan (2006), Wakil Kepala Divisi Bisnis Umum BRI (2009), Pemimpin Wilayah BRI Medan (2010), Kepala Divisi Bisnis Umum BRI (2012), Inspektur Kantor Inspeksi BRI Semarang (2014), sebagai Kepala Divisi Agribisnis (2014).



Ebeneser Girsang

Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Kanbaje Provinsi Sumatra Utara tanggal 16 Mei 1965. Menjabat sebagai Direktur berdasarkan RUPSLB Perseroan pada 6 Desember 2017. Menyelesaikan keserjanaan di Institut Pertanian Bogor (1989) kemudian memperoleh gelar Magister, bidang Bisnis International Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1989). Selama berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pernah menjabat beberapa jabatan penting antara lain pernah menjabat Group Head, Grup Analisis Kredit Umum 1 & Ritel Divisi Analisa Risiko Kredit (2002), Group Head, Grup Analisis Risiko Agribisnis - Divisi Analisis Risiko Kredit (2007), Wakil Kepala Divisi, Divisi Analisis Risiko Kredit (2008), Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Surabaya (2011), Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Malang (2012). Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Medan (2014), Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Surabaya (2015-2017).



Herry Prayudi
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, lahir di Magetan Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Juli 1962, Menjabat sebagai Direktur berdasarkan RUPSLB Perseroan pada 6 Desember 2017. Memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas Merdeka, Malang (1986) kemudian memperoleh gelar Magister bidang Manajemen Keuangan Universitas Atmajaya, Jakarta (1997). Selama berkarir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pernah menjabat beberapa jabatan penting antara lain pernah menjabat Group Head, Grup Analisis Risiko BUMN - Divisi Analisis Risiko Kredit (2007), Wakil Kepala Divisi, Divisi Analisis Risiko Kredit (2011), Inspektur Kantor Inspeksi Palembang (2016 - 2017).

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. Kpts.30/Dir 01.03/III/2004 tanggal 1 Maret 2004, Perseroan telah menunjuk Hirawan Nur Kustono sebagai *Corporate Secretary* Perseroan dengan riwayat hidup sebagai berikut :

| JABATAN | NAMA | KETERANGAN |
|-----------------------|---------------------|--|
| Sekretaris Perusahaan | Hirawan Nur Kustono | <p>Dasar Penunjukan Sekretaris Perusahaan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. Kpts.30/Dir 01.03/III/2004 tanggal 1 Maret 2004</p> <p>Daftar Riwayat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat Pendidikan Tahun 1989 memperoleh gelar Sarjana Sains dari Universitas Indonesia - Riwayat Pekerjaan Mengawali karir perbankannya di Bank Agro sebagai <i>Officer Development Program</i> Perseroan pada tahun 1989. Setelah itu menempati beberapa posisi seperti <i>Electronic Data Processing Officer</i>, Money Market Dealer hingga Kepala Bagian Treasury. Sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, dipercaya sebagai Sekretaris Perusahaan BRI Agro. |

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan

Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Agro No. Kpts.R.16/Dir.04.05/MSDM/I/2018 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

| JABATAN | NAMA | KETERANGAN |
|---------|---------------|---|
| Ketua | Heru Sukanto | <p>Warga Negara Indonesia, 60 Tahun.</p> <p>Menyelesaikan gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1982) dan gelar Megister Pemasaran dari STM PPM lulus tahun 2000.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, berdasarkan RUPS tanggal 12 April 2017. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Bank BRI Jakarta Veteran tahun 1998-2001, Wapinwil Ritel Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya tahun 2001-2002, PJ. Kepala Divisi Bisnis Umum Bank BRI tahun 2002-2004, Pemimpin wilayah Bank BRI Makassar tahun 2004-2005, Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bank BRI Jakarta tahun 2005-2007, Pemimpin Wilayah Bank BRI Jakarta 2 tahun 2007-2008, Kepala Divisi RPKB Bank BRI tahun 2008-2009, Pemimpin Wilayah Bank BRI Surabaya tahun 2009-2012, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk tahun 2012-2016 dan Direktur Bank Banten 2016.</p> |
| Anggota | Retno Surdini | <p>Warga Negara Indonesia, 60 tahun</p> <p>Menyelesaikan pendidikannya dari Institut Pertanian Bogor tahun 1980 dalam bidang Pertanian.</p> <p>Karirnya diawali pada 1980-1983 sebagai Staff diklat Ditjen Industri Kecil di Kementrian Perindustriam, Staff Dana & Jasa 1983-1985, Assistan Manager Dana & Jasa 1985-1990, Wakil Kepala Bagian Dana & Jasa 1990-1194, Instruktur Divisi Diklat 1994-1998, Kepala Bagian Audit - Kanins 1999-2005, Wakil Inspektur kanins wilayah Makassar 2005-2006, Wakil Kepala Inspektur Kanins wilayah Palembang 2006-2007, Wakil Kepala Inspektur Kanins wilayah Bandung dan Jakarta, Kepala Divisi Kepatuhan 2008-2010, Inspektur Kanins Jakarta 3 2010-2012, Direktur Keuangan PT. BRIngin Gigantara 2012, Kepala Divisi Diklat BRI 2012-2014.</p> |
| Anggota | Nusyirwan | <p>Warga Negara Indonesia, 56 Tahun.</p> <p>Menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Perusahaan Universitas Negeri Andalas Padang dalam bidang Akutansi pada tahun 1989, dan Magister Manajemen bidang SDM dari STIE IPWIJA lulus tahun 2003.</p> <p>Karirnya perbankan dimulai pada Desember tahun 1989 sebagai CSS Akuntan I di BRI tahun 1 Desember 1989 - 10 Maret 1990, On The Job Training 11 Maret 1990 - 14 Agustus 1990, Staf Akuntansi Manajemen dan Keuangan BRI Kantor Pusat 15 Agustus 1992 - 31Agustus 1992,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | Auditor PPG-SPI 1 Februari 1992 - 31 Januari 2001, Group Head Kantor Inspeksi BRI Padang 1 Februari 2001 - 31 Maret 2008, Group Head Kantor Inspeksi Kanwil I 1 April 2008 - 30 Sept 2010, Kabag Layanan Keuangan- Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan 1 Oktober 2010 - 30 November 2016. Selain itu pengalaman mengajar dimulai pada 2002-2006 sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Bank dan Pembangunan (STIE KBP) Padang MK- Akuntansi Perbankan, Pengajar Internal Lingkup Audit Bank BRI 1992-2001, Pengajar didiklat BRI 1992-2010 dan Pangajar Program Penerimaan Staff (PPS) Bank BRI. |
|--|--|--|

Pengangkatan anggota komite audit tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Persyaratan yang telah dipenuhi diantaranya adalah berasal dari Pihak Independen atau pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan afiliasi, keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Mengkaji kecukupan dari Pengendalian Internal bank secara menyeluruh termasuk Kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
4. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
5. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris;
6. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal dalam RUPS;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan;
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit kepada Komisaris dan setiap tahunnya disajikan dalam Laporan tahunan Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts R.31/Dir.01.02/MSDM/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

| NAMA | JABATAN | KETERANGAN | MASA JABATAN |
|----------------------|---------|--|---------------------------------|
| Anna Maria Tjiadarma | Ketua | Komisaris Independen | 06 Des 2017 - RUPS Tahun 2021 |
| Heru Sukanto | Anggota | Komisaris Independen | 12 April 2017 – RUPS tahun 2021 |
| Edwind Sinaga *) | Anggota | Komisaris | 06 Des 2017 - RUPS Tahun 2021 |
| Yudi Malela | Anggota | Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia. Mulai berkarir di Bank BRI sejak tahun 1993. pernah menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Kanwil BRI Bandung (2015). Sebagai Kepala Bagian Kanwil BRI Jakarta II (2016). | 23 Oktober 2017 - sekarang |
| Agus Daniar | Anggota | Mulai berkarir di Bank BRI pada tahun 1987. Pernah menjadi Wakil Inspektur Kantor Inspeksi BRI Medan tahun 2016 dan <i>Professional Trainer</i> TIM WORK BRI tahun 2016 - Sekarang. | 1 April 2017 - 1 April 2019 |

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi
 - a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - d. Menyusun sistem Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2. Fungsi Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
 - d. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.
3. Lain-lain
 - a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan /atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
 - c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Agro No. Kpts.R.15/Dir.04/05/MSDM/I/2018, tanggal 29 Januari 2018, tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, maka susunan struktur organisasi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut

| NAMA | JABATAN | KETERANGAN | MASA JABATAN |
|------------------------|---------|---|------------------------------|
| Anna Maria Tjiadarma | Ketua | Komisaris Independen | 06 Desember 2017 – sekarang |
| Sihar Moreno Hutabarat | Anggota | Mulai berkarir di Bank BRI pada tahun 1988. Beberapa kali menjadi pemimpin cabang Bank BRI tahun 1994 – 2008. Menjadi Wakil Pimpinan Wilayah Bank BRI sejak 2009 – 2012. Menjadi Inspektur di Jakarta BSD tahun 2014. | 13 Maret 2012 – Sekarang |
| Dolly Mindaryanto | Anggota | Mulai berkarir di Bank BRI pada tahun 1985. Beberapa kali menjadi Kepala Bagian Bank BRI tahun 2009 – 2016. | 1 April 2017 - 31 Maret 2019 |

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai

bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.

2. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.
5. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Memantau dan/atau membuat tanggapan atas laporan realisasi RBB dan RKAP.
8. Mengevaluasi dan menganalisis paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
9. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite-Komite di bawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam menyusun kebijakan umum manajemen risiko serta strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen risiko terkait dengan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal. Memberikan rekomendasi perbaikan, penyempurnaan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasinya.

| JABATAN | KETERANGAN |
|------------------------------|--|
| Ketua/merangkap anggota | Direktur Kepatuhan |
| Wakil Ketua | Direktur Operasional dan Keuangan |
| Sekretaris/merangkap anggota | Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum |
| Anggota Tetap | Direktur Pendanaan dan PRK, Direktur Bisnis, Kepala SKAI; Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Dana dan Jasa. |
| Anggota Tidak Tetap | <p><u>Kepala Divisi Pengendalian Risiko Kredit dan Kepala Divisi Operasional</u> untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.</p> <p><u>Kepala Divisi Operasional</u>, Kepala Divisi MSDM, dan Kepala Divisi Teknologi Informasi, untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.</p> <p><u>Kepala Desk Treasury</u> dan Kepala Divisi Operasional untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas.</p> <p><u>Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan</u> untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Reputasi dan Risiko Strategis.</p> <p>Kepala Divisi Change Management.....</p> |

Asset and Liabilities Committee (ALCO)

Dibentuk untuk memantau kinerja perbankan nasional yang bersumber data yang diterbitkan Bank Indonesia, selanjutnya mengidentifikasi perkembangan produk perbankan, likuiditas dan suku bunga kredit dan suku bunga dana. Selanjutnya menetapkan pengelolaan aset dan liabilitas secara terpadu serta menetapkan suku bunga dasar simpanan, pinjaman dan *fund transfer price*. Komite ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset dan liabilitas dilaksanakan sesuai dengan Rapat ALCO.

| JABATAN | KETERANGAN |
|--------------------------------------|---|
| Ketua merangkap anggota | Direktur Utama |
| Ketua pengganti I merangkap anggota | Direktur Operasional dan Keuangan |
| Ketua pengganti II merangkap anggota | Direktur Bisnis |
| Sekretaris merangkap anggota | Kepala <i>Desk Treasury</i> |
| Anggota | Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan. |

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait rencana strategis teknologi informasi, kebijakan teknologi informasi dan kesesuaian pengembangan teknologi informasi dengan rencana strategis.

| JABATAN | KETERANGAN |
|------------------------------|--|
| Ketua I | Direktur Operasional dan Keuangan |
| Ketua II | Direktur Kepatuhan |
| Sekretaris merangkap anggota | Kepala Divisi Teknologi Informasi |
| Anggota | Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum. |

Piagam Audit Intern

Untuk memenuhi POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum ("SPFAIB") yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh Bank sebagai perusahaan publik serta untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit intern Bank yang efektif melalui kesamaan pemahaman dan dukungan komitmen mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, kewenangan, fungsi, tugas, tanggungjawab, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern Bank, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Agro No. Kpts.09.A/Dir.01/MSDM/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang Penempatan Karyawan Sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Terhitung mulai tanggal 24 Mei 2013 menempatkan Sdr. Agus Suprpto sebagai Kepala Satuan Kerja Audit dibantu oleh seorang Wakil Kepala SKAI dan seorang Kepala Grup Auditor.

Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap (*Strategic Business Partner*) untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan dengan cara:

1. Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan proaktif;

2. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Bank;
3. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
4. Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (*risk management*) dan pengendalian internal Bank agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya dapat terpenuhi.

Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

Tugas Satuan Kerja Audit Intern:

1. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
2. Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan audit di semua Unit Kerja BRI Agro antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, secara independen, obyektif dan profesional.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Satuan Kerja Audit Intern memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif.
6. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank BRI Agro untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis BRI Agro dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para *stakeholders*.
7. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
8. Menjaga hubungan baik dengan *Auditee*, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern.

Wewenang Satuan Kerja Audit Intern

1. Memiliki kewenangan didalam akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan, pegawai, asset dan kekayaan atau kepemilikan BRI Agro yang berkaitan dengan penugasan auditnya.
2. Menguji, memeriksa, dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen BRI Agro, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (asset, kewajiban, modal, perhitungan laba/rugi, kontijensi dan komitmen) serta sumber daya manusia.
3. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit yang diambil oleh *Auditee*.
4. Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisararis, Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan obyek audit.
5. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern BRI Agro.
6. Menetapkan *competency profile* dan *key performance indicator* Audit Intern dalam rekrutmen/seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang dilakukan terus menerus (*continous improvement*).

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*).

Komite Kredit Kantor Pusat

Komite Kredit dibentuk sesuai dengan Keputusan Direksi nomor B.14 A/Dir.01.05/DCM/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Komite Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk

Komite Kredit berdasarkan keanggotaan dan kewenangan:

- A. Komite Kredit Utama
- B. Komite Kredit I
- C. Komite Kredit II
- D. Komite Kredit III
- E. Komite Kredit IV

Susunan Komite Kredit Utama

1. Direktur Utama
2. Direktur Bisnis
3. Direktur Pengendali Risiko Kredit & Pendanaan
4. Direktur Operasional dan Keuangan

Catatan :

- Kepala Divisi Kredit (Pemrakarsa)
- Kepala Divisi Pengendali Risiko Kredit (Pemrakarsa)

Susunan Komite Kredit I

- Direktur Bisnis
- Direktur Pengendali Risiko Kredit & Pendanaan
- Direktur Operasional & Keuangan

Catatan :

- Kepala Divisi Kredit (Pemrakarsa)
- Kepala Divisi Pengendali Risiko Kredit (Pemrakarsa)

Susunan Komite Kredit II

1. Direktur Bisnis
2. Direktur Pengendali Risiko Kredit & Pendanaan

Catatan :

- Kepala Divisi Kredit (Pemrakarsa)
- Kepala Divisi Pengendali Risiko Kredit (Pemrakarsa)

Susunan Komite Kredit III

- Kepala Divisi Pengendali Risiko Kredit
- Kepala Divisi Ritel & Kemitraan
- Kepala Divisi Menengah I/II.

Catatan :

- Kepala Bagian Menengah I/II (Pemrakarsa)
- Kepala Bagian RPKB (Pemrakarsa)

Susunan Komite Kredit IV

- Kepala Divisi Pengendali Risiko Kredit
- Kepala/Wakil Kepala Divisi Ritel & Kemitraan.

Catatan :

- Kepala Bagian Menengah I/II (Pemrakarsa)
- Kepala Bagian RPKB (Pemrakarsa)

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, merumuskan pedoman untuk evaluasi kinerja karyawan dan menangani kompensasi karyawan dan isu-isu yang bermanfaat. Unit kerja ini juga bertanggung jawab untuk merekrut dan menugaskan karyawan untuk berbagai departemen, pelatihan dan pengembangan, dan jenjang karir manajemen serta menjaga hubungan baik antara Perseroan dan karyawan.

Sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memperkuat budaya Perseroan, Perseroan telah mengadopsi nilai-nilai perusahaan sebagai berikut:

1. Kepuasan Nasabah - Memberikan pelayanan melebihi yang diharapkan oleh nasabah (baik internal maupun eksternal).
2. Inovasi - Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi Perseroan.
3. Keteladanan - Mulai dari diri sendiri menjadi suri teladan dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya kerja Perseroan.
4. Profesionalisme - Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik.
5. Integritas - Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan Perseroan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
6. Penghargaan Kepada Sumber Daya Manusia - Perusahaan senantiasa mengembangkan dan memberikan penghargaan yang layak kepada seluruh sumber daya manusia BRI Agro.

Profil Sumber Daya Manusia Perseroan

Total sumber daya manusia Perseroan per tanggal 31 Maret 2018 sebanyak 684 orang. Dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 695 orang.

Tabel Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Per 31 Maret 2018

| NO | JABATAN | JUMLAH | PENDIDIKAN | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| | | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 |
| 1 | Kepala Divisi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | Wakil Kepala Divisi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Kepala Bagian/Kepala Grup/Setingkat Kabag | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 |
| 4 | Kepala Cabang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 5 | Kepala Bidang (di bawah Kacab) | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 6 | Kepala Cabang Pembantu | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 7 | Kepala Kantor Kas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Staff | 183 | 0 | 0 | 1 | 15 | 159 | 8 |
| 9 | Pelaksana | 392 | 0 | 0 | 2 | 62 | 323 | 5 |
| 10 | MPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tenaga Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 684 | 0 | 0 | 3 | 85 | 563 | 33 |

Tabel Komposisi Berdasarkan Usia

| Keterangan | 2017 | 2018 |
|------------------|------------|------------|
| Di atas 55 tahun | 14 | 17 |
| > 51 – 55 tahun | 27 | 30 |
| > 46 – 50 tahun | 44 | 43 |
| > 41 – 45 tahun | 40 | 38 |
| > 36 – 40 tahun | 79 | 78 |
| > 31 – 35 tahun | 151 | 150 |
| > 26 – 30 tahun | 255 | 255 |
| > 20 – 25 tahun | 85 | 73 |
| Total | 695 | 684 |

Tabel Komposisi Pegawai Tetap dan Kontrak

| KETERANGAN | 31 DESEMBER | |
|-----------------|-------------|------------|
| | 2017 | 2018 |
| Pegawai Tetap | 499 | 497 |
| Pegawai Kontrak | 196 | 187 |
| Total | 695 | 684 |

Pemenuhan Terhadap Ketentuan Upah Minimum

| KANTOR CABANG | UPAH MINIMUM BRI AGRO (RP) | PROPINSI | UMR (RP) |
|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| KPO & Cab Jakarta | 3.950.000,00 | DKI Jakarta | 3.648.035,82 |
| Kuningan | 4.018.176,00 | DKI Jakarta | 3.648.035,82 |
| Bandung | 3.652.710,00 | Jawa Barat | 3.091.345,56 |
| Semarang | 3.233.064,00 | Jawa Tengah | 2.310.087,50 |
| Surabaya | 3.928.224,00 | Jawa Timur | 3.583.312,61 |
| Medan | 3.233.064,00 | Sumatera Utara | 2.749.074,00 |
| Pekanbaru | 3.415.969,00 | Riau | 2.557.486,73 |
| Jambi | 3.527.538,00 | Jambi | 2.381.941,00 |
| Bandar Lampung | 3.233.064,00 | Lampung | 2.263.390,87 |
| Rantau Prapat | 3.233.064,00 | Sumatera Utara | 2.749.074,00 |
| Balikpapan | 3.527.538,00 | Kalimantan Timur | 2.618.348,29 |
| Makassar | 3.415.970,00 | Sulawesi Selatan | 2.722.642,00 |
| Bogor | 3.771.615,00 | Jawa Barat | 3.557.146,66 |
| Palembang | 3.498.663,00 | Sumatera Selatan | 2.700.360,00 |
| Pontianak | 3.498.664,00 | Kalimantan Barat | 2.145.000,00 |
| Solo | 3.233.064,00 | Jawa Tengah | 1.668.700,00 |
| Cikarang | 4.221.978,00 | Jawa Barat | 3.837.939,63 |
| Bintaro | 3.565.149,00 | Banten | 3.555.834,67 |

Berdasarkan data tersebut di atas, upah (minimum) karyawan Perseroan telah memenuhi dan atau melebihi ketentuan upah minimum propinsi seperti yang disyaratkan.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen Perseroan. Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, fasilitas dana pensiun melalui DPLK, tunjangan kesehatan karyawan dan keluarga melalui sistem asuransi kesehatan maupun Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS-Kesehatan), serta pinjaman lunak karyawan yang disalurkan melalui Koperasi Karyawan.

Hubungan Industrial Karyawan

Sebagai wadah mengharmoniskan hubungan antara pihak perusahaan dan para karyawan, serta mengakomodasi kepentingan karyawan dalam hubungan industrial, maka tahun 2009 telah terbentuk Serikat Karyawan (SEKAR) Perseroan yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 579/V/P/V/2009, tanggal 5 Mei 2009. Hasil dari hubungan ini adalah telah disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak Perseroan dengan Serikat Karyawan yang merupakan implementasi dari peraturan ketenagakerjaan di perusahaan dengan manajemen Perseroan. PKB tersebut terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 193/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang berlaku sampai dengan 2 Desember 2017 dan masih dapat berlaku sampai dengan 1 tahun kedepan.

Introduksi Budaya Perusahaan

Dalam rangka menumbuhkan budaya perusahaan, Perseroan mengelola proses pengenalan nilai-nilai perusahaan secara bertahap. Sejak tahun 2012 Perseroan telah mengenalkan 10

tindakan awal dan berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor B.09/Dir.04.05/DCM/II/2018 tanggal 19 Januari perihal Revitalisasi Budaya Kerja Perusahaan sebagai berikut :

1. Melakukan doa pagi bersama sebelum bekerja
2. Disiplin waktu : hadir di kantor, pada acara rapat, pada kegiatan lainnya tepat waktu (tidak terlambat)
3. Menggunakan fasilitas kantor hanya untuk kepentingan perusahaan secara efisien dan optimal,
4. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban ruang kerja & peralatan kerja seoptimal mungkin,
5. Menyampaikan laporan secara akurat dan sesuai batas waktunya,
6. Mengangkat telepon meja paling lambat sebelum dering ketiga,
7. Melayani nasabah dengan tersenyum, memberikan sapaan dan salam serta ucapan terimakasih,
8. Menyelenggarakan dialog secara berkala dengan staf dan bawahan untuk berbagi informasi dan memotivasi,
9. Membantu rekan sekerja (peers) atau anak buah (sub ordinat) apabila menghadapi kesulitan/ masalah dalam bekerja,
10. Saling menghargai diantara pekerja,
11. Mengembangkan kompetensi untuk mendukung tuntutan organisasi dan persaingan,
12. Memberikan penghargaan/ pujian secara langsung kepada pekerja yang berkinerja baik.

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pelatihan yang telah dilaksanakan Perseroan, antara lain:

| No | Program Pendidikan & Pelatihan 2018 |
|----|--|
| 1 | Pengarahan Dirut kepada ODP Kanpus & Jabodetabek |
| 2 | Rapat Kerja Nasional 2018 |
| 3 | Pembekalan Sertifikasi <i>Treasury</i> Level Basic |
| 4 | Pemateri/Pembekalan AO Batch 2 |
| 5 | Sosialisasi Kebijakan Pengupahan |
| 6 | Uji Sertifikasi <i>Treasury Level Basic</i> |
| 7 | Training Day 'Pinjaman Sindikasi' |
| 8 | Training Funding Officer 'Everybody is Sales Person for FO' |
| 9 | Training Day ' <i>Cash Management System</i> ' (CMS) |
| 10 | Training Day ' <i>Cash Management System</i> ' (CMS) |
| 11 | Workshop Mengenai Ketentuan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Bank Umum |
| 12 | Pendidikan <i>Enhancement Pre Retirement Program</i> |
| 13 | Tekno Ekonomi budidaya & Pengolahan Kelapa Sawit |
| 14 | <i>Authentic Leadership Training</i> |
| 15 | Pembahasan GAP Analysis PSAK 71 |
| 16 | Sharing Session 'Rencana Kinerja Februari & Maret 2018' |
| 17 | Undangan Pelatihan Pendalaman Struktur & Skala Upah |
| 18 | Evaluasi <i>On The Job Training</i> Peserta <i>Trainee AO Batch 1</i> |
| 19 | Tutorial Sertifikasi <i>Treasury</i> (mengulang) |
| 20 | Sosialisasi Program Internal Marketing BRI Agro |
| 21 | Sosialisasi Literasi SE Kredit Karyawan Tetap dan SE Kredit Agro Mobil |
| 22 | Evaluasi <i>On The Job Training</i> Peserta <i>Trainee AO Batch 2</i> |

| | |
|----|---|
| 23 | Pembahasan RSK dan SPK BRI Agro Tahun 2018 |
| 24 | Penilaian Investasi & Pembiayaan Rumah Sakit |
| 25 | Uji Sertifikasi <i>Treasury Level Basic</i> (mengulang) |
| 26 | Analisa Pinjaman dan Resiko Kredit |
| 27 | Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia di Bidang Pengelolaan Uang Rupiah dan Pertemuan Tahunan Kasir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan Kasir/ <i>Tellers</i> Perbankan Tahun 2018 |
| 28 | Kegiatan <i>Capacity Building and Refreshment</i> Ketentuan Bank Indonesia |
| 29 | <i>Recruitment and Selection</i> |
| 30 | Sosialisasi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan <i>Refreshment</i> Ketentuan Bilyet Giro 2017 |
| 31 | <i>Tapping Potential Opportunities in Indonesian Sustainable Palm Oil Industry</i> |
| 32 | Sosialisasi dan Forum Komunikasi Kliring Provinsi Riau Tahun 2018 |
| 33 | <i>Training Day 'CMS'</i> |
| 34 | <i>Focus discussion</i> (FGD) layanan perkasas semester I tahun 2018 |
| 35 | Workshop GAUL (Gerakan Anti Uang Lusu) Kasir/Teller Perbankan Palembang Tahun 2018 |
| 36 | <i>Training</i> Pekerja Baru <i>Funding Officer</i> |
| 37 | <i>Training</i> / Pembekalan Pekerja Baru AO |
| 38 | <i>Training</i> Pekerja Baru AO- Pengarahan Dirut |
| 39 | <i>Training</i> /pembekalan Pekerja Baru <i>Front Liner</i> |
| 40 | <i>Refreshment</i> dan Evaluasi Kinerja Pengolahan Uang Perbankan di Wilayah Kerja KPw BI Prov. Sumatera Utara TA.2018 |
| 41 | <i>Gathering</i> Kasir dan Sosialisasi Ketentuan Perkasas Terbaru |
| 42 | Profil Bisnis Perkapalan |
| 43 | Profil Bisnis <i>Food & Drink</i> |
| 44 | Profil Bisnis Migas Sektor Hilir |
| 45 | Manajemen Kredit Sindikasi |
| 46 | <i>Training of Trainer Change Agent</i> |
| 47 | <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB) |
| 48 | Pengarahan Dirut (Diskusi dan Pembinaan) kepada Kabag & Wakabag |
| 49 | Pendidikan <i>Enhancement Program Special Request</i> Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Terkait Kewajiban Pelaporan dan Pemenuhan Informasi/Data kepada PPATK atau Apgakum |
| 50 | <i>Refreshment</i> Ketentuan Terkini Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI) diBidang Sistem Pembayaran Non Tunai |
| 51 | <i>Brainstorming</i> AO |
| 52 | Pendidikan <i>Refreshment</i> Petugas AO NPL |
| 53 | Pendidikan <i>Refreshment</i> Petugas Auditor |
| 54 | Pendidikan <i>Refreshment</i> Petugas ADK |
| 55 | Tutorial Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 |
| 56 | Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 |
| 57 | Pendidikan AO Konsumer |
| 58 | Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 |
| 59 | Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 |
| 60 | Pendidikan Agro Novation |

| | |
|----|---|
| 61 | Pendidikan <i>Effective Training</i> (Desain Sistem Instruksional (DSI) |
| 62 | Pendidikan <i>Assessment</i> bagi Kadiv, Wakadiv & Kabag |
| 63 | Pendidikan Membangun <i>Financial Modelling</i> |
| 64 | <i>Training Company Strategic Planning.</i> |

E. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN PENYERTAAN

Perseroan memiliki penyertaan saham dengan rincian dibawah ini:

| NO. | NAMA PERUSAHAAN | TAHUN DIMULAI PENYERTAAN | JENIS USAHA | PEMILIKAN (%) | NILAI TERCATAT (RIBUAN RUPIAH) |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | PT BPR Toelongredjo Dasa Nusantara | 1991 | Bank | 1,50 | 76.830 |
| 2 | PT BPR Tjoekir Dasa Nusantara | 1991 | Bank | 3,00 | 76.818 |
| 3 | PT BPR Toelangan Dasa Nusantara | 1991 | Bank | 1,50 | 66.500 |
| 4 | PT BPR Cinta Manis Agroloka | 1991 | Bank | 1,75 | 35.010 |
| 5 | PT BPR Bungamayang Agroloka | 1991 | Bank | 1,125 | 22.500 |
| 6 | PT Aplikanusa Lintasarta | 1994 | Non-Bank | 0,03 | 20.000 |
| Total Nilai Penyertaan Saham | | | | | 297.658 |

F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemegang saham dan/ atau manajemen yang sama dengan Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Afiliasi**"). Transaksi-transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Persentase jumlah aset Pihak Afiliasi terhadap jumlah aset pada periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 10,82% dan 8,74%.

Penempatan dana dari Pihak Afiliasi dalam bentuk simpanan:

1. Simpanan Giro dari Pihak Berelasi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat seluruhnya sebesar Rp503,87 miliar pada tanggal 31 Maret 2018 dan sebesar Rp307,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Simpanan Tabungan dari Pihak Berelasi dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp259,41 miliar dan sebesar Rp42,28 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Simpanan Deposito Berjangka dari Pihak Berelasi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat seluruhnya sebesar Rp3.737,49 miliar pada tanggal 31 Maret 2018 dan sebesar Rp3.043,66 miliar pada tanggal 31 Desember 2017.

Tidak ada bentuk pengecualian yang diberikan kepada Pihak Afiliasi dalam hal suku bunga penempatan dana.

| NO | Jenis Transaksi | Nama Pihak Terafiliasi | Bentuk Hubungan | Nilai |
|----|-------------------------------|--|---|---------------|
| | | | Perseroan dengan Pihak Terafiliasi | 31 Maret 2018 |
| 1 | Giro pada bank lain | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Entitas Induk | 11.151.014 |
| | | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | | |
| | | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | | |
| 2 | Efek-efek | Pemerintah RI | Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI, Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Entitas Induk | 1.194.853.767 |
| | | PT BNI Asset Management | | |
| | | PT Mandiri Manajemen Investasi | | |
| | | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | | |
| 3 | Kredit Yang Diberikan | Perum Perhutani | Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Hubungan pengendalian melalui entitas induk | 719.209.158 |
| | | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | | |
| | | PT Perkebunan Nusantara XIII | | |
| | | PT Perkebunan Nusantara VII | | |
| | | PT Perkebunan Nusantara II | | |
| | | PT Laras Astra Kartika | | |
| | | PT Perkebunan Nusantara XIV | | |
| | | Perum Percetakan Negara RI | | |
| | | PT Bringin Gigantara | | |
| | | Lain-lain | | |
| 4 | Giro | Entitas dan lembaga Pemerintah | Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Hubungan pengendalian melalui Dana Pensiun, Hubungan pengendalian melalui entitas induk | 503.869.445 |
| | | Karyawan kunci | | |
| | | Lain-lain | | |
| 5 | Tabungan | Entitas dan lembaga Pemerintah | Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Hubungan Pengendali kegiatan bank | 259.406.185 |
| | | Karyawan kunci | | |
| | | Lain-lain | | |
| 6 | Deposito Berjangka | Entitas dan lembaga Pemerintah | Hubungan pengendalian melalui Dana Pensiun, Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Hubungan pengendalian melalui entitas induk, Hubungan Pengendali kegiatan bank | 3.737.486.486 |
| | | Karyawan kunci | | |
| | | Lain-lain | | |
| 7 | Garansi Bank Yang Diterbitkan | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | Hubungan pengendalian melalui Dana Pensiun, Entitas Induk | 508.803 |
| | | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | | |

G. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK YANG TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Tanggal 23 Desember 2015 tentang penggunaan sistem aplikasi ATM BRI AGRO dan penempatan ATM BRI di unit kerja BRI Agro No. B.186/KJE/12/2015 dan No. SR-29/Dir.05/12/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. tentang Penempatan ATM BRI di Unit Kerja BRI AGRO No. B.41/JRK/KAP/05/2018 dan No. BRI AGRO/SP-14/Dir.05/04/2018, tanggal 23 April 2018, yang berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 01 Desember 2019.
2. Perjanjian Kerja Sama Pendanaan Dalam Rangka Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dengan pemerintah Republik Indonesia No. PKP-007/KKP-E/DP3/2007 tanggal 1 November 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan perubahan perjanjian No AMA-04/PPK-07/KKP-E/DSMI/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan jumlah baki debit (*outstanding*) dari waktu ke waktu setinggi-tingginya sebesar Rp. 343.000.000.000,- yang berakhir pada tanggal 25 Mei 2020.
3. Perjanjian Kerjasama Pendanaan Dalam Rangka Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pemerintah Republik Indonesia No. PKP-08/KPEN-RP/DP3/2007 tanggal 7 Desember 2007 dengan jumlah baki debit (*outstanding*) dari waktu ke waktu setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000.000.000,- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

H. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan terlibat dalam perkara sebagai berikut:

1. Perkara Perdata

- 1.1. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 157/Pdt.G/2011/PN.BKS., tanggal 04 April 2011 - BRI Agro Kantor Pusat.

Status perkara No. 157/Pdt.G/2011/PN.BKS diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan No. 157/Pdt.G/2011/PN. Bks, tanggal 18 April 2012 mengabulkan gugatan Penggugat Eva Damayanti untuk seluruhnya dan menyatakan para Tergugat (Bank BRI Agro sebagai Tergugat IX) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan No. 012/Pdt/2013/PT.BDG, tanggal 26 Maret 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 157/Pdt.G/2011/PN. Bks, tanggal 18 April 2012;
- c. Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi yang diajukan Bank BRI Agro berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Kasasi No. 157/Pdt.G/2011/PN. Bks Jo. 012/Pdt/2013/PT.BDG. Jo. No. 29/Akta.K/2013/PN. Bks, tanggal 27 Mei 2013;
- d. Bank BRI Agro mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali terhadap putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung No. 12/Pdt/2013/PT. Bdg berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/2011/PN. Bks Jo. 012/Pdt/2013/PT.BDG Jo. Nomor 6/Akta.PK/Pdt/2018/PN. Bks Tanggal 8 Maret 2018 serta telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.PK/Pdt/2018/PN. Bks pada Tanggal 8 Maret 2018.

Potensi kerugian: Lepasnya benda jaminan jika putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat.

- 1.2. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.RGT., tanggal 2 Maret 2015 - BRI Agro Cabang Pekanbaru.

Status perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN.RGT., diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2015/PN.RGT., tanggal 2 Maret 2015 mengabulkan gugatan Penggugat Bambang Wijiantoro untuk sebagian dan menyatakan para Tergugat (Bank BRI Agro sebagai Tergugat XXII) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan No. 74/PDT/2016/PT-PBR, tanggal 26 Juli 2016 membatalkan putusan Pengadilan Rengat No. 10/ Pdt.G/ 2015/PN.RGT., tanggal 2 Maret 2015;
- c. Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 74/PDT/2016/PT-PBR, tanggal 26 Juli 2016 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi (Bank BRI Agro sebagai Termohon Kasasi) No. 74/Pdt/2016/PT.PBR jo. 10/Pdt.G/2015/PN. RGT, tanggal 25 Agustus 2016.

Potensi kerugian: Lepasnya benda jaminan jika putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat.

- 1.3. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Semarang No.159/Pdt.G/2016/ PN. SMG., tanggal 6 April 2016 - BRI Agro Cabang Semarang

Status perkara No.159/Pdt.G/2016/ PN. SMG., diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan No. 159/Pdt.G/2016/PN. SMG, tanggal 5 Januari 2016 menolak gugatan pada Penggugat (A. Syukur dan Nur Farida Y) untuk seluruhnya;
- b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusan No. 321/Pdt/2017/PT.SMG, tanggal 2 Oktober 2017 menerima permohonan Banding pada Pembanding dahulu Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 159/Pdt.G/2016/PN. SMG, tanggal 5 Januari 2016;
- c. Berdasarkan keterangan Bank BRI Agro Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 321/Pdt/2017/PT.SMG, tanggal 2 Oktober 2017 kepada Mahkamah Agung.

Potensi kerugian: Lepasnya benda jaminan jika putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat.

- 1.4. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara No.127/Pdt.G/2017/PN.MKS., tanggal 17 April 2017 – Kantor Cabang Makassar

Status perkara No.127/Pdt.G/2017/PN.MKS., adalah telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan No. 127/Pdt.G/2017/PN.MKS, tanggal 9 November 2017 menolak gugatan Penggugat (Lenny Soraya Leang sebagai Penggugat) untuk seluruhnya.

Berdasarkan keterangan Bank BRI Agro perkara No. 127/Pdt.G/2017/PN.MKS masih dalam proses Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Potensi kerugian: Lepasnya benda jaminan jika putusan *incracht* oleh Pengadilan pada tingkat manapun mengabulkan gugatan Penggugat.

- 1.5. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara No. 18/Pdt.G/2017/PN.DMK, tanggal 10 Agustus 2017 – BRI Agro Kantor Pusat, Jakarta

Status perkara No. 18/Pdt.G/2017/PN.DMK, diuraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Demak dalam Putusan No. 18/Pdt.G/2017/PN.DMK, tanggal 10 Agustus 2017 menolak gugatan Penggugat (Siti Setyowati I) untuk seluruhnya;
- b. Berdasarkan keterangan dari Bank BRI Agro Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak No. 18/Pdt.G/2017/PN.DMK, tanggal 10 Agustus 2017. Terhadap permohonan Banding Penggugat Bank BRI Agro telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2017.

Potensi kerugian : Lepasnya benda jaminan jika putusan *incracht* oleh Pengadilan pada tingkat manapun mengabulkan gugatan Penggugat.

- 1.6. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara No. 15/Pdt.G/2018/PN.Rantau Prapat, tanggal 27 Februari 2018 – BRI Agro Cabang Rantau Prapat

Belum terdapat putusan pengadilan pada tingkat peradilan manapun, dikarenakan masih dalam tahap pembacaan Duplik perkara.

Potensi kerugian : Lepasnya benda jaminan jika putusan *incracht* oleh Pengadilan pada tingkat manapun mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Perkara Pidana

Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan Surat Keterangan Laporan Terima Laporan Polisi No. STTLP/B/651/XI/2017/JATENG/RESTABES SMG, tanggal 21 November 2017.

Bahwa Bank BRI Agro yang diwakili oleh Gabriel Hendra Kurniawan selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agro Cabang Semarang (dalam hal ini sebagai Pelapor/Korban) melaporkan Victor Bakara (selaku Terlapor) atas dugaan pencemaran nama baik dengan modus operandi yaitu memfitnah secara lisan kepada korban dengan waktu terjadi pada tanggal 14 Juni 2017.

Potensi kerugian : Merusak nama baik Bank BRI Agro Cabang Semarang

3. Perkara yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi: **Tidak ada / Nihil**

Terhadap perkara-perkara tersebut diyakini oleh Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan operasi usaha Perseroan. Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang material yang dihadapi Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini.

I. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan aset tetap (kecuali tanah) dan kepentingan Perseroan yang ada pada / dimiliki oleh Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan, baik atas harta benda maupun kesehatan karyawan. Jenis-jenis pertanggungan yang telah ditutup adalah *property all risk*, kebakaran dan gempa bumi atas harta kekayaan tetap dan bergerak, asuransi *burglary / theft* untuk Kantor Cabang Pekanbaru dan Jambi serta Kantor Cabang Pembantu Kasikan, Lubuk Dalam, Ujung Batu, Air Molek, Bandar Jaya, dan Kantor Kas Dalu-Dalu, Teluk Sono serta asuransi *cash in safe / cash in transit* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, serta asuransi atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pertanggungan tersebut ditutup pada PT Asuransi BRINS Tbk. yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan oleh Dana Pensiun BRI dan/atau PT Asuransi JASTAN. Persyaratan pertanggungan dan penutupan asuransi pada PT Asuransi BRINS, Tbk dilaksanakan dengan persyaratan yang berlaku umum (*arms length*) sebagaimana dengan pihak ketiga lainnya. Selain oleh PT Asuransi BRINS Tbk, pertanggungan asuransi Perseroan juga ditutup oleh PT Asuransi Wahana Tata.

Selain itu Kantor Pusat juga menutup asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Berjangka dan Asuransi Kesehatan pada PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera.

Total nilai pertanggungan asuransi adalah sekitar **Rp228.400 juta** untuk asuransi bangunan, inventaris kantor dan kendaraan bermotor.

Perseroan meyakini bahwa jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Rata-rata jangka waktu pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

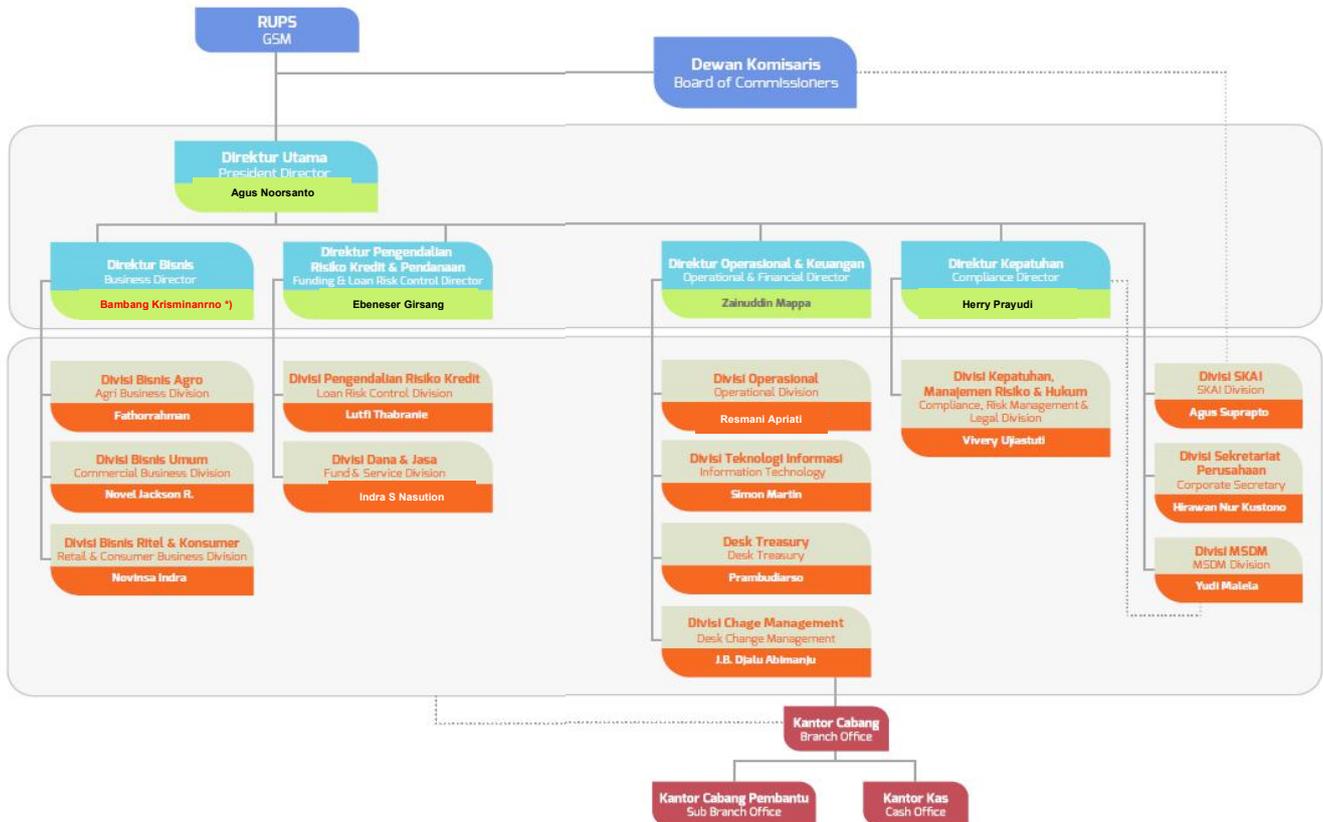
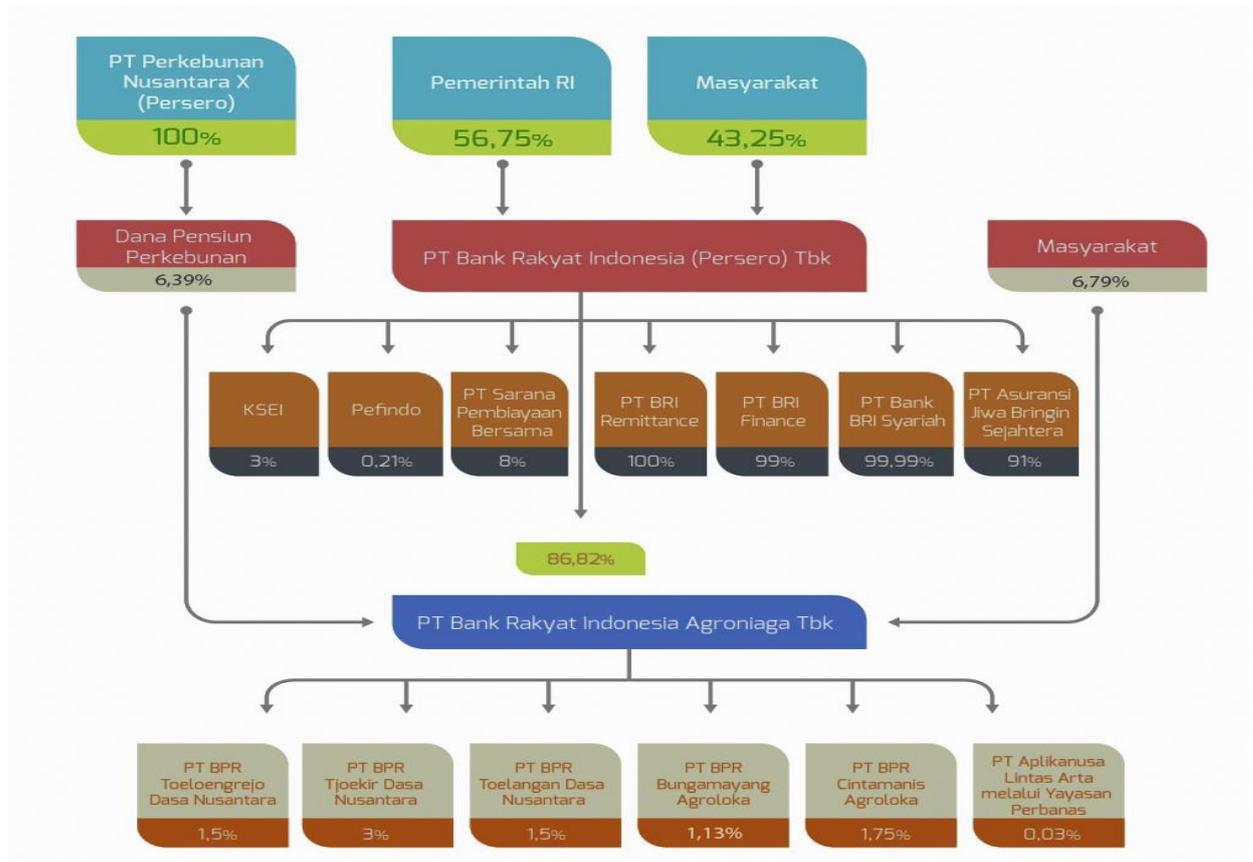
1. Asuransi bangunan dan inventaris kantor sekitar 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
2. Asuransi kendaraan bermotor paling lama 1 tahun.

J. ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap neto yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dimana pada posisi 31 Maret 2018 mencapai Rp264.134 juta yang meliputi kepemilikan atas 22 (dua puluh dua) bidang tanah dan bangunan, 1 (satu) hak milik atas satuan rumah susun, 71 (tujuh puluh satu) kendaraan roda empat dan 152 (seratus lima puluh dua) kendaraan roda dua.

Kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan telah diperoleh berlandaskan bukti perolehan hak yang sah yang melandasi penguasaan dan kepemilikan Perseroan atas harta kekayaan tersebut.

K. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN



*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

2. KEGIATAN USAHA

A. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan telah memulai kegiatan konsolidasi internal baik dari sisi sumber daya manusia, strategi bisnis maupun pengembangan jaringan. Selain fokus pada bidang usaha agribisnis, Perseroan juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 beberapa strategi fundamental Perseroan telah dilakukan, seperti penerapan budaya kerja perusahaan, penyempurnaan kebijakan manajemen dibidang SDM, pengembangan *Core Banking System* (BRI Agro Core Banking) dan penyempurnaan struktur organisasi yang mendorong kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu dari sisi usaha, Perseroan menetapkan Strategi KYD dan DPK sebagai berikut:

- 1 Dana Pihak Ketiga (DPK)
Mengurangi risiko konsentrasi yang saat ini masih tergantung pada beberapa deposit besar dengan cara mengembangkan sumber dana ritel. Selain itu, jaringan kantor pelayanan akan ditingkatkan termasuk jaringan layanan berbasis teknologi (e-channel).
- 2 Kredit Yang Diberikan (KYD)
Kredit yang diberikan (KYD) lebih difokuskan ke sektor agribisnis, terutama untuk sektor perkebunan dan membuka sektor bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM) lainnya. Bank juga akan terus menggiatkan kredit konsumen untuk karyawan dan pensiunan serta *linkage* program. Namun demikian, sektor selain agribisnis bank juga menyalurkan kredit terutama kredit untuk pembiayaan di bidang manufaktur dan sektor perdagangan.
- 3 Non Performing Loan (NPL)
NPL - bruto Perseroan per tanggal 31 Maret 2018 sebesar 2,24%. Perseroan terus berupaya mengelola NPL pada tingkat yang aman yaitu di bawah 3% dengan cara:
 - a. Pemberian kredit yang selektif dengan memperhatikan prinsip *prudential banking* dan *four eyes principle*;
 - b. Meningkatkan pembinaan dan monitoring yang berkesinambungan terhadap seluruh kredit yang telah diberikan;
 - c. Mengintensifkan penagihan;
 - d. Melakukan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah;
 - e. Mengupayakan penjualan aset yang dijamin sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah;
 - f. Litigasi.

Selain target tersebut di atas, Perseroan juga akan meningkatkan *fee base income* melalui kegiatan pembiayaan kredit, dana, jasa perbankan lainnya dan ekspor impor di sektor agribisnis dan bisnis umum.

Untuk meningkatkan profitabilitas, Perseroan memelihara *margin* bunga bersih (NIM) pada kisaran 3,5% - 5% dengan tingkat efisiensi yang dicerminkan oleh rasio BOPO pada level di bawah 85%. Perseroan juga tetap berkomitmen untuk menjaga fungsi intermediasi dan likuiditas (LDR) di atas 78% sampai dengan 92%.

Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah usaha bidang agribisnis. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis seperti, produk yang dapat dipergunakan untuk rencana *replanting* atas perkebunan dan produk persiapan pensiun bagi karyawan di bidang perkebunan. Selain itu, arah pengembangan jaringan kantor perseroan dikembangkan pada sentra agribisnis, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selain di Pulau Jawa.

B. UNIT BISNIS UTAMA

1. Pangsa Pasar Perseroan

Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU II berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang memposisikan sebagai bank fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis. Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko, Perseroan juga membiayai usaha diluar agribisnis.

Saat ini, pangsa pasar Perseroan dipasar Indonesia masih di bawah 1% baik untuk DPK maupun kredit per 31 Maret 2018. Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan meningkatkan peran jaringan kantor layanan berbasis teknologi (e-channel).

(dalam miliar Rupiah)

| KETERANGAN | PASAR | PERSEROAN | PANGSA PASAR |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| Kredit | 4.788.783 | 12.506 | 0,261% |
| DPK | 5.293.098 | 13.863 | 0,262% |

(Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2018)

Perseroan mempunyai ceruk pasar di bidang agribisnis yang telah ditekuni selama 28 tahun. Hal ini memberikan keunggulan akan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio kredit dibidang agribisnis.

Keunggulan lain yang sangat penting adalah kedekatan Perseroan dengan komunitas usaha pertanian yang sudah terjalin sangat panjang, terutama dengan PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV yang secara tidak langsung turut serta membidani kelahiran Perseroan.

Perseroan dalam pengembangan bisnis dan strategi perusahaan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
- Persaingan ketat di sektor perbankan dari sisi size (modal dan jaringan) serta pricing (produk pengumpulan dana dan penyaluran kredit).
- Munculnya alternative investasi yang lebih menarik seperti asuransi unit *linked*, reksadana, ORI dan lain-lain.
- Bank – bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya margin dan *opportunity*.

2. Cakupan Pemasaran

Cakupan pemasaran Perseroan diarahkan di sekitar Jaringan Kantor yang saat ini lebih banyak dikembangkan ke wilayah yang memiliki prospek agribisnis yang potensial terutama sektor ritel / UKM. Sampai dengan saat ini cakupan pemasaran meliputi Medan, Rantau Prapat, Riau, Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Pontianak, Bogor, Palembang, Cikarang, Solo dan Tangerang Selatan. Perseroan tidak memiliki anak perusahaan dan hanya memiliki penyertaan di 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Lampung dengan porsi kepemilikan saham kurang dari 5%.

Perseroan memandang perluasan wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi agribisnis terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi yang membukukan pertumbuhan agribisnis yang pesat. Di wilayah tersebut nasabah utama Perseroan antara lain, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan perkebunan swasta lainnya yang dapat membuka peluang pasar Perseroan untuk mengembangkan bisnis kepada petani plasma maupun rekanannya serta ke beberapa perusahaan swasta bidang agribisnis lainnya.

C. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)

Peran Teknologi Informasi dalam industri perbankan saat ini mempunyai posisi dan fungsi yang sangat strategis, karena bukan hanya sebagai *supporting*, Teknologi Informasi juga sebagai *strategic enabler* bagi bisnis Perseroan Sesuai dengan visi Divisi Teknologi Informasi, bahwa Perseroan diharapkan mampu dan tanggap dalam memadukan strategi bisnis dengan Teknologi Informasi terkini untuk mencapai kepuasan nasabah. Sehingga sejak tahun 2016, Divisi Teknologi Informasi telah menyusun dan melaksanakan proyek pengembangan Teknologi Informasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan uraian sebagai berikut :

Cash Management System (CMS)

Yaitu salah satu jenis layanan perbankan yang diperuntukkan bagi nasabah korporasi. Melalui layanan CMS ini nasabah dapat melakukan **transaksi perbankannya** secara mandiri di lokasi usahanya tanpa perlu datang ke Unit Kerja BRI Agro.

Mobile Banking

Yaitu salah satu layanan perbankan berbasis SMS yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Dengan layanan ini nasabah dapat melakukan transaksi perbankannya secara mandiri dari perangkat Hnad Phone (HP) yang dimilikinya. Nasabah leluasa untuk bertransaksi tanpa dibatasi jam kerja kantor.

Internet Banking

Yaitu salah satu layanan perbankan berbasis internet yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan. Melalui layanan ini nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja melalui HP dan/atau PC/Laptop.

Rencana Pengembangan

Sejak tahun 2015, Perseroan melakukan penyesuaian strategi teknologi informasi mengacu pada *Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2012 - 2015* dan untuk 4 (empat) tahun kedepan mengacu pada ITSP 2016-2019.

Pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil melakukan migrasi Core Banking Baru BRIAGRONETS sebagai pondasi Teknologi Informasi yang tangguh dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan bisnis perbankan yang cepat, efektif dan efisien yang terintegrasi dengan jaringan induk perusahaan yang luas. Berikutnya, beberapa langkah strategis perseroan dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi yang handal dan modern meliputi :

- 1) Mendukung Efisiensi Operasional, melaksanakan budaya *paperless* dan pengembangan *data warehouse* agar proses penyusunan dan penyampaian laporan tepat waktu dan akurat.
- 2) Mendukung Inovasi Produk, mempersingkat *time-to-market*, meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan produk perbankan berbasis teknologi informasi (electronic channel) sesuai dengan ekspektasi nasabah yang terus meningkat;
- 3) Menghilangkan ketergantungan terhadap pihak ketiga, melalui pengembangan dan penyempurnaan berbagai aplikasi secara mandiri maupun *joint-development* dengan BRI untuk mengurangi risiko operasional.

D. KOMUNIKASI PEMASARAN

Kegiatan komunikasi Perseroan diarahkan untuk mendukung proses transisi corporate image Perseroan menjadi bagian dari pengendali baru, selain untuk mendukung pemasaran produk Perseroan. Kegiatan ini diwujudkan melalui peningkatan brand awareness atas produk-produk Perseroan. Peningkatan brand awareness ditujukan kepada pasar ritel terutama di pasar sasaran yaitu sentra agrobisnis. Program besar yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi pemasaran mendukung produk tabungan dengan tema "Infiniti dan Multima". Kegiatan komunikasi selain melalui iklan media masa juga perubahan tampilan di kantor layanan. Adapun kegiatan

peningkatan penetrasi kredit terutama untuk kredit konsumsi yang dilakukan dengan perbaikan tema kampanye dan perwajahan media komunikasi dalam hal brosur-brosur produk. Selain itu, Perseroan juga melakukan komunikasi aktif dengan memberikan sponsor pada kegiatan/event yang langsung bersentuhan dengan target pasar, seperti kegiatan seminar, kegiatan pameran maupun kegiatan mudik bersama Pekerja yang menjadi target pasar.

Peningkatan *brand awareness* ditujukan kepada pasar ritel terutama di pasar sasaran yaitu sentra agrobisnis. Program besar yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi pemasaran mendukung produk tabungan dengan nama **Agrotama, program CMS, Mobile Banking dan Internet Banking**. Kegiatan komunikasi selain melalui iklan media masa juga perubahan tampilan di kantor layanan. Adapun kegiatan peningkatan penetrasi kredit terutama untuk konsumsi dilakukan dengan perbaikan tema kampanye dan perwajahan media komunikasi dalam hal brosur-brosur produk.

Selain itu, Perseroan juga melakukan komunikasi aktif dengan memberikan sponsor pada kegiatan/event yang langsung bersentuhan dengan target pasar, seperti kegiatan seminar, kegiatan pameran maupun kegiatan mudik bersama karyawan yang menjadi target pasar.

Pemasaran dan segmen pasar Perseroan.

Cakupan pemasaran Perseroan di arahkan disekitar Jaringan Kantor yang saat ini lebih banyak dikembangkan ke wilayah yang memiliki prospek agribisnis yang potensial terutama sektor ritel / UKM. Sampai dengan saat ini cakupan pemasaran meliputi Medan, Rantau Prapat, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Pontianak, Palembang, Bogor, Solo, Cikarang dan Tangerang Selatan.

Perseroan memandang perluasan wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi agribisnis terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi yang membukukan pertumbuhan agribisnis yang pesat. Di wilayah tersebut nasabah utama Perseroan antara lain, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Hutahaean Group, Sinar Mas Group, Sungai Budi Group dan perusahaan swasta besar lainnya yang dapat membuka peluang pasar Perseroan untuk mengembangkan bisnis kepada petani plasma, maupun rekanannya.

Kegiatan promosi yang dilakukan Perseroan.

Perseroan melakukan aktivitas promosi mengikuti pola pemasaran yang tersegmentasi terutama dari segi cakupan wilayah dimana kantor Perseroan berada. Sedangkan aktivitas promosi yang ditempuh lebih banyak menggunakan promosi langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah dan sedikit menggunakan media massa nasional. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebaran wilayah pemasaran yang terpecah namun belum seluruh wilayah di Indonesia terdapat kantor cabang Perseroan.

Beberapa aktivitas promosi yang dilakukan antara lain dengan meluncurkan program tabungan dan deposito berhadiah langsung, peluncuran CMS dan Mobile Banking, melakukan 'open table' di lokasi kantor nasabah maupun calon nasabah dan pada 'event' yang diadakan oleh nasabah, serta memasang iklan di media komunitas pertanian.

Strategi Pemasaran Tahun 2018

Agar mampu lebih memahami kebutuhan nasabah dan memberikan solusi keuangan secara tepat dan terarah, BRI Agro membagi pengelolaan dana menjadi 2 (dua) bagian yakni : bagian Pemasaran Produk Ritel dan Pemasaran Produk Korporasi.

1. Pemasaran Korporasi :

- Memfokuskan peningkatan dana korporasi non lembaga keuangan.
- Meningkatkan *cross selling product* simpanan dengan memanfaatkan *tricle down business* atas debitur-debitur potensial.

2. Pemasaran Ritel (Non Korporasi)

- Melakukan kegiatan penjualan.
- Melakukan aktivitas pemasaran secara agresif berupa program akuisisi, retensi maupun

- maintenance di lingkup nasional maupun regional.
- Melakukan strategi pemasaran produk yang tepat disesuaikan dengan potensi masing-masing unit kerja.
- Melakukan strategi pemasaran dengan mem-*bundling* produk pinjaman dan simpanan

E. JARINGAN DAN LAYANAN

Pengembangan jaringan terus dilakukan oleh Perseroan untuk menopang target pertumbuhan yang ingin dicapai. Sampai dengan bulan Maret 2018, Perseroan telah membuka 3 (tiga) unit kerja baru yaitu Kantor Cabang Utama – Jakarta, Kantor Cabang Bintaro - Tangerang Selatan dan Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah - Bekasi serta relokasi Kantor Cabang Pembantu Cik Ditiro ke daerah Tebet – Jakarta Selatan.

Tabel berikut menyajikan rincian tentang jaringan distribusi selama lima tahun terakhir:

| | 31 DESEMBER | | | | | MARET |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kantor Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kantor Cabang Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kantor Cabang | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Kantor Cabang Pembantu | 10 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 |
| Kantor Kas & <i>Payment Point</i> | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total kantor | 26 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 |

Catatan :

1. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S.24/PB.1/2017 tertanggal 3 Agustus 2017, Perseroan membuka Kantor Cabang Utama - Jakarta;
2. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-256/PB.12/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, Perseroan membuka Kantor Cabang Bintaro - Tangerang Selatan;
3. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-90/KR.02/2017 tertanggal 12 Desember 2017, Perseroan membuka Kantor Cabang Pembantu Harapan Indah - Bekasi;
4. Relokasi kantor Cabang Pembantu Cik Ditiro ke Tebet sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-28/PB.1211/2018 tertanggal 19 April 2018.

Sehingga jumlah Kantor Cabang Utama 1, Kantor Cabang menjadi 17 dan Kantor Cabang Pembantu menjadi 20..

i. Kantor Pusat

Kantor pusat adalah titik utama dalam organisasi Perseroan dan terletak di Gedung BRI Agro. Jl. Warung Jati Barat No.139, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran. Jakarta Selatan.

ii. Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Kantor Cabang Perseroan dibagi Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Setiap cabang, tanpa memperhatikan klasifikasinya, beroperasi secara indenpenden dari cabang lainnya. Cabang memiliki level yang berbeda untuk kewenangan memutus kredit tergantung dari klasifikasi masing-masing cabang.

Setiap kantor cabang mengawasi kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berada dibawah wewenangnya. Kantor cabang pembantu menawarkan produk-produk yang sama dengan yang dimiliki kantor cabang tapi memiliki tingkat kewenangan memutus kredit yang lebih terbatas. Sementara itu, kantor kas lebih terfokus pada pengumpulan dana pihak ketiga dari sektor ritel dan menyediakan layanan terkait uang tunai kepada nasabah.

Jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas dan Title Hak

| No. | Status Kantor | Nama Kantor | Alamat Kantor | Title Hak dan Luas Tanah/Bangunan | Kepala Kantor |
|-----|---------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| 1. | Kantor Pusat | Kantor Pusat | Gedung BRI Agro. Jl. Warung Jati Barat No.139, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran. Jakarta Selatan. | Milik Sendiri HGB No. 1466/ Kalibata Luas : 103 m ² , HGB No. 1027/ Kalibata Luas : 2.527 m ² , HGB No. 1372/Kalibata Luas : 195 m ² , HGB No. 1349/Kalibata Luas 105 m ² , HGB No. 1418/Kalibata, luas 136 m ² | Direksi |
| 2 | Kantor Cabang Utama | Kantor Cabang Utama Jakarta | Gedung BRI Agro. Jl. Warung Jati Barat No.139, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran. Jakarta Selatan. | Menginduk Kantor Pusat | Sabir Azis |
| 3. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Kuningan | Plaza Agro, Jl. H.R. Rasuna Said X-2 No. 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan | Sewa menyewa Ruang Perkantoran Luas :292 m ² | Suharno |
| 4. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Bandung | Jl. Abdul Rivai No 2B RT.05 RW. 1, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Tamansari, Bandung | Milik sendiri HGB No. 145/Kelurahan Taman Sari, luas 260 M ² | Anton Sugiharto |
| 5. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Semarang | Jl. Jl. MT Haryono No. 970 Ruko Metro Plaza A-2, Kota Semarang | Sewa menyewa bangunan Luas tanah :622 m ² | Sudjarwoko |
| 6. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Surabaya | Jl. Tais Nasution No. 27 Surabaya | Sewa menyewa Bangunan Luas :225,30 m ² (Lantai Dasar), dan 220,30 M ² (Lantai Mezzaine) | Gabriel Hendra |
| 7. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Medan | Jl. Iskandar Muda Ruko Premier No. 10 dan 11, Medan, Sumatera Utara | Milik Sendiri HGB No. 230/Babura Luas : 123 m ² , HGB No. 229/ Babura Luas : 123 m ² | Erwind A.O. Damanik |
| 8. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Pekanbaru | Jl. Jendral Sudirman No. 231, Pekanbaru | Sewa gedung PT. Pos Indonesia (Persero) Luas bangunan : | Jaya Pratama Silalahi |

| | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------|--|--|---------------------|
| | | | | 336 m ² | |
| 9. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Jambi | Jl. Hayam Wuruk RT 23, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Jambi | Sewa bangunan ruko Luas : 314 m ² | Siska Rosidaningrum |
| 10. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Bandar Lampung | Jl. Raden Intan No. 104 B-C, Tanjung Karang, Bandar Lampung | Sewa 2 unit bangunan ruko (1) Luas : 130 m ² (2) Luas : 121m ² | Achmad Farouk |
| 11. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Rantau Prapat | Jl. Jend. Ahmad Yani No 135 F, Rantau Prapat Sumatera Utara | Sewa ruko 3 lantai Luas : 136 m ² | Akhsin Suyito |
| 12. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Balikpapan | Jl. Jendral Sudirman No. 319 Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan | Sewa bangunan Luas : 544 m ² | Ichsan Aldian |
| 13. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Makassar | Jl. Slamet Riyadi No 14 Ujung Pandang, Makassar | Sewa Rumah Dinas PTPN XIV Seluas 328 m ² | Buhana Lewa |
| 14. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Bogor | Jl. KS. Tubun No. 59F RT.003/ RW.002 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor | Milik sendiri HGB No. 111/ Kelurahan Cibuluh Luas : 224 m ² | As'ari |
| 15. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Palembang | Jl. Kol. H. Burlian No. 1458 A-B RT. 25 RW. 04 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Kota – Palembang | Milik sendiri HGB No. 15 dan No. 16/Kelurahan Sukabangun Luas : 268 m ² | Torang Sirait |
| 16. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Pontianak | Jl. Jenderal A. Yani Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 34 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak | Sewa ruko 3,5 lantai Luas : 248 m ² | Posma Simangunso ng |
| 17. | Kantor Cabang | Kantor Cabang Solo | Jl. Slamet Riyadi No. 330 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta – Solo | Sewa bangunan 3 lantai Luas : 202 m ² | Selamat Riadi |
| 18 | Kantor Cabang | Kantor Cabang Cikarang | Jl. Jababeka Raya, Kawasan Permata Junction Blok B.05, RT.05 RW. 06 Kel. Pasir Gombong Kec. Cikarang Utara, Bekasi | Milik Sendiri HGB No. 986/Pasir Gombong Luas : 105 m ² | Sugiyardono |
| 19 | Kantor Cabang | Kantor Cabang Bintaro | Ruko Sentra Menteng Blok B7/MN-88F, Bintaro Jaya Sektor VII Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Jaya | Sewa Bangunan Gedung luas : 292 m ² | Dadang Rukman K. |

| | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | Kota Tangerang | | |
| 20. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Jamsostek | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79, RT 008 RW 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan | Sewa ruangan gedung Luas : 153,63 m ² | Wiwik Waluyanti |
| 21. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Depok | Jl. Margonda Raya No. 198 A, RT 003 RW 008, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok. | Milik sendiri HGB No. 300/Kemiri Muka/2002 Luas : 94 m ² | Ferri Aryudha |
| 22. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Kebayoran Lama | Jl. Kebayoran Lama RT.001 RW. 013 Grogol Utara, Jakarta Selatan | Sewa Kantor Luas : 455 m ² | Widowati Nur Utami |
| 23. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Bekasi | Komp. Ruko Ramayana Jl. Ir. H. Juanda Blok A-4 No. 03 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi | Milik sendiri HGB No. 11811/Kelurahan Duren Jaya Luas : 92 m ² | Jaya Simatupang |
| 24. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Tangerang | Jl. Merdeka Raya No. 149 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci, Tangerang | Sewa ruko Luas tanah : 160 m ² | Ronald Romambang |
| 25. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem A.R. Hakim, Medan | Jl. A.R Hakim No. 153, Sukarame, Medan | Milik Sendiri HGB No. 26/Tegal Sari III Luas : 124 m ² | Arief Rachmad Riandi |
| 26. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Kasikan | Desa Kasikan Dusun 4, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar | Milik Sendiri HGB No. 00003 / Kasikan seluas :238 m ² | Reza Najib Hidayat |
| 27. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Lubuk Dalam | Jl. Pertamina, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Siak | Milik Sendiri HGB No. 05/ Lubuk Dalam Luas : 200 m ² | Bardiansyah |
| 28. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Ujung Batu | Jl. Jend Sudirman No. 100, Ujung Batu, Rokan Hulu Riau | Sewa Bangunan Luas : 154 m ² | Budi Utomo |
| 29. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Kelapa Gading | Jl. Boulevard Raya Blok CN. 1 Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta | Milik sendiri Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 345/I-II/B Kelurahan Kelapa Gading Timur Luas : 175,065 m ² | Sony Junianto |
| 30. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Banyu Manik | Jl. Sukun Raya No. 41 (Ruko) A-1, Srandol Wetan, Semarang | Sewa bangunan Luas : 135 m ² | Arief Abdali |

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|--|---------------------|
| 31. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Air Molek | Jl. Jend Sudirman Air Molek I, Kab. Indragiri Hulu, Riau | Sewamenyewa bangunan Luas : 180 m ² | Anggi Widiyatmoko |
| 32. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Bandar Jaya | Jl. Proklamator Raya No. 133 A Terbanggi BEsar, Bandar Lampung | Sewa menyewa bangunan Luas : 170 m ² | Safwira Guna Putra |
| 33. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Sidoarjo | Jl. H. Sunandar Priyo Sudarmo RKA. 06 RT 16 RW 05 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | Milik sendiri HGB No. 643/Desa Larangan Luas : 108 m ² | Dwi Suprih |
| 34. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Pematang Siantar | Jl. Asahan Kompleks Megaland Blok A No. 45 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar | Sewa menyewa bangunan Luas : 200 m ² | Beni Adam |
| 35. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Tebing Tinggi | Jl. Jend. Sudirman No. 405 C, Tebing Tinggi Barat, Sumatera Utara | Milik sendiri HGB No. 60/Kelurahan Sri Padang Luas: 88 m ² | Abdul Hanan |
| 36. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Ciputat | Jl. Ir. Juanda No. 114, Cempaka Putih, Kota Tangerang Selatan | Milik Sendiri HGB No. 01495 / Cempaka Putih Luas : 105 m ² | Ida Krisnawati |
| 37. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Gresik | Jl. RA Kartini No. 216, Gresik Jawa timur | Sewa Ruang Kantor seluas 100 m ² | Mayer Fortuna |
| 38. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Harapan Indah | Komplek Ruko Sentra Niaga I No. SN2/10 D/A. Jl. Boulevard Hijau Harapan Indah Kel, Pejuang Kec, Medan Satria, Kota Bekasi | Sewa ruangan kantor Luas : 214,5 m ² | Deddy Effendi |
| 39. | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Capem Tebet | Jl. Tebet Raya No.11 E, RT 020/RW 001, Kel. Tebet, Kec. Tebet. Jakarta Selatan | Sewa ruangan kantor Luas : 278 m ² | Nina Erlina |
| 40. | Kantor Kas | Kantor Kas Dalu- Dalu Emplacement Perkebunan Kelapa Sawit PT Hutahaean | Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | Sewa Ruang Kantor Luas : 54 m ² | Philip Sitompul |
| 41. | Kantor Kas | Kantor Kas Teluk Sono Emplacement Perkebunan Kelapa Sawit | Desa Teluk Sono, Bonai Darussalam, Rokan Hulu Riau | Sewa Ruang Kantor Luas : 78 m ² | Abraham Yulistiandi |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|---|--|---------------|
| | | PT Hutahaean | | | |
| 42. | Kantor Kas | Kantor Kas PTPN IX Semarang | Jl. Mugas Dalam, Semarang | Sewa ruangan kantor Luas: 28 m2 | Indra Bakti |
| 43. | Kantor Kas | Kantor Kas Deptan Kementerian Pertanian, Gedung E Lantai Dasar | Departemen Pertanian, Gedung E Lantai Dasar, Jl. RM Harsono No. 3 Jakarta | Sewa ruangan kantor Luas lantai : 87,5 m ² | Dian Nilawati |

iii. ATM dan Kartu ATM

Per tanggal 31 Maret 2018, Perseroan memiliki 15 unit mesin ATM yang beroperasi dengan sistem Bank BRI, 1 unit mesin ATM disewa dari pihak ketiga dan menggunakan 36 unit Mesin ATM dari Bank BRI sehingga nasabah dapat bertransaksi di ATM BRI serta bekerja sama dengan jaringan ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemegang kartu ATM Perseroan dapat menggunakan ATM Perseroan dan ATM BRI serta ATM Bank yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama untuk menarik dana, memeriksa saldo dan transfer dana antara rekening tabungan termasuk rekening antar nasabah.

F. PENGELOLAAN RISIKO DAN KEPATUHAN

Perseroan menghadapi berbagai jenis risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman, simpanan dan bisnis lainnya, termasuk risiko yang terkait lingkungan operasional. Risiko utama yang Perseroan hadapi adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga, risiko trading dan risiko nilai tukar), risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko hukum, serta risiko reputasi. Tujuan Perseroan dalam pengelolaan risiko adalah untuk memastikan bahwa Perseroan memahami, mengukur dan memantau berbagai risiko yang timbul dan memastikan Perseroan mematuhi kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada untuk mengelola risiko-risiko ini.

Program Kerja Manajemen Risiko

Program kerja dan implementasi manajemen risiko sampai dengan bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan *review* dan *update* atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) Bank.
- b. Melakukan *review* dan *update* atas SK Komite Manajemen Risiko
- c. Melakukan *review* dan *update* atas Kebijakan *Contingency Funding Plan*
- d. Melakukan *review* dan *update* atas Kebijakan *Stress Test*
- e. Melakukan *review* dan *update* atas Limit Transaksi *Dealer*
- f. Membuat dan melakukan implementasi pengukuran risiko operasional dengan metode RCSA (Risk Control Self Assessment) secara *online* keseluruhan unit kerja
- g. Implementasi dan *refreshment* metode risiko operasional RCSA (Risk Control Self Assessment) di beberapa Kantor Cabang sebagai salah satu alat untuk meningkatkan *risk awareness* kepada seluruh karyawan dan satuan kerja.

Dalam menerapkan manajemen risiko Perseroan, langkah-langkah mitigasi risiko adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Risiko Kredit

Pengelolaan dan pengendalian risiko kredit dilakukan dengan upaya:

- a. Mengendalikan risiko, yaitu dengan cara melakukan pembatasan eksposur dan tindakan perbaikan sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.
- b. Menerapkan *four eyes principles* pada proses pemberian kredit.

- c. Menerapkan internal *credit risk rating* dan *credit risk scoring* sebagai salah satu alat pengukuran dan pemantauan (monitoring credit) dengan cara mendeteksi secara lebih awal debitur yang berpotensi cidera janji (default).
2. **Manajemen Risiko Pasar & Risiko Likuiditas**

Pengukuran risiko pasar dan risiko likuiditas dilakukan melalui analisis terhadap pemicu munculnya risiko (risk driver), yaitu suku bunga dan nilai tukar. Pengelolaan dan pengendalian risiko pasar dan risiko likuiditas dilakukan dengan pemantauan posisi gap (liquidity gap, repricing gap), IRRBB (Interest Rate Risk on Banking Book) dan PDN (Posisi Devisa Neto).
 3. **Manajemen Risiko Operasional**

Pengelolaan dan pengendalian risiko operasional berguna untuk meningkatkan kesadaran setiap karyawan di seluruh kantor, meliputi :

 - Limit dan kewenangan transaksi dan aktivitas kantor.
 - Pengetahuan prosedur operasional dengan titik berat pada area-area *high risk* dan *high volume*.
 - Pengetahuan fitur dan risiko produk-produk yang ada.
 - Pemahaman terhadap aspek KYC.
 4. **Manajemen Risiko Strategik**

Pengelolaan dan pengendalian risiko strategik dengan cara melaksanakan proses pengendalian terhadap rencana strategis dan rencana bisnis. Hal ini bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.
 5. **Manajemen Risiko Hukum**

Pengelolaan dan pengendalian risiko hukum dilakukan melalui :

 - Peninjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain.
 - Pengembangan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi secara berkelanjutan.
 6. **Manajemen Risiko Kepatuhan**

Pengelolaan dan pengendalian risiko kepatuhan berguna untuk memitigasi risiko tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan cara memastikan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada semua aktifitas fungsional bank.
 7. **Manajemen Risiko Reputasi**

Risiko reputasi yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif dan informasi yang tidak tepat terkait persepsi terhadap bank. Pengelolaan dan pengendalian risiko reputasi mengatasi keluhan nasabah, keterbukaan informasi yang memadai.

G. Good Corporate Governance (GCG)

Seiring dengan ketetapan langkah untuk bertransformasi, Perseroan senantiasa melengkapi berbagai pranata organisasi dan membangun mekanisme pengelolaan bisnis yang andal. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan secara konsisten.

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Bagi Perseroan, penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. Selama triwulan pertama tahun 2018 dan berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan mendapatkan Peringkat “2” dengan definisi Peringkat yaitu mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum “Baik” sehingga kami simpulkan hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko ini, masuk kategori matrik peringkat “2”.

Bank memfokuskan perhatian yang tinggi pada implementasi tata kelola perusahaan yang baik antara lain tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Surat Keputusan Direksi No.Kpts.B.32/Dir.01.03/KMRH/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain dengan memberikan tanggapan dan saran atas laporan kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi.setiap bulan. Disamping itu Dewan Komisaris juga secara berkala (mingguan) mengadakan rapat / diskusi dengan Manajemen. Kunci untuk mendengar langsung permasalahan yang terjadi dan memberikan saran / rekomendasi untuk perbaikan.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Komite Audit membahas hasil laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit-unit kerja baik di kantor pusat dan kantor cabang. Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko dan kepatuhan di Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi dan memberikan masukan untuk kebijakan nominasi.

Peranan BRI Agro ke depan mempunyai peran yang strategis dalam sektor agribisnis, maka Dewan Komisaris menyarankan kepada jajaran Direksi untuk mempersiapkan Sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mampu menjawab tantangan tersebut, karena peluangnya yang masih terbuka luas dan merupakan salah satu fokus Pemerintah saat ini untuk meningkatkan dan membangun sektor pertanian.

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk dapat meningkatkan kinerja dan berpegang pada regulasi yang ditetapkan serta prinsip tata kelola yang baik agar dapat tumbuh sehat dan berkesinambungan.

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan berdampingan memberi nasihat di bidang kebijakan dan operasional kepada Direksi Perseroan melalui rapat berkala setiap bulan, surat-surat dan rekomendasi sesuai dengan kapasitas serta kewenangannya.

Dari semua itu, merupakan elemen fundamental yang mengacu kepada *international best practices*. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan melakukan implementasi GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan memfasilitasi *value driver* untuk bekerja optimal. Hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*).

H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Kehadiran Perseroan sebagai warga masyarakat yang baik diimplementasikan secara konsisten melalui program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) guna mewujudkan misi Perseroan sebagai bank komersial yang fokus pada sektor pertanian dalam mendukung pengembangan agrobisnis di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat terlibat mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan operasional Perseroan. Secara garis besar kegiatan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu:

Perlindungan Nasabah melalui penerapan sistem transparansi informasi produk hingga pembentukan struktur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia sebagai berikut :

- a. No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah,
- b. No. 7/6/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank,
- c. No. 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan terkait perlindungan nasabah dilaksanakan dengan penerapan sistem transparansi informasi produk hingga pembentukan struktur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sampai ketingkat mediasi perbankan.

Transparansi produk perbankan dilakukan dengan menyediakan informasi tertulis bagi nasabah mengenai karakteristik produk (manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk serta biaya-biaya yang melekat pada produk Giro, Tabungan, Deposito, Transfer dan lain-lain) berupa brosur, penyampaian karakteristik produk dalam aplikasi/ formulir produk, maupun penempatan informasi melalui papan pengumuman nasabah di setiap unit kerja.

Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah selama tahun 2017 telah ditangani dan diselesaikan secara tepat waktu, dimana Perseroan menetapkan prosedur bahwa semua pengaduan nasabah harus diselesaikan paling lambat 20 hari kerja dengan masa perpanjangan 20 hari kerja. Adapun pengaduan nasabah yang diterima selama sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 2,495 pengaduan dan seluruhnya dapat diselesaikan dalam batas waktu 20 hari kerja. Selain itu, sampai dengan 31 Maret 2018 tidak terdapat pengaduan nasabah yang diselesaikan melalui mediasi institusi perbankan.

Pengembangan Komunitas yang dilakukan sejak tahun 2010 dengan membentuk wadah aktivitas pengembangan komunitas dengan mengikutsertakan karyawan Perseroan baik sebagai donatur maupun relawan dengan nama "Perseroan Peduli" dengan kegiatan bakti sosial untuk korban bencana kebakaran, buka puasa bersama anak yatim di seluruh kantor cabang Perseroan dan sumbangan pembangunan rumah ibadah.

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa:

1. Ciptaan atas Seni Logo "BANK BRI AGRO" berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor C00201403940 tertanggal 13 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 069999 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan; dan
2. Etiket Merek "BRI AGRO + LOGO" (merupakan satu penamaan) berdasarkan Sertifikat Merek dengan tanggal penerimaan 14 Agustus 2012, nomor pendaftaran IDM000484266 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 untuk kelas barang / jasa 36.

Saat ini Perseroan telah mendaftarkan Logo barunya "BRI Agro + LOGO" Kelas Jasa 36, dengan Nomor Permohonan J002016046688 tanggal 30 September 2016, yang sampai dengan tanggal prospektus ini masih dalam proses Pemeriksaan Formalitas Permohonan Pendaftaran Merek sebagaimana disampaikan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. HKI.4-HI.06.01-466.

3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

A. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik pada Triwulan I 2018. Pertumbuhan ekonomi meningkat disertai dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi meningkat ditopang ekspor dan investasi yang membaik ditengah konsumsi yang tetap kuat. Sementara itu, stabilitas makroekonomi terjaga dengan baik sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang menurun dan nilai tukar Rupiah yang bergerak stabil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 meningkat didukung oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, serta perbaikan ekspor dan kinerja investasi. Perekonomian tercatat tumbuh sebesar 5,02% (yoy), membaik dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,88% (yoy). Kondisi sistem keuangan tetap stabil didukung oleh ketahanan industri perbankan dan stabilitas pasar keuangan yang terjaga. Pada Desember 2017, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat sebesar 22,7% dan rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 2,9% (gross) atau 1,2% (net). Selama periode Januari-Desember 2017, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial telah dapat menurunkan suku bunga deposito 122 bps dan suku bunga kredit sebesar 79 bps. Sementara itu, pertumbuhan kredit Desember 2017 sebesar 7,9% (yoy) sejalan dengan masih lambatnya perkembangan ekonomi dunia. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Desember 2017 tercatat sebesar 9,6% (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Desember 2017).

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (BI, Maret 2018), kredit pertanian (termasuk industri penunjangnya) posisi bulan tahun 2018 masih cukup kecil yaitu mencapai sebesar Rp57.193 miliar atau hanya 4,77% dari total kredit perbankan. Masih rendahnya kredit pertanian bukan berarti bahwa sektor ini kapasitasnya kecil, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik bruto yang mencapai $\pm 14,45\%$ (Sumber BPS).

Ditinjau dari variabel di atas tentunya kredit sektor pertanian yang menjadi fokus usaha Perseroan sangat potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian berbasis ekspor seperti perkebunan dan usaha turunannya. Di samping itu akses petani terhadap pembiayaan perbankan masih relatif rendah sehingga memberikan peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan penetrasi pasar lebih kuat.

Segmen Bisnis Menengah I

Kontribusi kredit sektor agribisnis telah memberikan porsi 54% dari portifolio kredit bank. Potensi pengembangan portofolio kredit sektor agribisnis masih terbuka lebar untuk dikembangkan mengingat negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Bank akan tetap melakukan pengembangan bisnis ke sektor agribisnis walaupun harga komoditi sangat fluktuatif. Sektor agribisnis yang telah dikembangkan di Bank mulai dari hulu, *on farm*, hilir dan juga jasa/suporting bisnis. Strategi pengembangan bisnis disektor agribisnis ke BUMN yang sehat dan swasta besar serta kepada nasabah yang telah bermitra dengan Bank BRI Grup. Pengembangan bisnis untuk pembiayaan kepada plasma (koperasi) yang merupakan mitra kerja dari grup usaha perkebunan besar merupakan sasaran utama Bank. Hal ini dengan harapan perusahaan inti sebagai off taker dan juga sebagai penjamin atas kewajiban plasma kepada Bank.

Sektor agribisnis kedepan akan lebih baik terutama pengembangan komoditi minyak kelapa sawit dan turunannya karena merupakan komoditi strategis Indonesia. Disamping itu adanya kebijakan pemerintah untuk moratorium ijin usaha perkebunan sawit dan restorasi lahan gambut, kedepan kinerja perkebunan sawit dan turunannya akan lebih dan harga kebun akan meningkat. Bank akan lebih fokus untuk pengembangan bisnisnya kepada komoditi sawit dan turunannya.

Segmen Bisnis Ritel dan Konsumer

Usaha Kecil dan Menengah berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tercermin dari jumlah usaha atau dari penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Perseroan juga akan turut berperan serta lebih besar di dalam pembiayaan produktif sektor Usaha Kecil dan Menengah dengan batasan pengembangan sektor UKM dimaksud disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Produk Bisnis Ritel dan Konsumer

Produk-produk penyaluran pembiayaan segmen ritel di tahun 2017 secara berkala dilakukan evaluasi dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran (customer needs) perseroan.

Produk kredit Ritel yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kredit Segmen Ritel
 - a) Kredit Modal Kerja
 - Pinjaman Rekening Koran (PRK)
 - Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)
 - Pinjaman Tetap Reguler (PTR)
 - b) Kredit Investasi
 - Sebelum/Masa Pembangunan
 - Setelah Masa Pembangunan
2. Kredit Ritel Program
 - Kredit Usaha Rakyat
3. Kredit Uncommitted Line
 - Bank Garansi
 - LC/SKBN

Produk Kredit segmen konsumer yang dimiliki saat ini adalah sebagai berikut:

- Agro Griya
- Agro Mobil
- Kredit Pegawai Tetap
- Kredit Pensiun
- Kredit Santunan Hari Tua
- Kredit Multiguna

Produk-produk kredit ritel maupun kredit konsumer telah dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar sehingga kontribusi produk dimaksud dalam portofolio bisnis sudah mulai bertumbuh.

Produk-produk pembiayaan di atas dikembangkan untuk menjangkau sektor bisnis dalam skala UKM untuk dapat memberikan kontribusi positif dengan volume portofolio yang semakin seimbang dengan sektor bisnis lainnya.

Strategi Bisnis Ritel & Konsumer

a. Strategi Umum

Merupakan garis besar dalam menciptakan perangkat bisnis yang mapan dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan pada umumnya, antara lain :

- (i) Melakukan ekspansi bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan komposisi antara bisnis Agro maupun non-Agro (bisnis Umum).
- (ii) Optimalisasi *outlet* (unit kerja) Cabang dan Capem melalui penetapan RBB berbasis potensi wilayah.
- (iii) Pembukaan Kantor Layanan baru berbasis *e-channel* di lokasi-lokasi yang representatif.
- (iv) Peningkatan kualitas dan kuantitas PKL (Pejabat Kredit Lini).

- (v) Menciptakan produk-produk bisnis yang potensial dengan menitikberatkan pada *risk assesment dan risk mitigation*.
- (vi) Menerapkan sistem monitoring yang lebih efektif dan efisien.

b. Strategi Khusus (Pengembangan Bisnis)

Merupakan langkah-langkah spesifik yang dilakukan untuk pengembangan bisnis ritel dan konsumen, antara lain :

(i) Kredit Segmen Ritel

Sektor UKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu sektor UKM juga telah mengambil peran penting dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Sektor UKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Bagi Perseroan, peningkatan penyaluran pembiayaan terhadap sektor UKM menjadi salah satu fokus bisnis ditahun 2017 dan 2018 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hingga akhir triwulan I 2018, Sektor Usaha Ritel memiliki kontribusi sebesar 28,63% dalam portofolio bisnis perseroan. Segmen ritel terbagi atas Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan kredit konsumtif yang secara total terealisasi sebesar Rp3,58 triliun atau tumbuh sebesar 67,12% dibanding tahun lalu atau secara rerata tertimbang selama 5 tahun (CAGR – compound annual growth rate tumbuh 51,62%). Pertumbuhan segmen ritel terutama didominasi oleh kredit investasi yang sampai dengan akhir Maret 2018 tumbuh sebesar 88,86%, dari semula tercatat sebesar Rp1,33 triliun pada Maret 2017 sampai dengan Maret 2018 menjadi sebesar Rp2,52 triliun pada akhir Maret 2018. Selanjutnya diikuti dengan kredit modal kerja yang juga tumbuh 31,90%, dari semula tercatat sebesar Rp802,35 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1,06 triliun pada akhir Maret 2018.

Strategi Segmen Ritel

Pengembangan strategi bisnis ritel masih berorientasi pada sektor agrobisnis maupun umum dengan menyesuaikan kepada PS-KRD (Pasar Sasaran dan Kriteria Risiko yang dapat diterima Bank) yang telah ditetapkan di Perseroan. Strategi pengembangan bisnis ritel dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu Jaringan Bisnis, SDM dan Produk & Mitigasi. Masing-masing kategori tersebut memiliki rencana strategis yang akan dilaksanakan secara teknis untuk memenuhi tuntutan perkembangan bisnis ritel, sebagai berikut :

- 1. Jaringan Bisnis**, Optimalisasi Unit Kerja eksisting, Pembukaan jaringan/unit kerja baru, Mapping bisnis per-wilayah kerja, Pemanfaatan Jaringan Bisnis Debitur Eksisting, Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan milik Negara, Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan swasta besar¹⁴⁷
- 2. SDM** , Meningkatkan kualitas kredit dengan bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam pemenuhan formasi tenaga pemasar di semua kantor cabang/capem, pelaksanaan pendidikan bagi Account Officer, Wapinca, Pincapem dan Pinca, menerapkan insentif berbasis kinerja dan menerapkan RSK (Rencana Sasaran Kerja).
- 3. Produk & Mitigasi:**
Optimalisasi produk-produk bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar yang bersaing dan berbasis collateral, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan penjamin kredit dan Asuransi sebagai second way out, serta melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi dari Pemerintah.^{6,956}

Selain itu, pengembangan bisnis ritel lainnya yang masih merupakan bagian dari bisnis ritel adalah Kredit Program, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :

1. Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan inti yang telah menjadi Debitur Perseroan.
2. Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan BUMN (PTPN dan lain-lain)

3. Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan swasta besar (Asian Agri Group dan lain-lain).
4. Melakukan perluasan/ekspansi pembiayaan diluar komoditi perkebunan, seperti pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kompetensi SDM.
5. Optimalisasi target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi dari Pemerintah.

(ii) Kredit Segmen Konsumer

Dalam rangka pembiayaan untuk segmen konsumer, BRI Agro menyediakan beberapa produk kredit yakni; Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Multi Guna, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Konsumer lainnya. Secara total, realisasi kredit segmen konsumer pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp657 miliar, atau mengalami penurunan 8,51%, dari semula tercatat sebesar Rp718 miliar pada tahun 2016. Penurunan kredit segmen konsumer terutama dipengaruhi oleh penurunan kredit multi guna yang menurun 19,47% dari semula tercatat sebesar Rp45 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp36 miliar pada akhir tahun 2017. Rendahnya daya beli masyarakat serta lemahnya permintaan kredit yang terjadi di sepanjang tahun 2017 merupakan salah satu faktor penyebab penurunan kredit segmen konsumer.

Strategi Segmen Konsumer

Beberapa strategi untuk segmen konsumer adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan penyaluran pinjaman kredit karyawan kepada karyawan perusahaan BUMN dan Swasta di seluruh unit kerja BRI Agro
- Melakukan pemasaran kredit karyawan/SHT kepada perusahaan anak/group usaha Bank BRI.
- Menerapkan skim kredit kepemilikan kendaraan bekerjasama dengan perusahaan multifinance (channeling /executing) atau dengan dealer-dealer tertentu.
- Melakukan kerja sama dengan Developer yang memiliki bonafiditas yang baik terkait pemasaran dan penjualan produk Agro Griya dengan memberikan discount program.
- Melakukan benchmark produk Agro Griya, Agro Mobil dan Multiguna guna meningkatkan nilai jual kepada calon debitur dan berdaya saing dengan bank lain.
- Memanfaatkan dan menggali potensi pembiayaan bisnis konsumer melalui trickle down bisnis debitur eksisting baik korporasi maupun ritel dan konsumer.
- Memberikan promo dan gimmick dalam penyaluran kredit konsumer pada event- event tertentu setiap periode.
- Pemasaran intensif produk kredit karyawan produktif kepada perusahaan mitra, BUMN dan perusahaan swasta besar lainnya.
- Melakukan pemasaran kredit multiguna khususnya bagi karyawan perusahaan yang telah menjadi debitur eksisting atau debitur eksisting yang membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif dengan jangka waktu yang relatif pendek.
- Ikut serta dalam event-event yang dibuat oleh Perusahaan Pengembang maupun Authorized Dealer.

Segmen Bisnis Umum

Perseroan selain mengembangkan pembiayaan agrobisnis yang menjadi fokus usaha, juga mengembangkan bisnis umum dengan fokus pada bisnis umum yang terselektif dan tahan terhadap guncangan bisnis. Pengembangan bisnis umum dimulai pada tahun 2012 yang meliputi pembiayaan kepada rekanan BUMN, sektor perdagangan, jasa dan pariwisata (hotel), *multifinance* serta lain-lain dimana dalam pelaksanaannya ekspansi kredit bisnis umum juga disinergikan dengan strategi dalam rangka mendukung pengembangan bisnis ritel dengan cara membuka pada peluang *trickle down* bisnis bank baik funding dan maupun lending. Secara strategis pengembangan bisnis Perseroan maka diharapkan porsi bisnis umum dapat mewujudkan pencapaian maksimal sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Selain itu, juga dikembangkan pembiayaan kepada Bank Perkreditan Rakyat dengan pola *linkage* program.

Kontribusi profitabilitas Bisnis Umum Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan *trend* tingkat suku bunga pasar, dengan produktifitas per 31 Desember 2017 sebesar 12,36%, Desember tahun 2016 sebesar 12,70 %. Produktifitas tersebut seiring dengan perkembangan *Cost of Fund* Perseroan sehingga bunga kredit untuk segmen menengah bisa bersaing dengan bank lainnya.

Prospek Bisnis

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Nasional berada pada kisaran 5,1% - 5,6% di tahun 2018, yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang tetap kuat. Selain itu pertumbuhan kelas menengah Indonesia dan peningkatan komposisi penduduk pada usia produktif memberikan optimisme akan arah perkembangan dan prospek bisnis perbankan Nasional. Memperhatikan perkembangan tersebut, Perseroan akan mengupayakan pengelolaan jasa keuangan dengan lebih baik dan kuat terutama dalam permodalan. Selain fokus pada bidang usaha agrobisnis, Perseroan juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari sisi usaha penghimpunan dana, Perseroan menetapkan arah dengan upaya mengurangi risiko konsentrasi yang saat ini masih tergantung pada beberapa deposit besar dengan cara mengembangkan sumber dana ritel yang antara lain melalui penambahan jaringan kantor pelayanan dengan membuka kantor cabang dan cabang pembantu di sentra-sentra bisnis.

Dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan juga memperhatikan kondisi dan potensi daerah pengembangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
- b. Persaingan ketat di sektor perbankan dari sisi *size* (modal dan jaringan) serta *pricing* (produk penghimpunan dana dan penyaluran kredit).
- c. Munculnya alternative investasi yang lebih menarik seperti asuransi unit linked, reksadana, ORI dan lain-lain.
- d. Bank – bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya *margin* dan *opportunity*.

Bisnis Treasury

Divisi Treasury sebagai *support balancing unit* akan terus melakukan melakukan strategi yang sejalan dengan fungsinya sebagai pengelola likuiditas dan mensupport pertumbuhan bisnis.

Pengelolaan *Asset* dan *Liability* secara komprehensif terus dilakukan sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan *Net Interest Income*. Upaya tersebut dilakukan melalui *cost reduction* dan *yield enhancement*.

Strategi *cost reduction* dilakukan dengan cara memberikan *pricing* suku bunga DPK yang efisien dan upaya restrukturisasi sumber pendanaan dengan peningkatan komposisi CASA.

Pendanaan yang dihimpun akan dioptimalisasikan penggunaannya dengan menempatkan pada instrumen dengan *yield* kompetitif dengan mengedepankan prinsip *prudential* dan memperhatikan kondisi likuiditas Bank.

Kontribusi *Treasury* untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 cukup baik, Adapun hal – hal yang telah dicapai untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

1. Desk Treasury telah menyumbangkan pendapatan bunga dari efek-efek sebesar Rp20 miliar dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain yang sebesar Rp11 miliar dan keuntungan penjualan efek-efek sebesar Rp0,9 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
2. Aktif dalam transaksi GMRA dengan bank *Counterparty*.

3. Memperkuat struktur pendanaan dengan menerbitkan Obligasi I BRI Agro yang merupakan sumber pendanaan non DPK guna pengelolaan *repricing risk* dan *maturity gap*.

Dengan mempertimbangkan prospek bisnis kedepan maka strategi yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Berperan aktif dalam transaksi GMRA dengan bank-bank *counterparty*.
2. Meningkatkan komposisi Surat Berharga *Available for Sale (AFS)* sehingga dapat menjadi *buffer* likuiditas disaat likuiditas ketat.
3. Peningkatan pendapatan dari transaksi dollar Amerika Serikat (USD) melalui penempatan obligasi, serta meningkatkan transaksi valas dengan nasabah.
4. Melakukan kerja sama dengan beberapa Manajer Investasi/Aset Manajemen untuk mengoptimalkan dana melalui penempatan pada Reksadana.

Dana dan Jasa

Dengan semakin meningkatnya persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan dana pihak ketiga (DPK) serta banyaknya program yang dikeluarkan oleh bank pesaing untuk memperluas pangsa pasar Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan akan menerapkan strategi pemasaran produk dana yang disesuaikan dengan perilaku masyarakat yang dinamis.

Rencana tahun 2018 diarahkan dalam rangka upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan struktur pendanaan Perseroan dengan berbasis ritel (mass banking) sebagai *buffer* dana pihak ketiga (DPK) dalam rangka mendukung *liabilities* dan meningkatkan *competitive position* serta *market share* pertumbuhan DPK secara optimal. Oleh karena itu fokus utama pengembangan dan strategi bisnis yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pengembangan fitur tabungan dengan cara modifikasi fitur yang telah ada dengan cara menyesuaikan dan memperhatikan kebutuhan serta karakteristik nasabah.
2. Melakukan program pemasaran secara terpadu di seluruh unit kerja BRI Agro.
3. Meningkatkan akses layanan *e-channel* dengan bekerjasama dengan perusahaan induk dalam memanfaatkan ATM guna memberikan kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Produk Tabungan

Tabungan Agrotama

Tabungan BRI Agro adalah tabungan konvensional yang menggunakan *system real time online* di seluruh Indonesia, sehingga nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di seluruh Satuan Kerja Perseroan dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu ATM BRI Agro. Tabungan Agrotama terutama diperuntukkan untuk Nasabah yang membuka Tabungan secara kolektif misalnya untuk payroll gaji maupun untuk Nasabah yang terkait dengan kredit.

Tabungan Infiniti

Tabungan Infiniti BRI Agro merupakan simpanan yang diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2013 dengan *tagline* "Tabungan yang memberikan nilai lebih". Tabungan Infiniti BRI Agro dirancang khusus bagi nasabah yang sangat sensitif terhadap suku bunga sehingga nasabah dapat menikmati tingkat pengembalian yang optimal dengan keleluasaan sebuah tabungan.

Tabungan Multima

Tabungan Multima BRI Agro merupakan tabungan berjangka yang dapat membantu nasabah dalam perencanaan keuangan pemenuhan kebutuhan masa depannya. Pada Tabungan Multima, nasabah diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan besaran angsuran dan jangka waktu. Tabungan Multima lebih mengutamakan pengembalian manfaat dimasa depan dari dana yang disetorkan setiap bulannya dengan suku bunga yang bersaing.

Tabungan Sempel

Tabungan untuk pelajar / siswa Warga Negara Indonesia (WNI) yang diterbitkan oleh OJK dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

TabunganKu

Produk tabungan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk Giro

Giro BRI-Agro

Giro BRI Agro (Current Account) adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah (IDR) dan USD yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.

Produk Deposito

Deposito BRI Agro

Deposito BRI Agro merupakan simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah (IDR) dan USD dengan bunga menarik dan beragam keuntungan lainnya.

Produk Kredit :

| | | |
|--|---|---|
| Kredit Dengan Pola KKPA Untuk Komoditi Kelapa Sawit, Karet dan Kakao | : | Kredit investasi yang diberikan oleh BRI AGRO kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya dan atau Pemilik kebun, melalui Mitra Usaha yang tidak mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah. |
| Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) | : | Kredit investasi dan/atau modal kerjayang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku dan bahan bakar nabati. |
| Kredit Usaha Rakyat (KUR) | : | Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit investasi kepada debitur perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. |
| Agro Griya (Kredit Pemilikan Properti) | : | Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian, renovasi, take over fasilitas kredit properti bank lain (dengan maupun disertai top up), atau top up plafond, dan refinancing properti. |
| Agro Mobil | : | Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian mobil. |
| Agro Multiguna | : | Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai berbagai keperluan konsumtif (antara lain biaya pendidikan, pesta pernikahan, pembelian peralatan elektronik, dll) maupun pembiayaan untuk pengembangan usaha profesional (misal pembelian peralatan dokter, dll) |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Kredit Karyawan SHT | : | Fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan yang perhitungannya plafond pinjaman dan jaminan pokoknya adalah Santunan Hari Tua (SHT) calon debitur, untuk tujuan pembiayaan persiapan masa pensiuncalon debitur. |
| Kredit Karyawan (Kretap) | : | Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau <i>fixed income</i> (gaji) yang ditujukan baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif, seperti pembelian kebun, perbaikan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan, dan lain-lain |
| Kredit Pensiun | : | Fasilitas kredit yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan konsumtif. |
| Kredit Modal Kerja (KMK) | : | Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya |
| Kredit Investasi | : | Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan barang-barang modal untuk proyek baru, proyek perluasan dan atau <i>Refinancing</i> dan pada umumnya diberikan untuk jangka waktu diatas 1 (satu) tahun |

B. TINGKAT KESEHATAN BANK

Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.04/POJK.03/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti: Profil Risiko Perseroan, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan risiko.

Tingkat kesehatan Perseroan secara keseluruhan mempunyai peringkat komposit 2 (sehat) yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko posisi 31 Desember 2017, sebagai berikut:

a. Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko untuk tahun 2017 telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) serta ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku. Laporan ini merupakan adanya perubahan format dari kertas kerja yang kami sajikan sehingga dengan seiring perkembangan perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan, upaya tersebut akan kami lakukan dengan selalu melakukan *update* dan *me-review* kertas kerja profil risiko Perseroan, tentunya dengan saran, kritik dan arahan dari seluruh komponen yang terkait mulai dari unit bisnis, pejabat eksekutif, Dewan Komisaris, Direksi, maupun arahan dari bimbingan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia.

Secara keseluruhan Peringkat Profil Risiko Perseroan dengan skala usaha yang dimiliki saat ini terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit (1); Risiko Pasar (2); Risiko Likuiditas (3); Risiko Operasional (4); Risiko Hukum (5); Risiko Strategik (6); Risiko Kepatuhan (7); dan Risiko Reputasi (8), dalam penilaian kami selama periode 31 Maret 2017 penilaian peringkat Profil Risiko dengan peringkat 3 “MODERATE” dengan tingkat risiko *inherent* dinilai 3 “MODERATE”, dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah “FAIR”.

b. Analisis mengenai Good Corporate Governance (GCG)

Selama Tahun 2017 berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) sudah dilakukan dengan predikat “baik” dan nilai komposit “2”, sehingga kami simpulkan hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko ini, masuk katagori matrik peringkat “2”, artinya mencerminkan bahwa Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar GCG seperti tertuang dalam Kertas Kerja *Self Assessment*. GCG dan apabila terdapat adanya suatu kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Perseroan.

c. Analisis mengenai Rentabilitas

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Rentabilitas di Perseroan Selama Tahun 2017 adalah memadai. Pencapaian laba sebesar 101,95% dari RBB dan mendukung pertumbuhan permodalan bank sehingga peringkat rentabilitas diperoleh nilai “2” (memadai), dengan pertimbangan karena seluruh atau sebagian besar sudah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai.
- 2) Sumber utama rentabilitas berasal dari sumber pendapatan utama (*core earnings*) dari aktivitas perkreditan, dominan.
- 3) Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings*, cukup stabil.
- 4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa *rating* tinggi, didukung oleh kecenderungan (*trend*) laba yang terus meningkat.

d. Analisis mengenai Permodalan

Selama Tahun 2017 Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai dengan nilai “2” yang relatif terhadap profil risikonya. Hal tersebut disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan.

Hal ini berdasarkan penilaian sebagai berikut:

a. Kecukupan permodalan:

1. Perseroan memiliki tingkat permodalan diatas persyaratan minimum dan dapat mengcover terhadap seluruh risiko yang dihadapi.
2. Kualitas komponen permodalan Perseroan pada umumnya baik, permanen dapat menyerap kerugian.

b. Pengelolaan permodalan:

Perseroan telah memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik yang dilakukan perhitungannya setiap bulannya. Perhitungan permodalan per 31 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Rasio CAR (Tier 1) sebesar 24,83%
2. Rasio CAR (Tier 2) sebesar 0,70%
3. Rasio CAR (Total) sebesar 25,53%

Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.04/POJK.03/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti: Profil Risiko Perseroan, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan risiko.

C. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik dan dalam cakupan yang lebih kecil yaitu bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin intensif. Perseroan bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal *pricing*/bunga. Beberapa pesaing Perseroan yang lebih besar dibandingkan Perseroan, memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang lebih besar dan memiliki cabang dan jaringan ATM yang lebih luas. Per 31 Desember 2017, jumlah tabungan dan giro Perseroan dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseroan adalah sebesar 14,73%. Sedangkan sampai dengan akhir Maret 2018, jumlah tabungan dan giro Perseroan dibandingkan dengan total DPK sebesar 14,20%.

Sebagai tambahan, Perseroan secara tidak langsung menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga jasa keuangan. Pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank domestik dan asing yang telah dan baru beroperasi, yang mana banyak dari bank asing tersebut menerapkan kerjasama *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, mengakibatkan dampak negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia masih terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau kredit dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan ini akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan Perseroan dan banyak lembaga keuangan ini juga yang memiliki ikatan kepada Pemerintah atau grup bisnis besar dengan sumber daya finansial yang lebih besar.

Posisi Perseroan dalam industri (pangsa pasar yang dikuasai)

Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU II berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang memposisikan sebagai bank fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis. Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko, Perseroan membiayai usaha di luar agribisnis.

Saat ini, pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia masih dibawah 1% baik untuk DPK maupun kredit per 31 Maret 2018. Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan memperbanyak jaringan layanan kantor cabang maupun layanan berbasis teknologi (e-channel).

(dalam miliar Rupiah)

| KETERANGAN | PASAR | PERSEROAN | PANGSA PASAR |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| Kredit | 4.788.783 | 12.506 | 0,261% |
| DPK | 5.293.098 | 13.863 | 0,262% |

(Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2018)

Perseroan mempunyai ceruk pasar di bidang agribisnis yang telah ditekuni selama 28 tahun. Hal ini memberikan keunggulan akan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio kredit dibidang pertanian yang relatif spesifik.

Keunggulan lain yang sangat penting adalah kedekatan Perseroan dengan komunitas usaha pertanian yang sudah terjalin sangat panjang, terutama dengan PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV yang secara tidak langsung turut serta membidani kelahiran Perseroan.

Upaya Perseroan dalam menghadapi persaingan industri

Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah usaha bidang agribisnis. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis seperti, produk yang dapat dipergunakan untuk rencana '*replanting*' atas perkebunan dan produk persiapan pensiun bagi karyawan di bidang perkebunan. Selain itu, arah pengembangan jaringan layanan kantor Perseroan termasuk layanan kantor berbasis teknologi (e-channel) dikembangkan pada sentra agrobisnis, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selain di Pulau Jawa.

IX EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi Ekuitas Perseroan untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008, dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain.

(dalam ribuan Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Maret 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|----------------------|-------------------------|
| EKUITAS | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.791.293.698 | 1.791.253.796 |
| Tambahan Modal Disetor | 945.215.409 | 945.203.438 |
| (Kerugian) Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual - Setelah Pajak Tangguhan | (1.458.021) | 13.106.428 |
| Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja – Setelah Pajak Tangguhan | 1.194.377 | 1.370.315 |
| Cadangan Khusus | 116.559 | 116.559 |
| Cadangan Umum | 10.902.804 | 10.902.804 |
| Laba Ditahan | 471.023.114 | 349.331.537 |
| Ekuitas Neto | 3.164.287.940 | 3.111.284.877 |

Dalam PMHMETD VI yang disertai dengan Waran Seri II telah diterbitkan Waran Seri II sejumlah 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II dengan periode pelaksanaan yakni tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 jumlah Waran Seri II yang telah dilaksanakan adalah sejumlah 71.669.449 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan) saham. Pada periode 1 April 2018 sampai dengan 11 Juni 2018 terdapat penambahan pelaksanaan Waran Seri II sejumlah 541.268.205 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima) saham. Sisa Waran Seri II yang tidak dilaksanakan yakni berjumlah 3.969.401 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus satu) Waran dan per tanggal 11 Juni 2018 telah gugur demi hukum dengan demikian tidak dapat dipergunakan untuk membeli saham.

Setelah PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 (lima miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.400,- (empat ratus Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp2.000.435.841.620 (dua triliun empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

| | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | Tambahan Modal Disetor | Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual- setelah Pajak Tanggung | Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja – Setelah Pajak Tanggung | Cadangan Khusus | Cadangan Umum | Laba Ditahan | Jumlah Ekuitas |
|--|--|------------------------------|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2018 | 1.791.293.698 | 945.215.409 | (1.458.021) | 1.194.377 | 116.559 | 10.902.804 | 417.023.114 | 3.164.287.940 |
| Perubahan Ekuitas atas Pelaksanaan Waran Seri II yang dilakukan oleh pemegang saham untuk periode 1 April 2018 s/d 11 Juni 2018 | 54.126.820 | 16.238.046 | | | | | | 70.364.866 |
| Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD sejumlah 5.001.089.604 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- dengan asumsi Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- setiap saham dan biaya emisi sebesar 0,131% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD atau Rp2.620.571 | 500.108.961 | 1.497.706.310 | | | | | | 1.997.815.271 |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 setelah berakhirnya pelaksanaan Waran Seri II dan PMHMETD dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham | 2.345.529.479 | 2.459.159.765 | (1.458.021) | 1.194.377 | 116.559 | 10.902.804 | 417.023.114 | 5.232.468.077 |

X KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka kebijakan dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih per tahun dimulai tahun buku 2018, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir dengan memperhatikan pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pembagian dividen interim tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pembagian dividen interim tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lenih kecil dari jumlah modal ditempatkan dandiseter ditambah dengan cadangan wajib
- Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan direksi dengan persetujuan dewan komisaris
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan.

Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai, jika ada, dalam mata uang Rupiah.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Dividen Tunai | 53.388.295 | 19.570.597 | 15.615.422 | 6.076.112 | 10.278.181 |
| Persentase | 38% | 19% | 20% | 10% | 20% |
| Laba Tahun Berjalan | 140.495.535 | 103.003.152 | 80.491.880 | 59.407.934 | 52.439.708 |
| Saldo Laba | 360.350.900 | 239.425.962 | 148.583.782 | 75.408.037 | 36.059.507 |

Perseroan tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008);
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:
 - Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia,

dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu :

- a. Form DGT-1 atau
- b. Form DGT-2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subyek di negara mitra.
- c. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris
- d. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010
- e. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah di legalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, dan
- f. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai kelaziman di negara mitra P3B dan anama pejabat dimaksud.

Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan masa berlakunya belum terlewati, tetap dapat dipergunakan dengan berakhirnya masa berlaku tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 Tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2017 tanggal 19 Juni 2017..

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Per 31 Maret 2018, Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh utang pajaknya sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------------------|-------------------|
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 349.940 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 115.395 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 6.686.801 |
| Pajak Penghasilan Pasal 29 | 48.320.813 |
| Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) | 10.004.370 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 50 |
| Total | 65.477.369 |

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD VIII INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD.

XII LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : PRISMA & Co Advocate, Legal and Tax Consultant

Alamat : Cyber 2 Tower, 22nd Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950

Telp. : (+62) (21) 29021315 (hunting)

Fax. : (+62) (21) 29021318

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. STTD : 104/BL/STTD-KH/2011, tanggal 11 April
2011 atas nama Tjandra Putra

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar
Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal No.
KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B.51.A/Dir.05/SKP/II/
2018 tanggal 28 Februari 2018.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD dalam rangka PUT VIII ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

**Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
(the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited)**

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

Telp. : (62-21) 5289 5000

Fax. : (62-21) 5289 4100

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia
No. Institut Akuntan Publik Indonesia: Registrasi Akuntan Publik No.
AP.1008 atas nama Danil Setiadi
Handaja.

No. STTD : 04/PM.22/STTD-AP/2014 tanggal 7
Mei 2014

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia dan Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.B.90.a/Dir.05/SKP/III/
2018 tanggal 20 Maret 2018.

Tugas Pokok :

Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan, melakukan penelaahan (review) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan.

Notaris : **Kantor Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H.**

Alamat : Cyber 2 Tower, 22nd Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No.13 - Jakarta 12950

Telp. : (62) (21) 29021312

Fax. : (62) (21) 29021314

No. Ikatan Notaris Indonesia : 036/Pengda/Suket/III/2010 a/n
Mochamad Nova Faisal, SH.

No. STTD : 398/BLS/STTD-N/2010 tanggal 8
Desember 2010

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang
No.30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia.

Tugas Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD dalam rangka PUT VIII ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD dalam rangka PUT VIII ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B.52.B/Dir.05/SKP/III/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Biro : **PT Datindo Entrycom**

Administrasi

Efek (BAE)

Alamat : Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2
Jakarta 11020 – Indonesia

No. Telp : +62 21 3508070

No. Fax : --

No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995.

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
(ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa
Keuangan

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD dalam rangka PUT VIII ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke

dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B.47a/Dir.01/SKP/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT VII Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XIII TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Akta No 02 tanggal 2 Juli 2018 tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VIII PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

a. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD VIII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000 (seribu) saham Perseroan akan memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

1. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 12 September 2018

b. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 September 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing_masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal tanggal 13 September 2018 dengan membawa:

1. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
2. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

c. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.

Prosedur pelaksanaan :

1. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
2. Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.
3. Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.
4. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

d. Pemesanan Saham Tambahan

1. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan.
2. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
3. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
4. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2018 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

e. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 25 September 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VIII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

f. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD VII yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindahbukuan / transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Kantor Cabang Utama (KCU)
No. Rekening : A/C. 0012-01-000108.99.4
Atas nama : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk – PMHMETD

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 September 2018.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

g. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

h. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat_syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

i. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 26 September 2018 atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 26 September 2018 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi tanggal yang telah ditetapkan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

j. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 18 September 2018 sampai dengan 24 September 2018. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 26 September 2018. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

k. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

XIV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT VIII ini melalui iklan di surat kabar.

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 13 September 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal tanggal 13 September 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta
Telp. 021 – 3508070
Fax. 021 – 3508069

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 September 2018 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.